

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	5
c. Jumlah Penduduk	13
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	15
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah Dan Pegawai Pemerintah	15
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19
1.1.2 Perencanaan pembangunan Daerah	22
a. Permasalahan Strategis Daerah.....	22
b. Visi Misi Kepala Daerah	46
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	62
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	101
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	130
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DAERAH	149
2.1 Capaian Indikator Makro	149
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	150
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	150
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	206
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	233

BAB III	CAPAIAN KINERJA	PELAKSANAAN	TUGAS
PEMBANTUAN			349
BAB IV PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 353			
A. Urusan Pendidikan 353			
1. Jenis Pelayanan Dasar			353
2. Target Capaian SPM			353
3. Alokasi Anggaran			356
4. Dukungan Personil			356
5. Realiasasi Capaian.....			357
6. Permasalahan dan Solusi			361
7. Program dan Kegiatan			361
B. Urusan Kesehatan 364			
1. Jenis Pelayanan Dasar			364
2. Target Capaian SPM			364
3. Alokasi Anggaran			375
4. Dukungan Personil.....			376
5. Realisasi Capaian			377
6. Permasalahan dan Solusi			391
7. Program dan Kegiatan			392
C. Urusan Pekerjaan Umum 393			
1. Jenis Pelayanan Dasar			393
2. Target Capaian SPM			393
3. Alokasi Anggaran			395
4. Dukungan Personil.....			396

5. Realisasi Capaian	396
6. Permasalahan dan Solusi	399
7. Program dan Kegiatan	400
D. Urusan Perumahan Rakyat	
1. Jenis Pelayanan Dasar	401
2. Target Capaian SPM	401
3. Alokasi Anggaran SPM	402
4. Dukungan Personil.....	402
5. Realisasi Capaian.....	402
6. Permasalahan dan Solusi	405
7. Program dan Kegiatan	405
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1. Jenis Pelayanan Dasar	406
2. Target Capaian SPM	406
3. Alokasi Anggaran.....	409
4. Dukungan Personil.....	409
5. Realisasi Capaian.....	410
6. Permasalahan dan Solusi	415
7. Program dan Kegiatan	415
F. Urusan Sosial	
1. Jenis Pelayanan Dasar	418
2. Target Capaian SPM	419
3. Alokasi Anggaran.....	425
4. Dukungan Personil.....	425
5. Realisasi Capaian.....	426
6. Permasalahan dan Solusi	432
7. Program dan Kegiatan	433
BAB V PENUTUP	435

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pasal 11 Ayat (2) dan (3), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, telah menjadi kewajiban konstitusi bahwa Bupati Sukoharjo juga akan menyampaikan LPPD Akhir Tahun Anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dimana berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi penyusunan LPPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD ini memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, baik dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, sampai selesaiannya penyusunan laporan ini.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Sukoharjo,

Maret 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor76);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 33).

b. Data Geografis Wilayah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, maka luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah seluas 49.323 hektar.

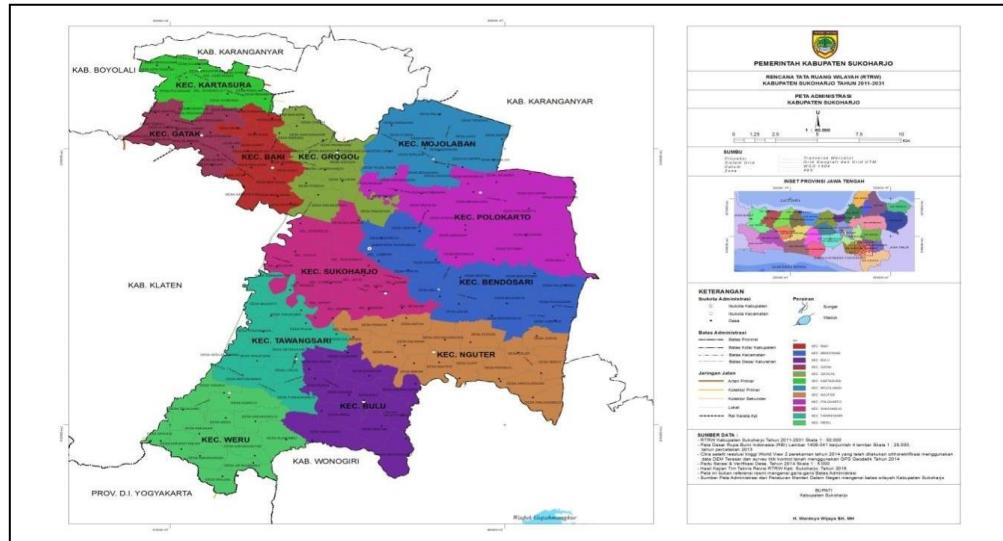
Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada:

1. Permendagri 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY).

Dimana batas wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kabupaten Sukoharjo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kabupaten Gunung Kidul.

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri.
3. Permendagri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta.
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.
5. Permendagri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali.
6. Permendagri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten.

Gambar I. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara $110^{\circ} 57' 33,70''$ BT – $110^{\circ} 42'6,79''$ BT, dan antara $7^{\circ} 32' 17,00''$ LS – $7^{\circ} 39' 42,00''$ LS.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Karanganyar |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten |

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan 4.788 Rukun Tetangga dan 1.487 Rukun Warga dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Pembagian wilayah administrasi per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1
Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2023**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW
1	2	3	4	7	8
1.	Weru	13	-	398	137
2.	Bulu	12	-	245	102
3.	Tawangsari	12	-	320	115
4.	Sukoharjo	-	14	476	145
5.	Nguter	16	-	352	122
6.	Bendosari	13	1	326	110
7.	Polokarto	17	-	382	125
8.	Mojolaban	15	-	547	162
9.	Grogol	14	-	661	146
10.	Baki	14	-	366	111
11.	Gatak	14	-	265	96
12.	Kartasura	10	2	450	116
Jumlah		150	17	4.788	1.487

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawangsari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m – 125 m dpl, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto.

Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengan yaitu kelerengan landai dan kelerengan curam. Kelerengan landai memiliki kisaran kelerengan (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Sukoharjo Grogol, dan Kartasura. Kelerengan agak landai (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawangsari. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawangsari memiliki kelerengan yang beragam karena terdiri dari kelerengan landai dan curam.

Ditinjau dari segi geologi terdapat empat jenis batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu Alluvium, Batuan Gunung Api Merapi, Batuan Gunung Api Lawu dan Formasi Mandalika. Berdasarkan peta persebaran geologi di Kabupaten Sukoharjo terlihat bahwa:

- a. Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan sebagian Kecamatan Polokarto merupakan tanah Alluvium. Tanah Alluvium merupakan tanah hasil erosi yang diendapkan di dataran rendah. Ciri-ciri Tanah Alluvium adalah berwarna

kelabu dan subur. Tanah ini cocok untuk tanaman padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan.

- b. Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, serta sebagian kecil Kecamatan Polokarto merupakan tanah hasil dari Gunung Api Merapi menyebabkan tanah pada kawasan tersebut merupakan tanah yang subur.
- c. Kecamatan Weru serta sebagian Kecil Kecamatan Nguter merupakan tanah Formasi Mandalika. Tanah Formasi Mandalika merupakan salah satu formasi geologi di Pegunungan selatan Jawa Bagian Timur. Formasi ini tersusun atas breksi gunung api, lava dan tuff, sisipan batu pasir dan batu lanau.
- d. Tanah dengan jenis batuan Gunung Api Lawu terdapat pada sebagian kecil Kecamatan Mojolaban.
- e. Kondisi hidrologi di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan oleh keberadaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Sukoharjo, meliputi sungai, mata air, waduk, dan embung. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu, dengan anak-anak sungai sekitar 25 yaitu Sungai Walikan, Padas, Ambil-ambil, Pacinan, Jlantah, Songgorunggi, Buntung, Atasaji, Gunting, Karanganyar, Siluwur, Pakelan, Brambang, Tempel, Samin, Langsur, Ranjing, Buret, Umet, Dumpul, Larangan, Gede, Krecekan, Cabak dan Palur.
- f. Mata air yang ada di Kabupaten Sukoharjo tersebar di 5 Kecamatan yaitu di Kecamatan Bulu (mata air Pecinan, Baseng, Kamal dan Sirahan), di Kecamatan Baki mata air Kluyon, di Kecamatan Weru (mata air Banyubiru, Kedungdowo, Kedunggandong dan Beji Jatingarang), di Kecamatan Tawangsari mata air Pundungrejo dan di Kecamatan kartasura (mata air Desa Wirogunan dan Gayam Pitu).

- g. Waduk yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yakni Waduk Mulur, yang mampu menampung air sejumlah kurang lebih 3.435.000 m³ dan mengairi sawah seluas 4.787 Ha. Disamping itu juga terdapat Dam Colo yang mengairi lahan seluas kurang lebih 10.577 hektar.
- h. Sedangkan embung-embung terdapat di Kecamatan Bulu (Embong Pacinan dan Njo'o), Embong Ponowaren di Kecamatan Tawangsari, Embong Majasto di Kecamatan Bendosari, Embong Serut di Kecamatan Nguter, di Kecamatan Sukoharjo (embong Kriwen dan Kenep) dan di Kecamatan Weru (Embong Weru dan Grogol).
- i. Kondisi klimatologi Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi iklim tropis dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan penghujan serta temperatur sedang. Suhu udara di Kabupaten Sukoharjo berkisar antara 23°C sampai dengan 34°C sedangkan kelembapan udara bervariasi antara 75% sampai dengan 92%.
- j. Curah hujan rata-rata pada Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data yang tersedia tercatat berkisar 1.000–2.500 mm. Kabupaten Sukoharjo terbagi pada 3 kategori intensitas curah hujan, antara 1.000–1.500 mm, 1.500–2.000 mm dan 2.000–2.500 mm. Wilayah dengan intensitas curah hujan terbesar di Kabupaten Sukoharjo terdapat pada Kecamatan Kartasura, sedangkan wilayah dengan intensitas curah hujan sedang terdapat pada Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Weru, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto serta sebagian Kecamatan Sukoharjo, wilayah dengan intensitas curah hujan terendah terdapat pada Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu dan sebagian Kecamatan Bendosari.

- k. Menurut RTRW, luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 49.323,30 hektar atau sekitar 1,5% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut fungsinya, penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Data peruntukan lahan disajikan sebagai berikut:

Tabel .I.2 Peruntukan Lahan Kabupaten Sukoharjo

No	Peruntukan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Lindung	297,00
2	Hutan Produksi	70,00
3	Hutan Rakyat	3.500,00
4	Pertanian Lahan Basah	23.502,00
5	Pertanian Lahan Kering	3.362,00
6	Perkebunan	708,00
7	Peternakan	138,00
8	Pertambangan	166,00
9	Industri	2.352,00
10	Pariwisata	9,00
11	Permukiman	15.092,00
12	Lainnya	127,00
Jumlah		49.323,00

Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

c. Jumlah Penduduk

Dengan luas wilayah sebesar 466,66 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan Data Semester II sebanyak 911.745 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 455.919 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 455.826 jiwa. Jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3
Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan dan
Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1.	Weru	28.849	6,33	29.085	6,38	57.934	6,35
2.	Bulu	18.878	4,14	18.444	4,05	37.322	4,09
3.	Tawangsari	28.613	6,28	28.278	6,20	56.891	6,24
4.	Sukoharjo	49.655	10,89	49.616	10,88	99.271	10,89
5.	Nguter	28.121	6,17	27.694	6,08	55.815	6,12
6.	Bendosari	32.402	7,11	32.391	7,11	64.793	7,11
7.	Polokarto	44.042	9,66	43.811	9,61	87.853	9,64
8.	Mojolaban	46.315	10,16	46.493	10,20	92.808	10,18
9.	Grogol	60.866	13,35	60.718	13,32	121.584	13,34
10.	Baki	36.212	7,94	35.935	7,88	72.147	7,91
11.	Gatak	27.018	5,93	27.102	5,95	54.120	5,94
12.	Kartasura	54.948	12,05	56.259	12,34	111.207	12,20
Jumlah		455.919	100,00	455.826	100,00	911.745	100,00
Jumlah Total		455.919	100,00	455.826	100,00	911.745	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yang sebesar 904.862 jiwa sedangkan pada tahun 2023 sebesar 911.745 jiwa, berarti ada kenaikan sebesar 0,75%.

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 berdasarkan usia.

Tabel I.4
Komposisi penduduk Sukoharjo berdasarkan usia
Tahun 2023

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	0 – 4 tahun	29.314	27.743	57.057
2.	5 – 9 tahun	34.358	32.254	66.612
3.	10 – 14 tahun	36.195	34.334	70.529
4.	15 – 19 tahun	35.602	33.567	69.169
5.	20 – 24 tahun	35.222	33.750	68.972
6.	25 – 29 tahun	33.257	32.424	65.681
7.	30 – 34 tahun	31.926	31.000	62.926
8.	35 – 39 tahun	31.518	31.057	62.575
9.	40 – 44 tahun	37.005	36.789	73.794
10.	45 – 49 tahun	33.274	33.374	66.648
11.	50 – 54 tahun	30.110	31.621	61.731
12.	55 – 59 tahun	26.565	28.825	55.390
13	60 – 64 tahun	22.772	24.569	47.341
14.	65 – 69 tahun	16.336	17.114	33.450
15.	70 – 74 tahun	10.756	11.308	22.064
16.	≥ 75 tahun	11.709	16.097	27.806
TOTAL				911.745

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

**Tabel I.7
Jumlah Desa/Kelurahan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		DESA	KEL	
1	2	3	4	5
1	WERU	13	-	13
2	BULU	12	-	12
3	TAWANGSARI	12	-	12
4	NGUTER	16	-	16
5	SUKOHARJO	-	14	14
6	BENDOSARI	13	1	14
7	POLOKARTO	17	-	17
8	MOJOLABAN	15	-	15
9	GROGOL	14	-	14
10	BAKI	14	-	14
11	GATAK	14	-	14
12	KARTASURA	10	2	12
JUMLAH				167

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebanyak 6.016 PNS. Dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 2.393 PNS dan jumlah PNS perempuan sebanyak 3.623 PNS.

Rincian data PNS di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.6
Data PNS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Menurut Unit Kerja Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	2. Sekretariat Daerah	3. 106	4. 64	5. 42
2.	2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34	24	10
3.	3. Inspektorat Daerah	39	21	18
4.	4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39	22	17
5.	5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	79	45	34
6.	6. Badan Perencanaan Perencanaan, Riset dan Inovasi daerah	26	14	12
7.	7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	17	11	6
8.	8. Dinas Sosial	24	15	9
9.	9. Dinas Pangan	21	11	10
10.	10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29	15	14
11.	11. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	26	17	9
12.	12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.146	1..198	1.948
13.	13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32	16	16
14.	14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122	99	23

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	2	3	4	5
15.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29	20	9
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27	12	15
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	30	19	11
18.	Dinas Kesehatan	1.043	154	889
19.	Dinas Perhubungan	41	31	10
20.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37	26	11
21.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	8	12
22.	Dinas Lingkungan Hidup	84	62	22
23.	Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	82	47	35
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46	22	24
25.	Dinas Pertanian dan Perikanan	118	63	55
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	65	59	6
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Ir Soekarno	385	1213	262
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	4	4
29.	Kecamatan Sukoharjo	89	55	34
30.	Kecamatan Polokarto	16	15	1

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	2	3	4	5
31.	Kecamatan Nguter	16	10	6
32.	Kecamatan Weru	10	7	3
33.	Kecamatan Bulu	12	11	1
34.	Kecamatan Tawangsari	12	8	4
35.	Kecamatan Mojolaban	13	8	5
36.	Kecamatan Grogol	15	8	7
37.	Kecamatan Bendosari	19	13	6
38.	Kecamatan Kartasura	29	17	12
39.	Kecamatan Baki	15	9	6
40.	Kecamatan Gatak	15	10	5
	JUMLAH	6.016	2.393	3.623

Sumber : dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel I.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN DAERAH	2.032.501.407.587,00	2.160.890.181.591,00	106,32
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	453.319.631.218,00	537.102.489.624,00	118,48
	a. Pajak Daerah	257.350.000.000,00	322.199.007.606,00	125,20
	b. Retribusi Daerah	20.129.337.550,00	24.160.662.224,00	120,03
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.448.230.309,00	39.448.230.309,00	100,00
	d. Lain-lain PAD yang Sah	136.392.063.359,00	151.294.589.485,00	110,93
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.576.171.776.369,00	1.622.132.296.967,00	102,92
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.367.485.507.000,00	1.419.781.256.696,00	103,82
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.686.269.369,00	202.351.040.271,00	96,96
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00
	a. Pendapatan Hibah	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kab. Sukoharjo

Tabel I.8
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
A.	BELANJA DAERAH	2.343.181.628.063,00	2.235.426.792.478,00	95,40
I.	BELANJA OPERASI	1.648.198.729.994,00	1.565.378.114.470,00	94,98
	a. Belanja Pegawai	869.491.856.076,00	827.872.956.836,00	95,21
	b. Belanja Barang dan Jasa	673.914.069.518,00	634.798.969.751,00	94,20
	c. Belanja Subsidi	700.000.000,00	580.074.513,00	82,87
	d. Belanja Hibah	100.899.504.400,00	98.941.813.370,00	98,06
	e. Belanja Bantuan Sosial	3.193.300.000,00	3.184.300.000,00	99,72
II.	BELANJA MODAL	315.607.405.556,00	292.716.698.008,00	92,75
	a. Belanja Modal Tanah	2.669.050.000,00	2.612.595.129,00	97,88
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.155.499.882,00	71.363.929.617,00	92,49
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.982.579.253,00	114.282.812.756,00	94,46
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.474.357.115,00	99.142.721.002,00	90,56
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.325.919.306,00	5.314.639.504,00	99,79
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62
	a. Belanja Tidak Terduga	1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62

No	Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
IV.	BELANJA TRANSFER	377.816.270.000,00	377.291.090.000,00	99,86
	a. Belanja Bagi Hasil	24.698.997.000,00	24.698.997.000,00	100,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	353.117.273.000,00	352.592.093.000,00	99,85

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kab. Sukoharjo

Tabel I.9
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
A.	PEMBIAYAAN	310.680.220.476,00	307.773.662.408,00	99,06
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	337.690.220.476,00	335.172.798.126,00	99,25
	a. Sisa Perhitungan Anggaran Sebelumnya Lebih Tahun	304.412.025.326,00	304.412.025.326,00	100,00
	b. Pencairan Cadangan Dana	33.278.195.150,00	30.760.772.800,00	92,44
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.010.000.000,00	27.399.135.718,00	101,44
	a. Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.389.135.718,00	101,95
	b. Penyertaan Modal Daerah	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kab. Sukoharjo

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;
 - 1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD yang dimungkinkan karena masih rendahnya kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anaknya yang berusia balita ke sekolah PAUD.
- b) Masih cukup banyak persentase anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP yang diakibatkan permasalahan dalam keluarga terutama masalah ekonomi keluarga yang kurang maupun masalah sosial psikologis ataupun pergaulan yang dihadapi peserta didik sehingga membuat anak didik tidak bisa melanjutkan pendidikan.
- c) Masih adanya bangunan/ruang kelas SD/Sederajat keadaan rusak sedang dan dalam keadaan rusak berat sehingga memerlukan penanganan.
- d) Masih banyak guru yang memiliki kualifikasi ijazah di bawah D4/S1 sehingga menyebabkan target Persentase Guru SD & SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 tidak terpenuhi.
- e) Distribusi jumlah guru di tingkat pendidikan dasar kurang seimbang dengan jumlah siswa antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.

2) Kesehatan

- a) Kematian Bayi Umur 0-11 bulan sebanyak 67 kasus yang disebabkan antara lain kelainan kongenital, BBLR, Asfiksia, Sepsis, BLSR, Anemia, Infeksi paru, Respiratori Distres sindrom,DHF, syock hipovolemik,perdarahan otak,atresia bilirubin, susp bronkopnemonia, pneumonia,diare. Penyebab

kematian bayi tertinggi adalah kelainan konginetal dan BBLR. Bayi yang mempunyai kelainan kongenital mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga tidak dapat bertahan hidup karena kondisi kelainan organ, sehingga bayi tidak dapat menerima asupan nutrisi dan kematangan organ belum sempurna dengan baik di banding bayi normal.

- b) Bayi dengan BBLR kecenderungan untuk bertahan hidup rendah karena berat badan bayi yang kurang dari 2500 gram yang menyebabkan bayi tidak dapat bertahan hidup ,pada Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) dengan berat kurang dari 2500 juga sering mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menambah komplikasi karena tubuh bayi rentan terhadap infeksi sehingga menjadikan sakit bahkan sampai pada kematian.
- c) Kematian Balita umur 0-59 bulan sebanyak 83 kasus, kasus kematian balita adalah kasus kematian komulatif dari angka kematian Neonatal, bayi dan balita. Penyebab kematian balita usia 12-59 bulan selain tersebut diatas (kematian AKB) antara lain CA mata 1kasus ,kelainan kongenital 4 kasus ,luka bakar 1 kasus, sepsis 1 kasus, jatuh/kecelakaan 1 kasus, febris 1 kasus ,DSS 1kasus, GEA 1 kasus, infeksi otak 1 kasus,leukemia 2 kasus, diare dan kelainan saluran pencernaan 2 kasus, hidrocepalus 1 kasus,ca ginjal 1kasus, kejang demam 1 kasus. Semua kasus adalah penyebab langsung kematian balita.
- d) Masih adanya penyakit menular seperti Demam Berdarah (DBD), Chikungunya, Malaria dan Leptospirosis sehingga perlu mendapat perhatian.

- e) Untuk Akses Air Minum Berkualitas mencapai 94,68 persen dengan Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan 77,10 persen, sedang Capaian Desa/Kelurahan terkait sanitasi baru mencapai 14,4 persen, sehingga masih sangat diperlukan program sanitasi melalui Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM).

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Secara keseluruhan kondisi permukaan jalan di Kabupaten Sukoharjo belum maksimal, karena kondisi jalan baik 23,31%, sedang 66,05%, rusak ringan 10,50% dan rusak berat sebesar 0,15%;
- b) Masih luasnya kawasan yang terdampak banjir dan genangan, yaitu sekitar 44,27 % dari luas daerah genangan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara drainase yang dibarengi dengan ada dan kurangnya pengawasan serta pengendalian terhadap pengelolaan jaringan drainase. Disamping itu juga disebabkan karena sistem drainase perkotaan belum terintegrasi dan kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai;
- c) Masih adanya jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak, dimana kondisi baik baru 44,27%, sedangkan kondisi rusak ringan sekitar 1,81% terdiri dari rusak sedang 48,05% dan rusak berat 5,87%;
- d) Pembangunan drainase di Kabupaten Sukoharjo tiap tahunnya menurun di tahun 2022 pembangunan drainase 2.643,50 m, hal ini perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki kerawanan bencana akan banjir di seluruh wilayah.

- e) Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pada air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Pada tahun 2022 masih ada 16,37% penduduk yang belum mengakses air minum perpipaan maupun non perpipaan;
- f) Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
- g) Pada tahun 2022 baru 2.859 KK yang mendapat layanan IPAL;
- h) Capaian Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat atau capaian sanitasi pada tahun 2022 sebesar 1,42%;
- i) Capaian sanitasi layak tahun 2022 masih 95,95, sehingga masih ada 4,05 % penduduk yang belum memiliki sanitasi layak.
- j) Belum seluruh Perkotaan mempunyai rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan.
- k) Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Persetujuan Bangunan Gedung.

4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- a) Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 11.524 sesuai Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021 tentang Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- b) Masih adanya kawasan permukiman kumuh seluas 19,78 ha pada tahun 2022 atau 0,004% dari luasan kabupaten. Hal ini disebabkan oleh ketidak teraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, jalan lingkungan yang tidak memadai dan kurangnya proteksi terhadap bahaya kebakaran;

- c) Belum optimalnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), pada tahun 2022 penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah sebanyak 48 perumahan.
- d) Masih tingginya angka backlog rumah sejumlah 10.372 unit.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a) Masih lemahnya kemampuan dan ketrampilan anggota Satpol PP dan PPNS terhadap penguasaan Perda dan Perbup.
- b) Masih banyak Perda/Perbup yang hanya mengandung sanksi administrasi tanpa ada sanksi pidana, serta Perda yang mengandung sanksi 3 (tiga) bulan keatas.
- c) Anggota PPNS masih menyebar diberbagai Perangkat Daerah.
- d) Perlu adanya specialisasi keahlian PPNS terhadap penguasaan Perda dan Perbup.
- e) Masih perlu membutuhkan perhatian adalah masalah penyelesaian angka kriminalitas karena persentasenya belum mencapai 80%.
- f) Perlu peningkatan kinerja Kader Siaga Trantib (KST) sebagai wujud partisipasi masyarakat.
- g) Masih rendahnya SDM sebagian anggota Satlinmas.
- h) Belum terbentuk kelembagaan Satlinmas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- i) Dengan keberadaan Pemadam Kebakaran yang menjadi bagian dari Satpol PP, maka perlu ditingkatkan SDM anggota Damkar dalam pelayanan penanganan Pemadaman Kebakaran.
- j) Belum optimalnya ketersediaan dokumen perencanaan penanganan bencana.

6) Sosial

- a) Kualitas pengelolaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan;
 - b) Belum tersedianya rumah singgah untuk penampungan sementara penyandang masalah keterlantaran.
- b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- a) Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;
- b) Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- c) Pada tahun 2022 ini masih adanya penganguran sebanyak 12.068 orang;
- d) Belum optimalnya fungsi kelembagaan ketenagakerjaan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Belum optimalnya pemenuhan hak anak;
- b) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c) Masih rendahnya jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan sebesar 0,035%;
- d) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum semua dilaksanakan.

3) Pangan

- a) Masih terdapat beberapa desa rawan pangan terutama rawan pangan kronis baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan secara ekonomi maupun karena gizi buruk akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan, menjadikan ketahanan pangan sangat rentan;
- b) Dari sisi konsumsi pangan, tidak mudah mengubah pemahaman dan pola konsumsi pangan masyarakat menuju ke arah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras, belum terlihat respon masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan pangan alternatif. Sehingga perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam pembinaan untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat.
- c) Masih adanya perilaku produsen pangan segar dan olahan belum menjamin mutu dan keamanan pangan (food savety). Masih ditemui residu pestisida pada pangan segar dan bahan tambahan pangan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pangan olahan.

4) Pertanahan

Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan insfrastruktur masih ada potensi konflik lahan, meskipun layanan sertifikat sudah 100% di tahun 2021, namun perkembangan pembangunan tetap akan membutuhkan pembebasan tanah yang rawan konflik.

5) Lingkungan Hidup

- a) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
- b) Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu status tercemar ringan 80,95% dengan koefisien 50, tercemar sedang 7,14% dengan koefisien 30 dan tercemar berat 0% dengan koefisien 10, serta Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang mengalami penurunan menjadi 31,84 pada tahun 2022;
- c) Emisi gas SO^2 dan NO^2 yang merupakan parameter pecemar udara dari sektor industri dan transportasi, berdampak pada penurunan IKU yang belum optimal dari 89,44 pada tahun 2021 pada tahun 2022 menjadi 87,26;
- d) Belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun sudah mengalami penurunan 19% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 emisi GRK yang dilepaskan di Kabupaten Sukoharjo tercatat masih cukup tinggi yaitu 1.963,95 Gg CO^2 eq;
- e) Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumbernya dan Kapasitas TPA perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan kapasitas TPA Mojorejo yang hampir penuh, sudah terpakai 99,54%;
- f) Pencapaian IKLH Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebesar 61,47 berarti turun 0,04 % apabila dibandingkan dengan capaian IKLH tahun 2021;

6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Belum semua kabupaten/kota mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian; dan Data kependudukan belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a) Belum optimalnya Kapasitas dan ketrampilan aparatur pemerintahan desa dan kader /kelembagaan masyarakat;
- b) Belum Optimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa dan aplikasi profil desa oleh perangkat Desa;
- c) BUMDes yang ada masih didominasi dengan klasifikasi tumbuh sehingga masih perlu pendampingan guna meningkatkan kondisi BUMDes menjadi lebih mandiri dan maju;
- d) Belum adanya regulasi dan penetapan dana pendampingan bantuan keuangan dari pusat dan provinsi;
- e) Kurang optimalnya perangkat desa dalam menangani bantuan Dana Desa baik pengajuan sampai pencairan bantuan;
- f) Masih banyaknya kelompok penerima bantuan TTG yang belum berbadan hukum sesuai syarat utama untuk proposal pengajuan bantuan TTG pada kelompok TTG;
- g) Masih adanya Pasar Desa yang kurang berkembang;
- h) Masih adanya desa yang belum mendirikan Bumdes, dan masih adanya bumdes yang kurang berkembang;
- i) Belum optimalnya koordinasi antar bidang baik pada tahap perencanaan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi program kegiatan sehingga pencapaian sasaran belum tercapai secara maksimal.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Stigma dan Norma Sosial yang Negatif:

Stigma dan norma sosial yang negatif terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat menjadi penghalang dalam menerima dan menggunakan layanan yang tersedia. Beberapa masyarakat masih menganggap topik ini sebagai tabu atau bertentangan dengan

nilai-nilai budaya atau agama mereka. Hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap program-program tersebut dan menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diperlukan.

b) Kurang Optimalnya Layanan yang Kurang Memadai:

Layanan yang kurang memadai, termasuk kurangnya fasilitas kesehatan yang berkualitas dan tenaga medis yang terlatih, dapat menjadi permasalahan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Layanan yang tidak ramah, tidak terjangkau, atau tidak menghormati kebutuhan dan preferensi individu dapat mengurangi minat dan partisipasi masyarakat.

c) Perubahan Demografi dan Urbanisasi:

Perubahan demografi dan urbanisasi dapat menjadi permasalahan tersendiri dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Peningkatan urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat menyebabkan sulitnya mencapai target populasi yang lebih luas. Sementara itu, perubahan dalam struktur demografi seperti peningkatan usia harapan hidup atau perubahan tren kelahiran juga dapat mempengaruhi strategi dan kebijakan yang diperlukan dalam pengendalian penduduk.

9) Perhubungan

- a) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan, ditandai dengan fasilitas keselamatan jalan yang tersedia belum memenuhi jumlah kebutuhan;
- b) Belum optimalnya rasio konektivitas kabupaten, ditenggarai dari Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017 sampai dengan 2022 cenderung mengalami penurunan, dari 37.927 (2017) menjadi 27.522 (2022).

- c) Belum optimalnya kinerja lalu lintas, salah satu bukti pendukungnya adalah rasio trayek dengan jumlah penduduk baru 0,00002;
- d) Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji berkala;
- e) Belum optimalnya pengelolaan perparkiran, dengan bukti capaian pendapatan dari pengelolaan parkir masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan.

10) Komunikasi dan Informatika

- a) Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandai dengan capaian nilai indeks SPBE Tahun 2022 dengan nilai 3,42 dari indeks maksimal yaitu 5,00.
- b) Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan nilai indeks keterbukaan informasi publik yang masih dalam kriteria menuju informative agar mencapai informatif.

11) Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- a) Belum optimalnya koperasi yang berkualitas, ditandai dengan koperasi baru 81,10%;
- b) Perlunya penguatan pendampingan kelembagaan koperasi;
- c) Volume usaha UMKM menurun dari tahun sebelumnya sehingga perlu upaya untuk memulihkan volume usaha Pasca Pandemi.

12) Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu: Pertumbuhan dan persebaran investasi dan ketersediaan kawasan industri belum merata.

13) Kepemudaan Dan Olah Raga

- a) Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
- b) Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan internasional;
- c) Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
- d) Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

14) Statistik

Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral yang ada di daerah untuk kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan kebijakan

15) Persandian

Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi ditandai dengan belum dilaksanakannya *assessment* indeks keamanan informasi.

16) Kebudayaan

Nilai-nilai budaya merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

17) Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah fungsional pustakawan, dan tenaga pengelola perpustakaan.

18) Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan karsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan karsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan karsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah, ketersediaan SDM pengelola karsipan yang tidak sebanding dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestariakan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan Dan Perikanan

- a) Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan.
- b) Sektor kelautan dan perikanan ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein

hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

- c) Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.

2) Pariwisata

- a) Belum optimalnya konsep *eco socio tourism*;
- b) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
- c) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor Pariwisata (lembaga);
- d) Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
- e) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

3) Pertanian

- a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian;
- b) Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sector pertanian;
- c) Produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan pada tahun pada tahun 2021 sejumlah 3.853,80 ton ditahun 2022 sejumlah 3.085,95 ton.
- d) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
- e) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani.

4) Perdagangan

- a) Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan info pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;

- b) Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan kedepan (isu milenial), dimana model distribusi pasar berubah kedepannya.

5) Perindustrian

- a) Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
- b) Belum optimalnya inovasi teknologi industri;
- c) Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan, dan lainnya);
- d) Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya;
- e) Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industry makanan, tekstil dan logam.

6) Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia:

Pemerintah Sekretariat Daerah mungkin menghadapi permasalahan terkait keterbatasan sumber daya manusia. Bisa jadi terdapat kekurangan pegawai yang berkualifikasi dan berpengalaman di bidang administrasi, keuangan, dan manajemen. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan juga dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas.

b) Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:

Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam Pemerintah Sekretariat Daerah juga dapat menjadi permasalahan. Bisa jadi terdapat hambatan dalam berbagi informasi, kerjasama antarunit kerja, atau koordinasi kegiatan yang saling terkait. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih pekerjaan, ketidakjelasan tanggung jawab, dan menghambat efektivitas kerja.

2) Sekretariat DPRD

a) Teknologi dan Sistem Informasi yang Terbatas:

Keterbatasan teknologi dan sistem informasi juga dapat menjadi permasalahan bagi pendukung Sekretariat DPRD. Penggunaan teknologi yang terbatas, kurangnya integrasi sistem informasi, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang ketinggalan zaman dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja. Kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi modern juga dapat membatasi pengelolaan data dan akses informasi yang cepat dan akurat.

- b) Kurangnya Pembaruan Kebijakan dan Prosedur Kerja:
- Pendukung Sekretariat DPRD mungkin dihadapkan pada permasalahan dalam pembaruan kebijakan dan prosedur kerja yang sesuai dengan perkembangan terkini. Ketidakmampuan dalam mengadopsi perubahan dalam regulasi, kebijakan, atau praktik terbaik dapat menghambat kelancaran tugas administratif dan manajerial. Kurangnya pembaruan kebijakan juga dapat mempengaruhi responsifitas terhadap tuntutan dan isu-isu baru yang muncul dalam proses legislasi dan pengawasan.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- a) Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
- b) Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
- c) Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai *feed back* dalam proses pembangunan daerah.

2) Keuangan

- a) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
- b) Belum semua aset daerah dapat termanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

3) Kepegawaian

- a) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
- b) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

4) Pendidikan dan Pelatihan

- a) Belum optimalnya pemenuhan usulan diklat Perangkat Daerah
- b) Kurangnya Keterlibatan dan Keterkaitan dengan Instansi Pemerintah Lainnya:

Keterlibatan dan keterkaitan yang kurang dengan instansi pemerintah lainnya dapat menghambat sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kerjasama yang minim antara BKPSDM dengan instansi terkait, seperti lembaga pendidikan, instansi pemerintah pusat, dan sektor swasta, dapat menghambat pertukaran pengetahuan, pengembangan program yang holistik, dan kebijakan yang terintegrasi dalam pendidikan dan pelatihan.

5) Penelitian dan Pengembangan

- a) Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
- b) Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukungdaya saing daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

g) Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Belum meratanya pencapaian komponen angka IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang sudah ditetapkan dalam pelayanan publik merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain SDM yang terbatas dan belum mengikuti kemajuan teknologi serta sarana prasarana yang kurang memadai sehingga mengurangi kenyamanan dan kecepatan pelayanan.

h. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

2. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di atas didapat beberapa permasalahan utama dalam pembangunan yaitu:

- a. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
- b. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur yang berdampak pada kesenjangan pendapatan dan kesenjangan wilayah;

- c. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
- d. Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;
- e. Masih cukup tingginya angka kemiskinan;
- f. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Isu Strategis Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

a. **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;**

Perekonomian Kabupaten Sukoharjo sampai dengan triwulan III tahun 2022 mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan analisa, ekonomi Kabupaten Sukoharjo sampai dengan triwulan III 2022 diperkirakan tumbuh positif sebesar 5,36 %. Namun demikian tantangan ke depan masih diprediksikan akan berat. Situasi global yang sekarang sedang terjadi seperti perang Rusia dan Ukraina serta krisis pangan di Eropa berdampak pada negara negara lain, termasuk negara Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya pada politik tetapi juga pada perekonomian. Perbaikan ekonomi diperkirakan tidak sekuat proyeksi sebelumnya yang diakibatkan oleh kondisi politik dan inflasi di tingkat global yang memicu kenaikan harga energi dan pangan global. Disisi lain adanya proteksi ekspor beberapa negara produsen pangan, sehingga menuntut produksi dalam negeri untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo. Pada periode Desember 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sukoharjo sebesar 2,47 % menurun 0,85 % poin dibandingkan periode Desember 2021 yang sebesar 3,32 %.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari dukungan infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Disisi lain, pembangunan infrastruktur juga diperlukan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu variabel penentu dari pembangunan ekonomi yang inklusif.

b. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing;

Kabupaten Sukoharjo dihadapkan pada isu strategis yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Membangun SDM yang unggul menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas individu, memajukan sektor industri, serta menjawab tuntutan pasar kerja yang semakin dinamis dan global.

Permasalahan dalam isu strategis Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Sukoharjo mencakup ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan tuntutan pasar kerja, terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan terutama di wilayah pedalaman, kurangnya kesadaran akan pentingnya pembentukan karakter dan etika kerja, kesehatan dan kesejahteraan yang rendah mempengaruhi produktivitas, keterbatasan kolaborasi antara pendidikan dan industri, keterbatasan kesempatan kewirausahaan, akses terbatas terhadap teknologi digital, serta tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan mengatasi

permasalahan-permasalahan ini, Kabupaten Sukoharjo dapat membangun SDM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi.

Keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tahun 2022 IPM Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan menjadi 77,94 dibandingkan tahun 2021 sebesar 77,73. Permasalahan yang berpotensi berpengaruh meskipun tidak secara langsung terhadap komponen pendidikan diantaranya belum optimalnya pemanfaatan bahan-bahan literasi berbasis teknologi informasi, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya dan kearifan lokal di era disrupsi.

c. **Kemiskinan;**

Pada Tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan yaitu dari 8,23 % pada Tahun 2021 menjadi 7,61 % pada Tahun 2022. Secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 5.120 orang yaitu dari 73.840 orang menjadi 68.720 orang. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo masih bermuara pada hal mendasar antara lain menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan antara lain terutama terkait data dan ketepatan sasaran intervensi. Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024.

d. Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Dampak positif dari pembangunan infrastruktur antara lain adalah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah tersebut. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk/masyarakat suatu kota atau wilayah, sehingga semakin bertambahnya penduduk pada kota/wilayah tersebut maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur juga akan meningkat. Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Suatu infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, selain mempunyai dampak positif, ternyata pembangunan infrastruktur juga mempunyai dampak negatif. Pembangunan infrastruktur juga berdampak negatif bagi kelestarian alam, diantaranya dengan berkurangnya sumberdaya alam akibat eksplorasi berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan alam. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu pernyataan bahwa pembangunan infrastruktur selalu identik dengan perusakan alam. Oleh karena itu perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan, sehingga integrasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan terkait.

e. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah.

Beberapa hal terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sukoharjo yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan belum optimalnya penerapan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, belum optimalnya struktur organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, belum optimalnya penerapan penjabaran kinerja organisasi sampai di level individu, belum optimalnya sistem integritas internal instansi, dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberhasilan pembangunan daerah dibidang tata kelola pemerintahan salah satunya diukur dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dimana capaian Kabupaten Sukoharjo sebesar 55,24 dengan Kategori CC. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kemandirian fiskal daerah yang tren dalam beberapa tahun terakhir semakin menurun. Kemandirian fiskal daerah ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang-ruang fiskal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kondisi ini di tahun 2020-2021 semakin terlihat menurun dengan signifikan akibat terdampak pandemi Covid-19. Selanjutnya berkaitan dengan penciptaan kondusivitas wilayah juga harus terus tetap dijaga. Beberapa kejadian mengindikasikan munculnya paham ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di Kabupaten Sukoharjo, yang bahkan terjadi di satuan pendidikan. Permasalahan ini penting untuk dicegah antara lain dengan antisipasi tumbuhnya paham ekstremisme yang menjurus pada kekerasan dan berdampak pada tindakan radikalisme dan terorisme, serta penguatan rasa kebangsaan sejak dini.‘

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun kedua selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis regional serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu: **"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur"**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi;
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 direpresentasikan melalui tema RKPD tahun 2023, yaitu: **"Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah"**

Memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, maka Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 diarahkan pada **"Peningkatan**

Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”.

Fokus RKPD kabupaten Sukoharjo 2023 dari masing-masing prioritas dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat, penanganan *stunting* dengan target sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan, didukung penguatan sistem kesehatan daerah, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, keterjangkauan pembiayaan kesehatan dan peningkatan akses layanan dasar;
- b. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan, peningkatan pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan budaya literasi dan internalisasi nilai-nilai luhur bangsa;

- c. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka;
- e. Pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan peningkatan intensitas penyelenggaraan *event* olahraga dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;
- f. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah;

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dan sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Pemuda. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum
- 3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 6) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 7) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 8) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 9) Program Perlindungan Perempuan
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- 12) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 13) Program Perlindungan Khusus Anak
- 14) Program Pengendalian Penduduk
- 15) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 16) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 17) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 18) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 19) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 20) Program Pengembangan Kebudayaan
- 21) Program Pembinaan Sejarah
- 22) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 23) Program Pembinaan Perpustakaan
- 24) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan Indeks Pertanaman Padi 400 (IP Padi 400);
- b. Pemberdayaan petani melalui model *Corporate Farming*;
- c. Penguatan kewirausahaan dan peningkatan produksi industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
- d. Pengembangan destinasi wisata;
- e. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah;
- f. Pemberian fasilitasi kemudahan berinvestasi;

- g. Peningkatan sarana dan prasana jalan dalam mendukung performa wilayah dan kemudahan berusaha;
- h. Pembangunan, revitalisasi embung dan jaringan irigasi air tanah dalam sebagai sumber air irigasi pertanian;
- i. Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;
- j. Memberikan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), bibit, pupuk dan pestisida;
- k. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan;
- l. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;
- m. Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- n. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Per Kapita. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial

- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- 6) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 7) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 8) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 9) Program Penataan Desa
- 10) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- 11) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 12) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- 13) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 14) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- 15) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- 16) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- 17) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- 18) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
- 19) Program Pengembangan Ummkm
- 20) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 21) Program Promosi Penanaman Modal
- 22) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 23) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 24) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 25) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 26) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 27) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- 28) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 29) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 30) Program Pemasaran Pariwisata

- 31) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 32) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 33) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 34) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 35) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 36) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 37) Program Penyuluhan Pertanian
- 38) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- 39) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 40) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 41) Program Pengembangan Ekspor
- 42) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- 43) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 44) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- 45) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- 46) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 47) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 48) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 3. Peningkatan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral serta peningkatan kapasitas fiskal daerah,** dengan fokus pada:
- a. Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampaknya terutama pasca pandemi Covid-19;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*direct services*) dengan memanfaatkan teknologi informasi guna

mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan inovatif;

- c. Peningkatan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah;
- e. Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memedomani Dokumen *Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)*;
- f. Percepatan implementasi pilar-pilar utama yang menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan kota cerdas (*smart city*);
- g. Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal keuangan daerah terutama pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dengan tetap mendorong pemulihan sumber-sumber PAD utama.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 5) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 6) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 7) Program Pengelolaan Arsip
- 8) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
- 9) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- 10) Program Perekonomian Dan Pembangunan
- 11) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- 12) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 13) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 14) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 15) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 16) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 17) Program Kepegawaian Daerah
- 18) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 19) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 20) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 21) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- 22) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 23) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 24) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- 25) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 26) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 27) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 28) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4. Pengurangan Kemiskinan, dengan fokus pada:

- a. Penyediaan akses pelayanan dasar untuk penduduk miskin, melalui layanan akses rumah layak huni, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan, dan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat;

- b. Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- d. Penguatan dan Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, melalui: pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian bantuan sarana produksi bagi UMKM dan pelatihan *e-commerce* bagi UMKM serta penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran;
- e. Penanganan kemiskinan pada 36 Desa/Kelurahan Prioritas melalui program/kegiatan yang dilakukan secara konvergen.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Angka Kemiskinan. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c) Program Kawasan Permukiman
- d) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- e) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- f) Program Perencanaan Tenaga Kerja

- g) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- h) Program Penempatan Tenaga Kerja
- i) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- j) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- k) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- l) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- m) Program Pencatatan Sipil
- n) Program Pengendalian Penduduk
- o) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
- p) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
- q) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- r) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- s) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- t) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
- u) Program Pengembangan Umkm
- v) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- w) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- x) Program Pemberdayaan Sosial
- y) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- z) Program Rehabilitasi Sosial
- aa) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- bb) Program Penanganan Bencana
- cc) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- dd) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ee) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

5. Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana, dengan fokus pada:

- a. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan penataan infrastruktur antar wilayah dan daerah perbatasan (jalan, jembatan, drainase, irigasi) serta penataan wajah kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang yang sudah ada;
- b. Peningkatan kompetensi jasa konstruksi;
- c. Peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak dan aman untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- d. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi;
- f. Penunrasan Infrastruktur TIK, Pemanfaatan Infrastruktur TIK dan fasilitas pendukung transformasi digital;
- g. Meningkatkan perlindungan dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran air, tanah dan udara serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan;
- h. Penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Prioritas ini

juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana (IRB). Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 5) Program Pengembangan Permukiman
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung
- 7) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 8) Program Penyelenggaraan Jalan
- 9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 11) Program Pengembangan Perumahan
- 12) Program Kawasan Permukiman
- 13) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 14) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- 15) Program Penanggulangan Bencana
- 16) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 17) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 18) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 19) Program Penatagunaan Tanah
- 20) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 21) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 22) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 23) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 24) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 25) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 26) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 27) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 28) Program Pengelolaan Persampahan
- 29) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 30) Program Pengelolaan Pelayaran
- 31) Program Pengelolaan Perkeretaapian
- 32) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 33) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

6. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila,
dengan fokus pada:

- a. Peningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama;
- c. Peningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 7) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 8) Program Perlindungan Perempuan
- 9) Program Perlindungan Khusus Anak

7. Kerjasama regional, Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat, dengan fokus pada:

- a. Perluasan kerjasama antar regional daerah dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi dan percepatan pencapaian target SPM;

- b. Perluasan kerjasama dengan dunia usaha melalui pengembangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSLP (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan;
- c. Peningkatan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah.

Kekuatan pengembangan potensi daerah dan kegiatan pembangunan perlu didukung oleh semua unsur. Kegiatan pembangunan tak bisa dilakukan satu unsur saja. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama. Maka konsep *pentahelix* atau multipihak dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi daerah. Prioritas ini dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan mendorong pendanaan alternatif Non APBD.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian seluruh tujuan pembangunan daerah yaitu 1) Terwujudnya tata kepemerintahan yang professional, 2) Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter, 3) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif, 4) Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan 5) Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pendapatan Perkapita, Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Resiko Bencana (IRB) dan Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3) Program Pengembangan Perumahan
- 4) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penanggulangan Bencana
- 6) Program Pengelolaan Persampahan
- 7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 8) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- 9) Program Perekonomian Dan Pembangunan
- 10) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 11) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 12) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 13) Program Pengembangan UMKM
- 14) Program Promosi Penanaman Modal
- 15) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum beserta indikator dan targetnya.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan dengan capaian target 95,03 persen.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan dengan capaian target 100 persen.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan capaian target 68,78 persen.

d. Kesehatan

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase puskesmas dengan peningkatan penyakit menular dengan capaian target 100 persen, Persentase puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dengan capaian target 100 persen, Persentase puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans dengan capaian target 100 persen, Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi dengan capaian target 28 persen, Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/RS Terakreditasi dengan capaian target 60 persen, Persentase Fasyankes lainnya terakreditasi dengan capaian target 60 persen, Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN dengan capaian target 50 persen, Persentase capaian UHC dengan capaian target 90 persen, Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu dengan capaian target 100 persen, Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi dengan capaian target 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita dengan capaian target 100 persen, Persentase puskesmas dengan peningkatan perbaikan gizi masyarakat dengan capaian target 100 persen,

Persentase puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar dengan capaian target 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reproduksi dengan capaian target 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia dengan capaian target 100 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan lingkungan dengan capaian target 78 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan kerja dengan capaian target 67 persen, Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan olahraga dengan capaian target 100 persen, Persentase kepuasan pelanggan rumah sakit dengan capaian target 84 persen, NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar dengan capaian target 40 persen, Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna dengan capaian target 100 persen.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan) dengan capaian target 100 persen dan Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD) dengan capaian target 100 persen.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan dengan capaian target 81 persen.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten serta pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Desa siaga aktif mandiri dengan capaian target 47 persen.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan dengan capaian target 70,53 persen.

2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD dengan capaian target 2,27 persen.

3) Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio bangunan ber PBG dan SLF dengan capaian target 27 persen.

4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan capaian target 7,06 persen.

5) Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu capaian peningkatan infrastruktur jalan poros desa dalam kondisi mantap dengan capaian target 30,94 persen.

6) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi dengan capaian target 60 persen.

7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Daerah irigasi dalam kondisi baik dengan capaian target 50 persen.

8) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja program ini adalah Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dengan capaian target 88,25 persen.

9) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga yang dilayani sistem pengelolaan persampahan persampahan di setiap desa/ kelurahan dengan capaian target 5 persen.

10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah prov/kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dengan capaian target 100 persen.

11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang dengan capaian target 55 persen.

d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni dengan capaian target 100 persen, Persentase pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog) dengan capaian target 20 persen.

2) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase pemenuhan rumah yang layak dengan capaian target 100 persen.

3) Program Kawasan Permukiman

Dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Luas permukiman kumuh yang sudah tertangani dengan capaian target 32 hektar.

4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penanganan PSU perumahan dengan capaian target 100 persen.

5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase penerbitan sertifikat pengembang perumahan dengan capaian target 100 persen.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penegakan Perda dan Perkada dengan capaian target 97,4 persen, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan dengan capaian target 98,3 persen, Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan capaian target 100 persen, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dengan capaian target 95,4 persen.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dengan capaian target 95,4 persen.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase capaian penanggulangan bencana dengan capaian target 100 persen. Kegiatan untuk memitigasi bencana dilakukan dengan Pengurangan Resiko Bencana untuk bencana banjir dan tanah longsor.

f. Sosial

1) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial dengan capaian target 4,63 persen.

2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan dengan capaian target 100 persen.

3) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan dengan capaian target 1 persen.

4) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan capaian target 60,67 persen.

5) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase pemenuhan penanganan bencana dengan capaian target 73,91 persen.

6) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase penanganan rehabilitasi sosial dengan capaian target 16,99 persen.

2. Urusan Wajib Pemerintahan Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja mikro dan makro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Akurasi proyeksi indikator dalam RTK dengan capaian target 90 persen.

2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan capaian target 0,39 persen.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten, pengelolaan informasi pasar kerja dan pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota dengan capaian target 83 persen.

4) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan capaian target 46,82 persen.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga yang Responsif Gender dengan capaian target 35 persen.

2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia dengan capaian target 70 persen.

3) Program Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti dengan capaian target 100 persen.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi dengan capaian target 0,16 persen.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Skor Kabupaten Layak Anak dengan capaian target 700 nilai.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti dengan capaian target 100 persen

c. Pangan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa/kelurahan yang mengelola lumbung pangan dengan capaian target 11,12 persen.

2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan energi (kalori) dengan capaian target

123,17 persen, koefisien variasi harga pangan strategis telur dengan capaian target 6,5 persen, koefisien variasi harga pangan strategis bawang merah dengan capaian target 21,5 persen, koefisien variasi harga pangan strategis cabe dengan capaian target 47,1 persen.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa/kelurahan rawan pangan yang ditangani dengan capaian target 50 persen.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jenis pangan yang dilakukan pengawasan dengan capaian target 37,5 persen.

d. Pertanahan

1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan sengketa tanah garapan dengan capaian target 34 persen.

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah dengan capaian target 53 persen.

3) Program Penatagunaan Tanah

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan perencanaan penatagunaan tanah dengan capaian target 48 persen.

e. Lingkungan Hidup

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten dan penyelenggaraan KLHS kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan capaian target 57 persen.

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator yaitu Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan dengan capaian target 60 persen, persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan capaian target 28 persen.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator yaitu Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH) dengan capaian target 2161,48 persen.

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu persentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten dengan capaian target 60 persen.

5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketataan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten dengan capaian target 60 persen.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan dengan capaian target 43 persen.

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penghargaan lingkungan hidup dengan capaian target 40 persen.

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan capaian target 100 persen.

9) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penanganan sampah dengan capaian target 72 persen, persentase pengurangan sampah dengan capaian target 27 persen.

f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk indicator kinerja yaitu Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan dengan capaian target 100 persen.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil dengan capaian target 100 persen.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Program ini dilaksanakan mencapai indicator kinerja yaitu Persentase validitas data kependudukan dengan capaian target 100 persen, Cakupan lembaga pengguna yang kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan capaian target 100 persen.

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini dilaksanakan mencapai indicator kinerja yaitu Persentase pengelolaan profil kependudukan dengan capaian target 100 persen.

g. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1) Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong penyelenggaraan penataan desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa dengan capaian target 100 persen.

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase desa yang melaksanakan kerjasama desa dengan capaian target 6,67 persen.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase desa yang penyelenggaraan administrasinya tertib dengan capaian target 46,67 persen.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan/dibina dengan capaian target 50 persen.

h. Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK dengan capaian target 30 persen.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Peserta KB Aktif dengan capaian target 69,4 persen.

3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan kelompok kegiatan yang aktif dengan capaian target 76 persen, yang dapat dilihat dari cakupan anggota aktif kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS, serta mendukung meningkatnya kualitas pelayanan PIK R di masing-masing kecamatan.

i. Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kendaraan bermotor wajib uji dengan capaian target 70,9 persen, Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum dengan capaian target 10,27 persen.

2) Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kinerja layanan penyeberangan sungai dengan capaian target 100 persen.

3) Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kinerja layanan perkeretaapian dengan capaian target 100 persen.

4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan capaian target 83 persen.

j. Komunikasi Dan Informatika

1) Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Badan Publik Terbuka dengan capaian target 45 persen.

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten, dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu dan persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah dengan capaian target 68 persen, Persentase pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik dengan capaian target 85 persen.

k. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Permohonan ijin pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP dengan capaian target 100 persen.

2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Koperasi aktif dengan capaian target 83 persen.

3) Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian target 70 persen.

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya dengan capaian target 18 persen.

5) Program Pengembangan UMKM

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM dengan capaian target 27 persen.

6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Pogram ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM dengan capaian target 27 persen, Persentase kemitraan dengan capaian target 7,03 persen. didalamnya ada aktifitas/pekerjaan pelatihan E-commerce bagi UMKM” dan Narasi “Pemberian bantuan Sarana produksi bagi UMKM

7) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi dengan capaian target 4,5 persen.

I. Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi dengan capaian target 100 persen, Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo dengan capaian target 100 persen.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo dengan capaian target 100 persen.

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal dengan capaian target 100 persen.

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi dengan capaian target 100 persen, Persentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal dengan capaian target 100 persen, Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal dengan capaian target 100 persen.

5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capaian target 100 persen.

m. Kepemudaan Dan Olah Raga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dengan capaian target 54,17 persen dan Persentase wirausaha muda dengan capaian target 11,51 persen.

2) Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan Olahraga dengan capaian target 65 persen, Cakupan Pelatih yg bersertifikasi dengan capaian target 21 persen, Cakupan pembinaan atlet muda dengan capaian target 34,16 persen, dan Persentase atlet berprestasi dengan capaian target 64,34 persen.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pramuka berprestasi dengan capaian target 14 persen.

n. Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dimana Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral dengan capaian target 78 persen.

o. Persandian

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dimana Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Keamanan Informasi dengan capaian target 63 persen.

p. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten, dan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang dengan capaian target 30 persen.

2) Program Pembinaan Sejarah

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan dengan capaian target 20 persen.

3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan dengan capaian target 5 persen.

q. Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten, dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca dengan capaian target 49 persen.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan capaian target 21 persen.

r. Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten, dan pengelolaan simpul jaringan informasi karsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan dengan capaian target 23,1 persen.

2) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian target 18,8 persen.

4. Urusan Pilihan

a. Kelautan Dan Perikanan

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi perikanan Tangkap dengan capaian target 408,25 ton.

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi Perikanan Budidaya dengan capaian target 14751,11 ton.

3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB dengan capaian target 45 rumah tangga perikanan.

4) Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP) dengan capaian target 50 persen.

b. Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Daya Tarik/Destinasi Wisata yang ditingkatkan dengan capaian target 30 persen.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase event pariwisata yang diadakan dengan capaian target 13 persen.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan dengan capaian target 25 persen.

c. Pertanian

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten, dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dengan capaian target 96 persen, Persentase penggunaan benih padi bersertifikat dengan capaian target 92,7 persen, Persentase kelompok menggunakan alsintan dengan capaian target 75 persen.

2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani dengan capaian target 75 persen, Jumlah Luas Tanam (Ha) dengan capaian target 49815 hektar, dan Persentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi dengan capaian target 45,5 persen.

3) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase gagal panen dengan capaian target 3 persen.

4) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kenaikan nilai klas kelompok dengan capaian target 2,5 persen.

5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten, dan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan

Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan capaian target 33,5 persen, dan Jumlah Populasi ternak (animal unit) dengan capaian target 20441,17 unit.

6) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berjalan dengan capaian target 80 persen.

7) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengendalian penyakit Zoonosis dengan capaian target 0,1 persen.

d. Perdagangan

1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pasar Rakyat yang baik dengan capaian target 88,4 persen.

2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk kegiatan yang meliputi pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengendalian Harga dengan capaian target 100 persen dan Persentase Kios Pupuk Lengkap (KPL) dengan capaian target 6,5 persen.

3) Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Ekspor dengan capaian target 0,35 persen.

4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan untuk kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pasar Tertib Ukur dengan capaian target 30,7 persen.

5) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran dengan capaian target 10 persen.

6) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan dengan capaian target 100 persen.

e. Perindustrian

1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terselesaikannya dokumen RPIPK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda dengan capaian target 17 persen.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten

Program ini diarahkan untuk kegiatan penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan dengan capaian target 90 persen.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan capaian target 8 persen.

f. Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan untuk kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Terpenuhinya Alokasi Pemberangkatan Transmigrasi dengan capaian target 100 persen.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan capaian target 100 persen, Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum dengan capaian target 96 persen, Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah dengan capaian target 100 persen.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan dengan capaian target 100 persen; Cakupan pengadaan barang dan jasa dengan capaian target 40 persen; Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA dengan capaian target 100 persen.

b. Sekretariat DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan capaian target 90 persen, Persentase pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bagian anggaran dan pengawasan dengan capaian target 100 persen.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Perencanaan

1) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan ketercapaian target tahunan terhadap sasaran RPJMD melalui penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan capaian target 88 persen, Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian target 88 persen, Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan capaian target 88 persen.

2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dengan capaian target 100 persen.

b. Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kepatuhan OPD dalam menyusun RAPBD dengan capaian target 100 persen, Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan capaian target 100 persen, Persentase ketepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan capaian target 100 persen. Dalam upaya pencapaian target target indikator program pengelolaan keuangan daerah terdapat aktifitas/pekerjaan dalam Pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah dengan capaian target 100 persen.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan guna mewujudkan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan target APD dengan capaian target 4 persen.

c. Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah

Program ini diorientasikan untuk kegiatan peningkatan kapasitas ASN, pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian dengan capaian target 100 persen, Persentase pemenuhan formasi usulan ASN dengan capaian target 98 persen, Persentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan dengan capaian target 65 persen, dan Persentase penanganan kasus kepegawaian dengan capaian target 85 persen.

d. Pendidikan Dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diorientasikan untuk kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana dengan capaian target 92 persen.

e. Penelitian Dan Pengembangan

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan guna mendukung pengembangan daerah dengan penerapannya diarahkan pada kegiatan pengelolaan data

kelitbangan, pengembangan inovasi serta perekayasaan di bidang teknologi. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dengan capaian target 100 persen.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase cakupan jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP dengan capaian target 89 persen.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase cakupan pendampingan dan asistensi di bidang Pengawasan dengan capaian target 100 persen.

7. Unsur Kewilayahannya

Kecamatan

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan capaian target 100 persen.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian target 100 persen.

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian target 100 persen.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan capaian target 100 persen.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian target 100 persen.

8. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan karakter bangsa dengan capaian target 92 persen.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase pemahaman politik bagi masyarakat dengan capaian target 78 persen.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas dengan capaian target 78 persen.

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penanganan kejadian terkait konflik social dengan capaian target 82 persen.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat yang paham terhadap social, budaya, dan agama dengan capaian target 78 persen.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	13	55	265	70,353,545,145	70,353,545,145
2	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	24	56	271	53,605,990,240	53,605,990,240
3	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	11	45	279	23,737,861,704	23,737,861,704
4	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	10	27	93	2,594,558,000	2,594,558,000
5	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	1	6	25	35,000,000	35,000,000
6	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	2	6	21	256,490,000	256,490,000
7	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	2	9	29	90,000,000	90,000,000
8	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	14	43	411	26,203,051,371	26,203,051,371
9	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	34	72	249	70,987,768,937	71,267,768,937
10	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1	1	0	0		

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	4	12	32	146,562,000	146,562,000
12	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1	1	3	8	26,669,600	26,669,600
13	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2	2	7	25	857,000,000	857,000,000
14	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	1	15	33	1,734,130,000	1,734,130,000
15	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	2	10	22	202,217,800	202,217,800
16	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	1	8	17	203,730,000	203,730,000
17	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	2	4	9,975,000	9,975,000
18	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	1	0	0		

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1	2	12	40	198,585,600	198,585,600
20	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13	1	23	61	1,829,362,400	1,549,362,400
21	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	13	32	116,547,000	116,547,000
22	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	15	44	4,791,466,800	4,791,466,800
23	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	11	26	1,225,320,000	1,225,320,000
24	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	29	83	5,974,986,600	5,974,986,600
25	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	1	13	61	4,145,000,000	4,145,000,000
26	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	2	22	80	987,289,400	987,289,400

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	39	1,036,625,000	1,036,625,000
28	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	7	69	16,568,813,900	16,568,813,900
29	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1	3	15	76	9,486,537,646	9,486,537,646
30	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1	2	10	40		
31	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1	10	21	90	85,695,533,215	85,695,533,215
32	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	1	12	37	65,000,000	65,000,000
33	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1	2	13	53	522,100,000	522,100,000
34	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	1	12	39	252,450,000	252,450,000
35	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	2	12	46	150,250,000	150,250,000
36	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	2	16	53	411,500,000	411,500,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	7	21	27,950,000	27,950,000
38	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	7	23	100,000,000	100,000,000
39	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	1	22	60	639,000,000	639,000,000
40	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	1	12	42	215,000,000	215,000,000
41	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1	1	8	32	22,950,000	22,950,000
42	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	2	17	66	203,000,000	203,000,000
43	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	22	76	505,000,000	505,000,000
44	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1	1	17	65	3,753,900,000	3,753,900,000
45	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1	5	14	93	1,491,607,000	1,491,607,000
46	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	1	1	0	0		
47	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	9	29	99	7,985,137,000	7,985,137,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	3	15	45	660,850,000	660,850,000
49	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	1	6	17	40,150,000	40,150,000
50	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	7	16	115,100,000	115,100,000
51	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	9	20	52	517,459,000	517,459,000
52	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	4	17	33	196,690,000	196,690,000
53	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	2	12	31	72,964,400	72,964,400
54	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	6	19	52	1,558,822,000	1,558,822,000
55	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	2	8	22	20,000,000	20,000,000
56	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	2	7	21	343,000,000	343,000,000
57	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	2	8	17	29,100,000	29,100,000
58	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	7	16	5,000,000	5,000,000
59	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1	5	12	63	766,692,000	766,692,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1	1	7	30	15,948,000	15,948,000
61	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	6	12	83	480,550,000	480,550,000
62	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1	11	13	74	280,950,000	280,950,000
63	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1	3	7	45	60,000,000	60,000,000
64	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	4	19	70	14,478,815,800	14,478,815,800
65	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	5	7	27	61,305,000	61,305,000
66	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	2	7	20	24,600,000	24,600,000
67	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	3	14	45	46,022,000	46,022,000
68	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1	2	10	37	45,000,000	45,000,000
69	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1	3	26	105	507,093,800	507,093,800
70	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1	1	8	18	10,000,000	10,000,000
71	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1	1	12	29	20,779,064	20,779,064

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1	1	8	17	10,000,000	10,000,000
73	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	7	19	15,000,000	15,000,000
74	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	5	15	74	185,560,000	185,560,000
75	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	7	20	15,000,000	15,000,000
76	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1	3	12	50	85,000,000	85,000,000
77	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1	3	7	24	15,000,000	15,000,000
78	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	7	17	20,000,000	20,000,000
79	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	3	7	23	100,000,000	100,000,000
80	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1	5	24	62	424,299,064	424,299,064
81	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	4	9	44	199,700,000	199,700,000
82	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	7	15	28,500,000	28,500,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3	15	54	313,792,000	313,792,000
84	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	2	10	34	111,050,000	111,050,000
85	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	11	31	106,074,048	106,074,048
86	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	4	12	25	53,500,000	53,500,000
87	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	3	10	17	37,610,000	37,610,000
88	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	3	8	24	39,910,000	39,910,000
89	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	5	15	50,000,000	50,000,000
90	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	2	9	15	28,008,000	28,008,000
91	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	11	26	76,300,000	76,300,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	4	13	34	68,700,000	68,700,000
93	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	2	10	27	90,840,000	90,840,000
94	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	4	13	35	110,560,000	110,560,000
95	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	2	9	21	25,000,000	25,000,000
96	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	5	16	45	490,450,000	490,450,000
97	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	7	16	48	308,984,000	308,984,000
98	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1	4	9	24	180,240,000	180,240,000
99	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	1	1	0	0		
100	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1	3	25	65	1,271,787,000	1,271,787,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1	1	8	27	74,000,000	74,000,000
102	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	14	30	114,720,000	114,720,000
103	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1	5	11	29	71,900,000	71,900,000
104	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	7	30	20,000,000	20,000,000
105	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	12	39	83,286,000	83,286,000
106	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1	1	10	37	100,000,000	100,000,000
107	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1	1	9	31	80,000,000	80,000,000
108	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1	2	10	34	300,000,000	300,000,000
109	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	3	27	191	1,152,548,000	1,152,548,000
110	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	2	11	33	241,550,000	241,550,000
111	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	1	11	31	110,775,000	110,775,000
112	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1	5	42	147	5,148,436,765	5,148,436,765
113	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	1	2	9	30	30,000,000	30,000,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	6	11	15,000,000	15,000,000
115	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	4	9	29	85,000,000	85,000,000
116	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	3	13	41	70,000,000	70,000,000
117	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	10	26	25,000,000	25,000,000
118	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1	2	7	23	47,737,500	47,737,500
119	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1	6	55	161	19,048,843,824	19,048,843,824
120	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1	1	7	19	31,650,000	31,650,000
121	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	5	18	71	1,247,751,416	1,247,751,416
122	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	2	11	30	186,975,000	186,975,000
123	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1	1	6	26	19,641,600	19,641,600
124	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1	3	13	60	336,848,167	336,848,167
125	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	4	6	25	85,150,000	85,150,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	2	4	16	14,670,000	14,670,000
127	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1	3	7	50	98,262,000	92,474,000
128	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	6	23	97	302,646,400	312,646,400
129	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	2	8	28	30,300,000	30,300,000
130	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	1	2	8	38	66,985,000	62,773,000
131	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	1	2	13	46	2,598,470,000	2,598,470,000
132	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1	3	15	46	428,040,000	428,040,000
133	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	15	19	78	3,403,000,000	3,403,000,000
134	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	7	33	165	5,422,857,000	5,422,857,000
135	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	9	9	26	120,000,000	120,000,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	10	32	351,800,000	351,800,000
137	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	8	26	89	1,355,577,000	1,355,577,000
138	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1	2	8	13	1,352,310,000	1,352,310,000
139	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1	9	27	82	4,409,236,000	4,409,236,000
140	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	3	7	12	2,632,000,000	2,632,000,000
141	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	7	23	55	6,099,655,000	6,099,655,000
142	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	3	9	16	75,000,000	75,000,000
143	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	3	25	67	749,229,000	749,229,000
144	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1	4	31	92	34,584,765,154	34,584,765,154
145	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1	2	15	43	330,026,826	330,026,826

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	1	21	52	551,935,498	551,935,498
147	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	4	30	105	2,127,198,210	2,127,198,210
148	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	2	14	40	466,672,000	466,672,000
149	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	1	6	16	50,000,000	50,000,000
150	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1	3	27	68	828,026,000	828,026,000
151	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	11	31	380,747,400	380,747,400
152	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	0	0		
153	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	6	12	33,100,000	33,100,000
154	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	10	33	47,317,200	47,317,200
155	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	7	17		
156	2.15.05.2.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	17	30	842,579,400	842,579,400

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	12	29	71	1,501,440,164	1,501,440,164
158	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	2	14	32	3,924,830,000	3,924,830,000
159	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	12	18	52	2,664,278,210	2,664,278,210
160	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	8	30	57,000,000	57,000,000
161	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	9	27	25,000,000	25,000,000
162	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	2	11	48	115,000,000	115,000,000
163	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	13	57	40,000,000	40,000,000
164	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	9	33	70,000,000	70,000,000
165	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	20	66	300,000,000	300,000,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguanan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1	5	17	69	693,500,000	693,500,000
167	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1	1	10	41	100,000,000	100,000,000
168	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	9	29	30,000,000	30,000,000
169	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	2	8	18	80,000,000	80,000,000
170	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	2	4	11	85,000,000	85,000,000
171	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	4	13	42	365,000,000	365,000,000
172	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	3	14	36	383,400,000	383,400,000
173	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	8	15	50,000,000	50,000,000
174	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1	6	25	60	707,760,000	707,760,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	26	58	690,000,000	690,000,000
176	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	2	27	100	58,706,265,000	58,706,265,000
177	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	3	20	48	872,880,000	872,880,000
178	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1	4	23	63	968,200,000	968,200,000
179	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	2	11	25	4,669,200,000	4,669,200,000
180	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	3	17	34	182,400,000	182,400,000
181	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	5	15	28	685,000,000	685,000,000
182	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	6	9	24	217,252,000	217,252,000
183	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	4	18	37	362,989,000	362,989,000
184	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	10	14	202,188,364	202,188,364
185	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	2	23	46	1,100,000,000	1,100,000,000
186	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	2	26	51	1,726,366,000	1,726,366,000
187	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	2	14	32	13,987,867,600	13,987,867,600

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	2	8	15	110,000,000	110,000,000
189	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1	1	8	13	75,000,000	75,000,000
190	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1	1	10	13	65,000,000	65,000,000
191	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	7	23	102	262,000,000	262,000,000
192	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	3	23	76	248,500,000	248,500,000
193	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1	2	11	21	42,000,000	42,000,000
194	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1	2	12	27	46,000,000	46,000,000
195	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	14	40,000,000	40,000,000
196	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1	2	9	26	161,250,000	161,250,000
197	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1	1	5	8	12,750,000	12,750,000
198	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	1	1	3	8	10,000,000	10,000,000
199	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	11	16	179,235,000	179,235,000
200	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1	4	10	29		

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							50,000,000	50,000,000
201	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	6	12	8,000,000	8,000,000
202	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1	7	36	97	2,684,301,776	2,684,301,776
203	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1	2	6	16	16,000,000	16,000,000
204	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	1	5	9	6,200,000	6,200,000
205	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1	1	17	40	65,200,000	65,200,000
206	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	2	17	27	188,900,000	188,900,000
207	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2	1	7	25	180,000,000	180,000,000
208	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2	2	14	30	835,264,000	835,264,000
209	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	1	12	23	80,000,000	80,000,000
210	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2	4	29	104	734,386,000	734,386,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2	4	24	75	448,700,000	448,700,000
212	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1	2	18	75	885,085,000	885,085,000
213	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	2	10	20	500,000,000	500,000,000
214	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	1	1	7	20	20,000,000	20,000,000
215	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	14	34	308,000,000	308,000,000
216	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1	2	16	35	480,000,000	480,000,000
217	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1	6	34	94	9,140,697,000	9,140,697,000
218	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1	1	21	59	204,000,870	204,000,870
219	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1	2	6	33	21,000,000	21,000,000
220	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	2	26	106	550,617,807	550,617,807
221	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	3	9	17	48,000,000	48,000,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1	4	30	91	929,999,850	929,999,850
223	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1	2	7	26	24,999,000	24,999,000
224	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	1	1	6	25	17,000,000	17,000,000
225	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1	3	34	100	3,816,412,950	3,816,412,950
226	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1	1	5	18	8,550,000	8,550,000
227	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	2	28	187	10,836,754,685	10,836,754,685
228	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1	2	14	79	250,000,000	250,000,000
229	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	2	6	14	20,000,000	20,000,000
230	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1	1	8	24	40,000,000	40,000,000
231	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	2	8	32	50,000,000	50,000,000
232	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	5	16	61	516,930,000	516,930,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1	2	21	65	117,284,074	117,284,074
234	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	2	19	79	917,279,670	917,279,670
235	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	6	16	53	515,533,200	515,533,200
236	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2	10	30	50,000,000	50,000,000
237	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3	17	49	108,520,000	108,520,000
238	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	5	9	5,000,000	5,000,000
239	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	1	1	11	32	100,000,000	100,000,000
240	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1	3	20	75	980,000,000	980,000,000
241	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1	3	36	90	22,040,815,888	22,040,815,888
242	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1	3	28	111	1,331,658,000	1,331,658,000
243	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1	1	9	24	100,000,000	100,000,000
244	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1	3	21	67	1,080,000,000	1,080,000,000
245	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1	3	19	73		

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							731,870,000	731,870,000
246	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	3	13	62	1,147,160,000	1,147,160,000
247	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1	3	15	45	450,000,000	450,000,000
248	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	4	6	40	4,050,528,000	4,050,528,000
249	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1	5	2	5	560,000,000	560,000,000
250	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	7	4	8	194,400,000	194,400,000
251	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1	3	10	30	3,395,400,000	3,395,400,000
252	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1	3	10	24	4,616,250,000	4,616,250,000
253	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1	3	4	55	28,886,071,000	28,886,071,000
254	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	1	0	0		
255	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	6	19	81	740,000,000	740,000,000
256	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2	9	29	135,000,000	135,000,000
257	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	5	21	80,000,000	80,000,000
258	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	2	10	24	55,000,000	55,000,000
259	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	8	16	56	515,768,000	515,768,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1	8	10	51	355,000,000	355,000,000
261	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	1	8	17	59	1,561,000,000	1,561,000,000
262	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1	13	18	111	2,139,448,250	2,139,448,250
263	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	11	14	82	1,366,892,500	1,366,892,500
264	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	13	13	66	1,018,437,500	1,018,437,500
265	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	4	10	10	378,326,782,513	378,326,782,513
266	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	13	49	177	3,949,213,600	3,949,213,600
267	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	13	47	258	9,000,026,000	9,000,026,000
268	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1	6	20	88	1,641,303,900	1,641,303,900
269	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1	3	18	55	1,608,134,100	1,608,134,100
270	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	6	15	89	1,176,394,500	1,176,394,500
271	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1	2	9	63	2,653,581,200	2,653,581,200
272	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1	3	24	125	3,460,907,400	3,460,907,400
273	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	1	1	6	14	120,000,000	120,000,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peraturan						
274	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	2	6	14		
275	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	2	15	40	219,000,000	219,000,000
276	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	7	8	25	1,012,765,000	1,012,765,000
277	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1	2	2	3	59,850,000	59,850,000
278	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1	2	9	19	263,525,000	263,525,000
279	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1	4	9	25	537,820,000	537,820,000
280	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	2	5	17	55,000,000	55,000,000
281	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12	3	8	87	233,125,000	233,125,000
282	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	1	0	0		
283	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	3	11	57	291,650,000	291,650,000
284	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	4	52	166	29,139,348,900	29,139,348,900
285	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12	3	15	153	1,727,100,288	1,727,100,288

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	2	9	35	255,632,000	255,632,000
287	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	1	9	51	243,000,000	243,000,000
288	7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	6	8		
289	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12	3	21	90	4,104,500,000	4,104,500,000
290	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	13	10	97	885,180,000	885,180,000
291	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1	24	80	1,783,370,000	1,783,370,000
292	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1	1	14	37	17,900,650,000	17,900,650,000
293	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	2	12	35	1,471,273,000	1,471,273,000
294	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	3	17	67	935,078,000	935,078,000

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1	3	15	50	3,314,540,000	3,314,540,000
296	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39	7	30	218	2,455,200,808	2,455,200,808
297	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40	8	91	278	824,853,828,443	824,853,828,443
298	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8	7	16	92	289,875,000	289,875,000
299	X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3	7	13	62	80,120,000	80,120,000
300	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40	8	46	294	12,424,505,500	12,424,505,500
301	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39	10	70	1046	25,436,945,436	25,485,745,436
302	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38	8	55	311	27,391,987,362	27,391,987,362
303	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39	4	69	376	28,645,516,180	28,646,716,180
304	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39	8	67	346	23,221,309,411	23,171,309,411
305	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	13	1	6	1	160,978,476,370	160,978,476,370
306	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	2	12	19	990,304,000	990,304,000
307	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1	3	8	59	2,581,655,900	2,581,655,900
308	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	1	5	10	53		

No	Kode	Kegiatan	SKPD	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							972,820,000	972,820,000
309	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	3	35	79	3,572,287,500	3,572,287,500
310	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	3	25	14	26,986,588,000	26,986,588,000
311	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1	2	10	163	3,065,156,500	3,065,156,500

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 298 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Selanjutnya di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar, berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengintegrasikan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan yaitu dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026; Renstra, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan Dokumen Penganggaran. Sedangkan untuk melaksanakan koordinasi dalam penerapan SPM sesuai amanat Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 100/137/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sukoharjo.

Penyusunan Laporan Kinerja Pencapaian SPM dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah sehingga pada akhirnya terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar kabupaten/kota.

Tujuan dari pelaporan Kinerja Pencapaian SPM adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana terwujudnya penerapan SPM di Daerah yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya.

Laporan Pencapaian SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi dalam kebijakan umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam RPMJD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

1. Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan antara lain : a) Pendidikan dasar; b) Pendidikan non formal; dan c) Pendidikan anak usia dini. Dalam menerapkan SPM Bidang Pendidikan, target tahunan pencapaian SPM telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pendidikan dalam penerapan SPM bidang Pendidikan yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan
Spm Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023**

MISI KE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGAM (%)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat	A. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rata – rata Lama Sekolah (Penduduk usia 15 tahun ke atas) 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3. Angka Partisipasi Murni (APM) : SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)	9,36 72,76 99,85 80,87
			B. Program Pengembangan Kurikulum	SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B 5. Angka Kelulusan SD SMP 6. Angka Melanjutkan SD ke SMP SMP ke SMA 7. Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B	108,00 107,08 100 100 103,45 101,57 0.017 0,034
		Meningkatnya Profesionalisme Pendidikan	C. Program Pendidikan dan tenaga Kependidikan	8. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV 9. Rasio Guru dan Siswa SD SMP	96,61 1 : 20 1 : 20

2. Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Spm Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

MISI KE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGAM (%)
Misi 2 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Terwujudnya Sumber daya Manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	77,55
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	100
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	100
				Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	18
				Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	34
				Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	20
				Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	50
				Persentase Capaian UHC	81

MISI KE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN
				Persentase cakupan dengan kesehatan ibu	100
				Persentase cakupan dengan kesehatan bayi	100
				Persentase puskesmas cakupan kesehatan balita	100
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	100
				Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	100
				Persentase Puskesmas dengan cakupan yang kesehatan pada kesehatan reproduksi	100
				Persentase Puskesmas dengan cakupan yang kesehatan pada lansia	100
				Persentase Puskesmas dengan cakupan Kesehatan Lingkungan	47
				Persentase Puskesmas dengan cakupan Kesehatan kerja	33
				Persentase Puskesmas dengan cakupan Kesehatan olah raga	83
				Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	80
				NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	47%

MISI KE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN
Misi Ke 1 Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penerapan prinsip kesehatan berorientasi pada hasil dan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, aksesibel, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100
				Fasilitas Kesehatan terakreditasi Pelayanan Primer	18
				Fasilitas Kesehatan terakreditasi Pelayanan Rujukan	34
				Fasilitas Kesehatan terakreditasi Pelayanan lainnya	20
				Persentase melakukan kesehatan akupunktur, mandiri dan lainnya Puskesmas pelayanan tradisional, asuhan tradisional	-
				Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau potensi Bencana	100
				Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/Kelurahan)	100
				Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	92
				Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	100
				Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	100
				Desa/Kelurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	100

MISI KE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN
				Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	96
				Imunisasi dasar lengkap	96
				Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100
				Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100
				Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100
				Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	100
				Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	100
				Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	100
				Persentase kunjungan Bayi baru lahir	100
				Persentase pelayanan anak balita	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100
				Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk)	7
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	3,03
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	51
				Persentase pustikesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	8,1

MISI KE	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(b)	75,3
				Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	-
				Persentase pelaksanaan penunjnag urusan pemerintah daerah (DKK)	100
				Persentase pelaksanaan penunjnag urusan pemerintah daerah (RSUD)	-

3. Bidang Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

Misi Ke-	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Progam (%)
Misi 4 Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	93,79
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	95,99

4. Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Dan Permukiman Tahun 2023

Misi Ke	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Progam (%)
Misi 4 Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Cakupan Pelayanan SPM-PR	Pengembangan Perumahan	Prosentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Layak Huni	100

5. Bidang Trantibumlinmas

Dalam menerapakan SPM Bidang Trantibumlinmas, target tahunan pencapaian SPM telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan SPM bidang Penanggulangan bencana yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5

**Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Spm
Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2023**

Misi Ke	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Progam (%)
Misi 5 MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Terwujudnya kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat	Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Melalui Penegakan Per UU Daerah, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Serta Meningkatnya Kemampuan Anggota Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	97,40
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman dan Keindahan)	98,30
				Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Penanganan Kebakaran	95,40
Misi 4 Mempertkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan	Terwujudnya lingkungan sehat, aman, tangguh, berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Capaian Mitigasi Bencana	100%

6. Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Rakyat telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6

Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

Misi Ke- 2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Progam (%)
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Pengemis dan Geldangan serta korban bencana pada saat tanggap bencana dan pasca bencana	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	100%
			2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	100%
			3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	100%
			4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar di Luar Panti	100%

Misi Ke- 2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian
			5. Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang tertangani.	100%

Adapun Arah kebijakan Tahun 2023 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Bidang Pendidikan

**Tabel 1.7
Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023**

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Rata – rata Lama Sekolah (Penduduk usia 15 tahun ke atas)	Menjamin pemenuhan SPM Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Daya Saing SDM Pendidikan dan Kebudayaan didukung Penguatan Tata Kelola
	Harapan Lama Sekolah		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) è APK SD/MI/Paket A		
	è APK SMP/MTs/Paket B		
	Angka Partisipasi Murni (APM) è APM SD/MI/Paket A		

	è APM SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan è Angka Kelulusan SD è Angka Kelulusan SMP Angka Melanjutkan è SD/MI ke SMP/MTs è SMP/MTs ke SMA/SMA/MA Angka Putus Sekolah è SD/MI/Paket A è SMP/MTs/Paket B		
Meningkatnya profesionalisme pendidik	Persentase Guru SD & SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Rasio Guru dan Siswa SD Rasio Guru dan Siswa SMP		

2. Bidang Kesehatan

Tabel 1.8
Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat (Dengan indikator Angka Harapan Hidup)	AKI (Angka Kematian Ibu)	Mengintegrasikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	AKB (Angka Kematian Bayi)	Membentuk TIM penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah.	

	AKABA (Angka Kematian Balita)	Melakukan penguatan tim penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.	
	Persentase Stunting	Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM yang mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	Menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah.	
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan		
	Nilai Sakip		

3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 1.9
Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	Meningkatkan akses air minum layak dan aman	Percepatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman (air limbah dan sampah)	
--	---	--	--

4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 1.10
Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Meningkatnya Cakupan pelayanan SPM-PR	Prosentase pelayanan SPM-PR	Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Korban Bencana dan Relokasi

5. Bidang Trantibumlinmas

Tabel 1.11
Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kepemrintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang professional dan netral	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah Persentase Penyelesaian gangguan tibus tranmas Persentase anggota satlinmas terlatih	Pemenuhan SPM di Bidang Trantibumlinmas Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana melalui Pelayanan Informasi Kebencanaan, Pelayanan	Peningkatan Kuaaitas Ketertiban Umum dan Ketentraman

Terwujudnya lingkungan sehat, aman, tanggung, berkelanjutan	Persentase tanggap kebakaran (respon time) Capaian Mitigasi Bencana	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesiapan dan keandalan logistic dan peralatan penanganan bencana. 2. Mewujudkan dan mengingkatnya Sistem peringatan dini serta layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan 3. Mendorong pelibatan Pemangku kepentingan dalam tatakelola penanggulangan bencana 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana 5. Meningkatnya edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan PB kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. 6. Membentuk Desa / kelurahan dan masyarakat tangguh bencana.
---	---	---	--

6. Bidang Sosial

**Tabel 1.12
Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023**

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan kemandirian dan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sukoharjo	Percentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial.	Pemenuhan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial.
	Percentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS anak terlantar di Luar Panti Sosial.	Pemenuhan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS anak terlantar di Luar Panti Sosial.
	Percentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS lanjut usia terlantar di Luar Panti Sosial.	Pemenuhan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS lanjut usia terlantar di Luar Panti Sosial.
	Percentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial.	Pemenuhan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial.
	Percentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang tertangani.	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	Pemenuhan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,94	78,65	0,911
2	Angka Kemiskinan	7,61	7,58	- 0,394
3	Angka Pengangguran	2,47	3,40	37,652
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,61	5,06	-9,904
5	PDRB perkapita	46,32	49,88	7,686
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,368	0,401	8,967

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Sekolah	645	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	14.546	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta Didik	94	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Guru	2.009	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada PAUD	Guru	2.009	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Guru	1.176	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	Kepala Sekolah	431	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Anak	622	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	3.728	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	40.018	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Anak	74.638	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Anaka	39.716	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Guru	6.317	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Guru	2.692	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Guru	6.317	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Guru	2.692	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang	938	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	517	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang	935	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	517	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Guru	5.970	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	2.427	
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala sekolah	490	
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala sekolah	98	
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	983	
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	517	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Lembaga	4	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	1.467	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	94	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Guru	167	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Guru	167	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Guru	81	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala sekolah	408	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Kepala sekolah	5	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KESEHATAN					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	RS	10	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	RS	10	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIA	11.314	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Bidan	762	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kartu Ibu (rekam medik)	10.218	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Bidan	762	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kartu Ibu (rekam medik)	10.246	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Bidan	762	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kartu Ibu (rekam medik)	10.246	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Bidan	762	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIA	53.280	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dokter	487	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIA	53.28	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter	487	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku rapor kesehatanku	24.788	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter/drg gigi	486	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku rapor kesehatanku	24.788	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter/drg gigi	486	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Formulir SIPTM	562.274	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	bidan	762	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Formulir SIPTM	562.274	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	bidan	762	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku kesehatan lansia	135.601	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter	460	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku kesehatan lansia	135.601	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	dokter	460	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIE, Pedoman Hipertensi	212.188	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Bidan	762	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku KIE, Pedoman Hipertensi	212.188	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Bidan	762	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha	16.956	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	34.139	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	Ha	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Ha	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Perda	1	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Perda	1	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	data	1	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Per센	23,41	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Per센	33,33	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Per센	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Dokumen	1	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Dokumen	1	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	BUMD	1	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Ijin	1	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Ijin	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	SR	299.471	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	SR	72.757	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	SR	302.228	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		0	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		0	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		0	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		0	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persen	45,78	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Persen	26,44	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Peraturan	1	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	tim	1	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	Km	607,57	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	KM	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dibangun	M	24	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	M	11.264	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	M	0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	M	30.225	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	M	10.140	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	M	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Kegiatan	0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	220	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		0	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb		0	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		0	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		0	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IJUKN di wilayah kab/kota		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		0	
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		0	
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		0	
22	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	
23	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	
24	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
25	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit rumah	0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	unit	20	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Unit	20	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	5	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	2	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit rumah	0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Kamar	63	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Kk	7	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Unit rumah	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Unit	0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Unit	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Unit	0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	unit	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Unit	0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	ha	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	620,056	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	1,653	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	11,7	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Jumlah rumah di kab/kota	Unit	242,819	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Jumlah unit PK RTLH	Unit	1953	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	8799	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Unit	6145	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Rasio rumah dan KK	Persen	0,8	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit rumah	574	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Unit rumah	21,526	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Unit rumah	21,526	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Unit rumah	21,526	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit rumah	21,526	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit rumah	21,526	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang	0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Pengembang	0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kawasan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	pengembang	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Kali	2603	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	6499	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Buah	22	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	orang	7	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	14	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana minimal	unit	114	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	persen	100	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	persen	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	persen	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	persen	100	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	persen	100	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	persen	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	buan	186	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	4	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		0	
	DINAS SOSIAL					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Buah	4	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Orang	333	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Orang	21	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	333	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Buah	1	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	333	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Orang	1	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	333	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Orang	17	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Orang	1	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Orang	258	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Orang	258	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	0	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Orang	14	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	30	
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Orang	300	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	0	
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	258	
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	5	
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	3	
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	39	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Orang	55	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	12	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tempat	0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Orang	12	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	12	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	orang	15	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Dokumen	1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	persen	90	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	perusahaan	20	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	persen	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	orang	6	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	Persen	21	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	persen	100	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah penganggur yang dilatih	orang	192	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	orang	192	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan	Persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	Orang	192	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Orang	195	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Orang	195	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total		0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Persen	60	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Persen	64	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Pekerja	28	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	Persen	98	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	98	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	persen	1	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	Orang	0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	Orang	0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	Kasus	2	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Kasus	0	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan PHK	Kasus	5	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	157	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Kasus	3	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	LKS	1	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	persen	42	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Orang	6,364	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang	6,159	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	26	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Orang	32	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang	1	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	LPTKS	0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Orang	195	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Orang	200	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	orang	210	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Orang	0	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	orang	195	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	orang	20	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	LTSA	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga	58	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	program	57	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media massa	15	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	12	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persen	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	2	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Organisasi	28	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Kader	28	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	28	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	2	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Program	1	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	2	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	persen	100	
DINAS PANGAN						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		1	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		1	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		1	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan		1	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		1	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		1	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Dokumen Izin membuka tanah		0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		0	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
1a	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	indeks	52,79	
1b	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	87,32	
1c	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	indeks	31,14	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	ijin	30	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	pejabat	5	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	daerah	0	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	lembaga	0	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	perusahaan	46	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	Dokumen	200	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perceraian	Dokumen	54	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta kematian	Dokumen	12.721	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan	Dokumen	2	
DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	desa	10	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	desa	3	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	lembaga	2	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun	23,1	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Nilai	1,47	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	68	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stakeholders	39	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	77,55	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	69,3	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kelompok kerja kampung kb	167	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persen	45,29	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	53,18	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	persen	6,98	
	DINAS PERHUBUNGAN					
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	persen	50,03	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	kendaraan	9.491	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	persen	93,89	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Persen	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	persen	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	persen	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	persen	100	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	persen	94	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persen	19	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	persen	37,5	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	persen	100	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	persen	100	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	persen	100	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase data yang dapat berbagi pakai	persen	100	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	60	
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	bah	18	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	persen	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi Informatika dan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	0	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	0	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	65,4	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	11,73	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	59,90	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	0,4	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	0,37	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	persen	0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	65,4	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	0	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	27,14	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	0	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	persen	30,96	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	persen	18,26	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	persen	7,12	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	persen	1,63	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persen	7,64	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	persen	3,89	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	persen	1,44	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda	1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	SOP	1	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Kali	1	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	2	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	1	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	0	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Pelaku Usaha	3.330	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Pelaku Usaha	4.402	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	Juta	1.460.604.48	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Kali	12	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	kali	12	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Sistem Informasi	2	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KEPEMUDAAN ,OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	590	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Kelompok	9	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	347	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	75	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	73	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	10	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Buah	13	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	Buah	3	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Buah	10	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Buah	1	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Buah	2	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	persen	100	
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistic	persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	persen	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	persen	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	persen	100	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	51	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	2	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	51	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	9	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	146	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		0	
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		0	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		0	
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	kegiatan	2	
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	5	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		0	
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	sertifikat	7	
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	7	
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Orang	7	
18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	form	5	
19	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	ratio	0,75	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	persen	41,45	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,00085	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	0,93	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah pemasarakatangemar membaca di masyarakat	Orang	9.074	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	1	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	eksemplar	1	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	eksemplar	600	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	persen	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	persen	100	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	persen	100	
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	persen	7,5	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	persen	70	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	persen	80	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	persen	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga karsipan provinsi yang sesuai NSPK	persen	100	
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	persen	0	
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga karsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	persen	0	
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN						
1	Urusan Pilihan	Kelautan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		0	
2	Urusan Pilihan	Kelautan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		0	
3	Urusan Pilihan	Kelautan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pilihan	Kelautan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		0	
5	Urusan Pilihan	Kelautan Perikanan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		0	
DINAS KEPEMUDAAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	desiinasi	2	
2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		0	
3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Usaha pariwisata	18403	
4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		0	
5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	event	10	
6	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	event	0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	event	4	
8	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	orang	0	
9	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	orang	920	
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Desa pariwisata	19	
DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN						
1	Urusan Pilihan	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan		0	
2	Urusan Pilihan	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan		0	
3	Urusan Pilihan	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian		0	
4	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan		0	
5	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota		0	
1	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN						
1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		0	
2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga		0	
3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura		0	
4	Urusan Pilihan	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		0	
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		0	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN						
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	persen	0	
1b	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	persen	0	
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	persen	33	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	persen	15,3	
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	persen	0	
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	persen	0	
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	persen	0	
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	80,76	
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	6	
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	persen	6,58	
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	persen	80,9	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	persen	75	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota		0	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		0	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		0	
2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan		0	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota		0	

NO IKK	KATEGORI URUSAN	URUSAN	IKK OUTPUT	SATUAN	NILAI PEMDA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		0	
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		0	
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		0	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
1.	PENDIDIKAN	a.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Anak	23.203	89,12 %		
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	Anak	26.036			
		b.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Anak	74.638	90,54 %		
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	Anak	82.436			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		c.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Anak	30.641	70,73 %		
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	Anak	43.319			
		d,	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Anak	1.357	100,00 %		
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan	Anak	1.357			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Kesehatan	a.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	Tempat Tidur	1.345	1,48 %	
				Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	jiwa	911.745		
		b.	Percentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	RS	10	100,00 %	
				Jumlah RS di kabupaten/kota	RS	10		
		c.	Percentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	11.314	100,00 %	
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	Orang	11.314		
		d.	Percentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Orang	10.218	100,00 %	
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	Orang	10.218		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	e.		Percentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Bayi	10.246	100,00 %	
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	Bayi	10.246		
		f.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Balita	53.280	100,00 %	
		g..		Jumlah balita di kabupaten/kota	Balita	53.280		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak	24.788	100,00 %	
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	Anak	24.788		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	h.	Percentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	562.274	100,00%		
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	Orang	562.274			
		Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	135.601	100,00 %		
			Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	Orang	135.601			
	j.	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	212.188	100,00 %		
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	Orang	212.188			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	k..	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	17.184	100,00 %		
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	Orang	17.184			
		I.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2.034	100,00 %	
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	Orang	2.034		
	m.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	12.070	100,00 %		
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	Orang	12.070			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		n.	Percentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	13.630	100,00 %	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	Orang	13.630		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha).	Hektar	14.230,7	83,93 %	
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Hektar	16.965		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b.		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Meter	0	0,00%	Tidak Menangani Infrastruktur Pengaman Pantai Di Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi Di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten, Karena Tidak Memiliki Wilayah Pantai
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	Meter	1		
	c.		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	Hektar	2.183	50,15 %	
				luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	Hektar	4.353		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	d.		Percentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.	SR	285.644	93,64 %		
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	SR	305.050			
	e.		Percentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	SR	302.228	98,35 %		
				Jumlah rumah di Kabupaten A	Unit	307.287			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		f.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	Unit	61.075	100,00 %	
				Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	Unit	61.075		
	g.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	542,43	89,64 %		
				Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	Km	605,12		
	h.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Orang	220	11,84 %		
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Orang	1.858		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		i.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi.	Proyek	184	100,00 %	
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	proyek	184		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	a.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n.	Unit	7	100,00 %	
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Unit	7		
		b.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit Rumah	0	0,00 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Tahun 2023 tidak melaksanakan kegiatan

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Unit Rumah	1		Relokasi Program Pemerintah Kabupaten
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Hektar	11.707	1,89 %	
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Hektar	620.059		
				Jumlah unit rumah tidak layak huni	Unit	1.653	0,68 %	
				Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Unit	242.819		
				Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Unit Rumah	21.526	8,87 %	
				Jumlah unit rumah kab/kota	Unit Rumah	242.819		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	A.	Percentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani.	Kali	71	100,00 %	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Kali	71		
		b.	Percentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Buah	22	75,86 %	
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Buah	29		
		c.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	orang	9.059	100,00%	
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	orang	9.059		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d.		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		1.540	0,17 %	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		908.389		
	e.		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		25.175	100,00%	
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana		25.175		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f.		Percentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan /Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/ kota dalam tingk	Kali	229	57,39 %	
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	Kali	399		
	g.		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Menit		15,00	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Sosial	a.	Percentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	333		100,00 %
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Orang	333		
		b.	Percentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Orang	91		100,00 %
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Orang	91		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
7.	Tenaga Kerja	a.	Percentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah keseluruhan kegiatan yang yang dilaksanakan mengacu ke RTKD	Kegiatan	1	4,00 %	
				Jumlah keseluruhan kegiatan yang yang dilaksanakan di kabupaten/kota	Kegiatan	25		
		b.	Percentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi.	Orang	160	90,90 %	
		c.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Orang	176		
		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan).	Rupiah	30.661.916.000.000	6.351.312,9 57,65 %			
		Jumlah tenaga kerja	Orang	482.765				

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		d.	Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan	332	50,84 %	
				Jumlah Perusahaan	Perusahaan	653		
		e.	Percentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Pencaker	4.720	76,64 %	
				Jumlah pencaker yang terdaftar	Orang	6.159		
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a.	Percentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	Rupiah	237.284.145.148	12,08 %	
				Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD	Rupiah	1.963.806.135.550		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b.	Percentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	Kasus	39	100,00 %	
				Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	Kasus	39		
		e.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Orang	28	8,37 %	
				Jumlah penduduk perempuan	Orang	334.581		
9.	Pangan	a.	Percentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota	Ton/Tahun	27.157	161,65 %	
				Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	Ton/Tahun	16.800		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Pertanahan	a.	Percentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	izin	321	100,00 %	Pada data yang disediakan kabupaten sukoharjo OSS RBA, tidak mencantumkan luasan tanah yang diijinkan data hanya berupa jumlah dan lokasi
				seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	izin	321		
		b.	Percentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		0	100,00 %	
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		1		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c.		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	izin	321	100,00 %	Pada data yang disediakan kabupaten sukoharjo OSS RBA, tidak mencantumkan luasan tanah yang diijinkan hanya berupa jumlah dan lokasi
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	izin	321		
	d.		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap dire distribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;.	hektar	0	100,00%	Kabupaten Sukoharjo tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap dire distribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Redistribusi Tanah Obyek
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	hektar	1		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Lanreform bukan merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
						izin	321	100,00 %
						izin	321	
					Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani.	obyek	6	100,00 %
					Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan	obyek	6	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Lingkungan Hidup	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		Indeks		62,03 %	
		b.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	Ton	107.597	80,45 %	
		c.		Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota	Ton	133.114,8		
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota.	Perusahaan	1	2,17 %	
				usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Perusahaan	46		
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a.	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Orang	701.516	99,80 %	
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	Orang	702.899		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b.	Percentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Anak	177.312	81,84 %	
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	Anak	216.647		
		c.	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir.	Orang	233.955	98,78 %	
				Jumlah anak usia 0-18 tahun	Orang	236.855		
		d.	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama &	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	18	46,15 %	
				Jumlah PD	PD	39		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	a.	Percentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Desa	0	0,00%	Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 tidak terdapat desa dengan status Tertinggal berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 2023 tentang status kemajuan dan Kemandirian desa Tahun 2023
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)	Desa	1		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun.	Desa	26	18,31 %	
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	Desa	142		
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	a.	TFR (Angka Kelahiran Total)				1,58%	
		b.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	Orang	94.228	69,3 %	
				Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang	135.972		
		c.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	PUS	15.498	11,40 %	
				Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	143.819		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Perhubungan	a.	Rasio konektivitas kabupaten/kota		Angka		0,392	
		b.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		Angka		0,61	
16.	Komunikasi dan Informatika	a.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PD	39	100,00 %	
				Jumlah PD	PD	39		
		b.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Buah	11	73,33 %	
				Jumlah Layanan Publik	Buah	15		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c.	Percentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.	Jiwa	634.227	69,56 %	
				Jumlah penduduk	Jiwa	911.745		
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	a.	Meningkatnya Koperasi berkualitas yang	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	Koperasi	223	65,4 %	
				Jumlah seluruh koperasi aktif	Koperasi	341		
		b.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusa	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha Mikro	31.153	15,44 %	
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	Usaha Mikro	201.774		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Penanaman Modal	a.	Percentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota.	Rupiah	- 442.597	- 23,26 %	
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rupiah	1.903.201,48		
19.	Kepemudaan dan Olahraga	a.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	orang	44.083	21,82 %	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	orang	201.985		
		b.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	orang	2.642	1,31 %	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	Orang	201.565		
		c.	Peningkatan prestasi olahraga;	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali		137	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Statistik	a.	Percentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	PD	39	100,00 %	
				Jumlah PD	PD	39		
		b.	Percentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah .	PD	39	100,00 %	
				Jumlah PD	PD	39		
21.	Persandian	a.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Angka	350	54.26 %	
				Jumlah area penilaian	Area	645		
22.	Kebudayaan	a.	Terlestarkannya Budaya Cagar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	277	100,00 %	
				Jumlah cagar budaya yang terdata	Cagar Budaya	277		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Perpustakaan	a.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		indeks		52,32	
		b.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		indeks		67,85	
24.	Kearsipan	a.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		Persen		76,87 %	
		b.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Persen		41,67 %	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C.	URUSAN PILIHAN								
25.	Kelautan dan Perikanan	a.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	15.191,48	100,27 %		
				Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	Ton	15.151,23			
26.	Pariwisata	a.	Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1).	Orang	0	0,00 %	pada Tahun 2023, di Kabupaten Sukoharjo tidak ada kunjungan wisatawan dari Mancanegara (Luar Negeri).	
				Jumlah wisatawan tahun n-1	Orang	0			
			b. Percentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Orang	897	1,81 %		
				Jumlah wisatawan tahun n-1	Orang	49.510			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c.	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	Kamar	753	41,93 %	data masih menggunakan data tahun 2022 karen pihak hotel keberatan untuk mengasih kan info tentang jumlah kamar hotel dan kamar yang terjual
				Jumlah kamar yang tersedia	Kamar	1.796		
		d.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB.	Rupiah	1.719.050.000.000	3,7 %	
				Total PDRB Berlaku	rupiah	46.521.250.000.000		
		e.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	Rupiah	41.055.782.014	7,64 %	
				Total realisasi PAD	Rupiah	537.102.489.624		
27.	Pertanian	a.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton	360.896	695,10 %	
			Produktivitas pertanian per tahun	luas panen	Ha	51.920		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b.	Percentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1).		-1.827	- 95,45 %	
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)		1.914		
28.	Kehutanan							
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	a.	Percentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin.		0	0,00%	Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023 tidak ada pemanfaatan panas bumi.
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		1		
30.	Perdagangan	a.	Percentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan IUTM/IUTS/SIUP Swalayan) Pusat dan Toko	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Pelaku Usaha	37	100,00 %	
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	Pelaku Usaha	37		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Perindustrian	b.	Percentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	Kg	13.880.501	92.54 %	
				RDKK	Kg	15.000.000		
		c.	Percentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	UTTP	10.419	80.92 %	
				jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	UTTP	12.875		
		a.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1	IKM	1.255	94,92 %	
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1). Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	IKM	1.331		
		b.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Persen		50,00 %	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		c.	Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.	Izin	8	72,73%	Tahun 2023 tidak terdapat Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo karena pada Tahun 2023 tidak ada izin perluasan yang masuk	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	11			
		d.	Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.		0	0,00%		
				Jumlah izin yang dikeluarkan		1			

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		e.	Percentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.	izin	0	0,00%	Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023 tidak ada Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Sukoharjo, karena Kabupaten Sukoharjo adalah kawasan peruntukan industri bukan termasuk kawasan Industri.
				Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	1		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		f.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		persen		73,00%	
32.	Transmigrasi						0	
D.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
33.	Perencanaan dan Keuangan	a.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Rupiah	380.994.619.129,00	17,04%	
				Jumlah APBD	Rupiah	2.235.426.792.478,00		
		b.	Rasio PAD	Jumlah PAD	Rupiah	537.102.489.624,00	26,43%	
				Jumlah Pendapatan pada APBD		2.032.501.4075.87,00		
		c.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level		3,00	
		d.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		level		3,00	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Pengadaan	e.	Rasio Belanja Pemerintahan (dikurangi expenditures Urusan Umum transfer)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures =.	Rupiah	1.462.671.926.883,00	69,08%	
				jumlah belanja APBD =	Rupiah	23.43.181.628.063,00		
		f.	Opini Laporan Keuangan		WTP		8	
		a.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun	Kontrak	16	14,68 %	
				jumlah kontrak keseluruhan tahun n	Kontrak	109		
		b.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Metode	109	12,40 %	
				Jumlah seluruh pengadaan	Metode	879		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	Rupiah	325.867.909.624	33.16 %	
				total belanja operasi dan modal	Rupiah	982.827.913.074		
		d.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	Rupiah	63.564.701.253	25,15%	
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	Rupiah	252.766.113.531		
35.	Kepegawaian	a.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	Orang	1.920	77,05 %	
				Jumlah seluruh pegawai	Orang	2.492		

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1.171	46,99 %	
				jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) =	Orang	2.492		
		c.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	59	5,04 %	
				Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1.171		
36.	Manajemen Keuangan	a.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	Rupiah	27.846.439.380	1,23 %	
				Total Belanja APBD	Rupiah	2.263.273.231.858		
		b.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	Rupiah	169.463.272.912	46,09 %	
				Total PAD dalam APBD	Rupiah	367.639.216.712		
		c.	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap ? (ya/tidak)			4	

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		KET
						ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (ya/tidak)				
				3. Apakah ada proses investasi asset tahunan? (ya/tidak)				
	d.		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)				
				Nilai realisasi SiLPA	Rupiah	233.237.051.521	10,99 %	
37.	Transparansi dan Partisipasi Publik	a.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rupiah	2.122.441.234.012		
				Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda.	opd	40	100,00 %	
		b.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	opd	40		
				Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	Dokumen	12	100,00 %	
				total jumlah dokumen yang telah dirinci	Dokumen	12		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tersebut telah ditetapkan 5 tujuan, 13 sasaran, dengan 34 indikator kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel II.C.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	68
1.1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) 4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 5. Indeks Sistem Merit 6. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai Nilai Predikat Nilai Kategori Nilai	82 3,85 B 1,547 II (175-249) 83
2.	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka Kemiskinan	Nilai %	77,89 7,9-7,5
2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,75

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Tahun	9,36
		2. Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	13,85
2.3	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,69
2.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,52
		2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	53
2.5	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka partisipasi pelaku seni dan budaya	%	30
2.6	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Prosentase Penduduk Miskin Perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	4,97
		Prosentase Penduduk Miskin Perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	2,94
3.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	4,3-4,9
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,67-4,58
		3. Pendapatan Perkapita	Rp (Juta)	44.954
3.1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	1. Pertumbuhan wirausaha baru	%	13
		2. Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	%	0,20

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		3. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,08
		4. Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	5,43
		5. Pertumbuhan investasi	%	16
		6. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2,60
		7. Skor pola pangan harapan	%	93,8
		8. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	84
3.2	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7456
4.	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	65,12
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,22
		3. Indeks Resiko Bencana	Nilai	92,70
4.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1. Prosentase lingkungan hunian layak	%	81,65
		2. Indeks layanan infrastruktur	Nilai	68,10
		3. Indeks fatalitas	Angka	0,260
		4. Cakupan layanan telekomunikasi	%	68

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	50,75
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,24
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09
		4. Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,35
5.	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	87,23
5.1.	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	91,11
5.2.	Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	80

B. Pengukuran Kinerja.

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran sakla ordinal, sebagai berikut :

**Tabel III.A.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026, setidaknya terdapat 5 Tujuan dan 13 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1) Tujuan pertama : Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka pencapaian kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.1
Capaian Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	68	72,92	107,24%	59,59	91,15%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 1, yaitu Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional, capaian kinerja tujuan mencapai **107,24%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari target sebesar 68 realisasinya 72,92 atau capaiannya sebesar 107,24%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya telah mencapai 91,15%.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai 72,92 dengan predikat (BB) yang terdiri dari RB General dengan nilai 67,24 dan RB Tematik dengan nilai 5,68. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang realisasinya 59,59 (CC), maka pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi yang signifikan sebesar 13,33 menjadi 72,92

(BB). Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memilih 2 dari 5 tema RB, yaitu Kemiskinan dan Stunting.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 1 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Pencapaian kinerja pada sasaran 1.1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.B.1.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	85,35	104,08%	83,69	100,41%
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,85	4,35	112,99%	3,42	113,28%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B (65)	B (65,04)	100,06%	B (63,58)	81,3%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,547	1,231	79,57%	1,302	65,30%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	II (249)	307	123,29%	III (267,5)	122,8%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	83	97,41	117,36%	90,19	108,23%
Rata-rata capaian					106,22%		98,55%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran 1.1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, capaian kinerja lebih tinggi dengan yang

ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **106,22%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi 85,35 pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 104,08 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi IKM pada tahun 2022 sebesar 83,69 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,41%.
- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terealisasi sebesar 4,35 pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 112,99%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi SPBE pada tahun 2022 sebesar 3,42 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 113,28%.
- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) terealisasi sebesar 65,04 pada tahun 2023 dengan capaian 100,06%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi Nilai AKIP pada tahun 2022 sebesar 63,58 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 81,3%.
- 4) Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan Rasio KFD sebesar 1,231 dari target 1,547 atau tercapai 79,57%. Realisasi tahun 2023 sebesar 1,231 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,885, maka capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 65,30%.
- 5) Indeks Sistem Merit (ISM) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 307 atau kategori III (baik) dari target kategori II (kurang) dengan capaian kinerja sebesar 123,29%.
- 6) Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik terealisasi 97,41 pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 117,36%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja meningkat karena realisasi Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2022

sebesar 90,19 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 108,23%.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III.B.1.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,69	103,32%	82	85,35	104,08%
2.	Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE)	Nilai	3,42	93,96%	3,85	4,35	112,99%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B (63,58)	105,97%	B (65)	B (65,04)	100,06%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,302	89,12%	1,547	1,231	79,57%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	III (267,5)	152,86%	II (249)	III 307	123,29%
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	90,19	111,35%	83	97,41	117,36%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 adalah 83,69 dengan capaian 103,32%, kemudian pada tahun 2023 terealisasi sebesar 85,35 dengan capaian 104,08%. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,66 dengan kenaikan capaian sebesar 0,76 %. Hal ini disebabkan karena 67 Perangkat Daerah yang aktif menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) aktif dalam menyusun rencana

tindak lanjut perbaikan hasil SKM dan menyusun laporan tindak lanjut hasil SKM, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang perlu dilakukan perbaikan kedepan sehingga hasil IKM pada periode selanjutnya mengalami kenaikan.

- 2) Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 mendapatkan nilai indeks sebesar 4,35. Nilai ini meningkat dibandingkan penilaian pada tahun 2022 yang mendapatkan nilai indeks sebesar 3,42. Nilai indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,85 dengan capaian sebesar 112,99%. Adapun kenaikan tersebut didukung sinergi, koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh OPD.
- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) terealisasi sebesar 63,58 dengan capaian 105,97% pada tahun 2022. Kemudian terjadi kenaikan realisasi menjadi 65,04 dengan capaian 100,06% pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan tindak lanjut dari rekomendasi pada LHE SAKIP sebelumnya, diantaranya:
 - a) Diselenggarakan Desk perbaikan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah untuk seluruh perangkat daerah. Perbaikan dimaksud mencakup:
 - Target pada indikator kinerja yang berbentuk interval / range diubah dalam bentuk angka yang pasti
 - Target kuantitatif pada indikator kinerja memperhatikan capaian pada tahun sebelumnya; target diarahkan untuk meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
 - Keterkaitan atau relevansi dalam uraian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable,Relevan, Timebased)

- Penetapan sasaran strategis beserta indikator kinerja yang ditetapkan agar tidak berada pada tataran teknis yang secara operasional lebih tepat untuk Pejabat Eselon 3
- b) Dilakukan Pra Reviu LKjIP untuk seluruh perangkat daerah;
- c) Dilakukan pembahasan perbaikan features pada aplikasi SISAKIP;
- d) Wujud apresiasi kepada perangkat daerah yang memperoleh nilai yang tinggi pada LHE SAKIP berbentuk Piagam Penghargaan yang disampaikan langsung oleh Bupati.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan konsultasi teknis dengan Kementerian PANRB untuk mendapatkan arahan perbaikan SAKIP di Kabupaten Sukoharjo.

- 4) Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) terealisasi sebesar 1,302 dengan capaian 89,12% pada tahun 2022. Kemudian terjadi penurunan realisasi menjadi 1,231 dengan capaian 79,57% pada tahun 2023. Hasil IKFD/RKFD merupakan perhitungan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terdapat perubahan formula perhitungan dan rentang IKFD atau RKFD antara tahun 2021 dan 2022, sehingga berakibat IKFD/RKFD tahun 2022 berada pada kategori KFD Rendah. Padahal pada tahun 2021, IKFD Kabupaten Sukoharjo berada pada kategori KFD Tinggi. Sedangkan untuk tahun 2023, IKFD Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,231 dengan kategori sedang.

Penyebab penurunan dengan tahun sebelumnya yaitu dikarenakan rentang Kapasitas Fiskal Daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahun berubah; dan belanja pegawai sebagai penyebut dalam perhitungan RKFD mengalami kenaikan karena jumlah pegawai PPPK bertambah, sehingga menyebabkan nilai perolehan RKFD kecil.

Adapun strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) antara lain sebagai berikut :

a) Strategi Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, strategi yang dilaksanakan adalah peningkatan target penerimaan PAD yang implementasinya dapat dijabarkan antara lain:

- Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
- Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan perundang-undangan daerah;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- Mendorong pembentukan sistem pembayaran pedapan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SPKD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui: Meningkatkan intensitas dan efektifitas penagihan tunggakan pajak; Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui : Peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektifitas drive thru, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;

Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah; Meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah; Membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face to face dengan fiscus; Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

b) Strategi Belanja Daerah

Dalam rangka mengoptimalkan belanja daerah, maka strategi yang diterapkan adalah dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah, dimana pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo diharuskan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat dan dukungan terhadap tematik pembangunan, yaitu pembiayaan pembangunan.

Pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo penyebutan Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) sedangkan Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 TAHUN 2023 penyebutan telah diubah menjadi Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD).

- 5) Indeks Sistem Merit (ISM) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 267,5 atau kategori III dengan capaian 152,86%, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 307 atau kategori III dan capaiannya 123,29%. Adapun keberhasilan pencapaian tersebut didukung adanya beberapa rekomendasi KASN dalam reviu hasil penilaian tahun 2022 ditindaklanjuti dan disempurnakan prosesnya pada tahun 2023.
- 6) Realisasi indikator kinerja Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2022 adalah 90,19 dengan capaian 111,35%, kemudian pada tahun 2023 terealisasi sebesar 97,41 dengan capaian 117,36%. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 7,22. Kenaikan secara signifikan tersebut tercapai karena:
 - a) Adanya kerjasama dan koordinasi antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah yang akan dijadikan lokus penilaian yaitu dengan rutin menyelenggarakan pendampingan dan monitoring serta evaluasi persiapan penyelenggaraan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
 - b) Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023 diselenggarakan oleh Ombudsman RI dengan meminta Narahubung/ Penanggung Jawab pada setiap Perangkat Daerah yang akan dinilai yaitu Dinas PM dan PTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Grogol dan Puskesmas Bendosari, sehingga mempermudah koordinasi proses penilaian antara Unit Pelayanan Publik dan Ombudsman RI;
 - c) Waktu atau jadwal penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2023 diinformasikan terlebih dahulu kepada Narahubung setiap Perangkat Daerah yang dijadikan lokus penilaian, sehingga Perangkat Daerah dapat mempersiapkan dengan baik dan maksimal;

- d) Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik mengalami perubahan metode variable penilaian, pada tahun 2021 penilaian hanya menilai ketampakan fisik saja melalui observasi dengan melihat ketersediaan sarana dan prasarana lokus penilaian, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 penilaian dilaksanakan dengan wawancara, observasi serta studi dokumen dengan dimensi input, dimensi output, dimensi proses dan dimensi pengaduan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.B.1.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Akhir
RPJMD**

Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

No	Indikator	Satuan	Realisasi sd 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian tentang Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,35	85	100,41%
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,35	3,84	113,28%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	65,04	A (80)	81,3%
4.	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,231	1,885	65,30%
5.	Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	307	III	122,8%

No	Indikator	Satuan	Realisasi sd 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian tentang Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
				(250)	
6.	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	97,41	90	108,23%
Rata-rata Capaian					98,55%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 1.1 adalah **98,55%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh realisasi sebesar 85,35 dari target akhir RPJMD sebesar 85 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,41%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi dapat dilihat pada diagram berikut:

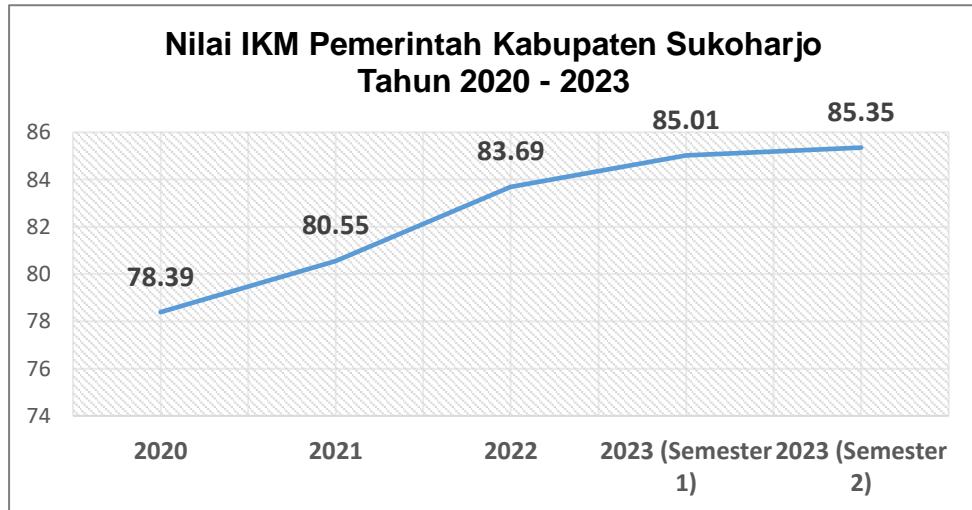
Gambar III.B.1.1.1
Perbandingan Nilai IKM Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil IKM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 85,35, hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri, akan tetapi apabila dibandingkan dengan hasil nilai IKM Provinsi Jawa Tengah, lebih tinggi nilai IKM Provinsi Jawa Tengah yang berhasil memperoleh nilai IKM 87 (Baik). Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.2
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2023



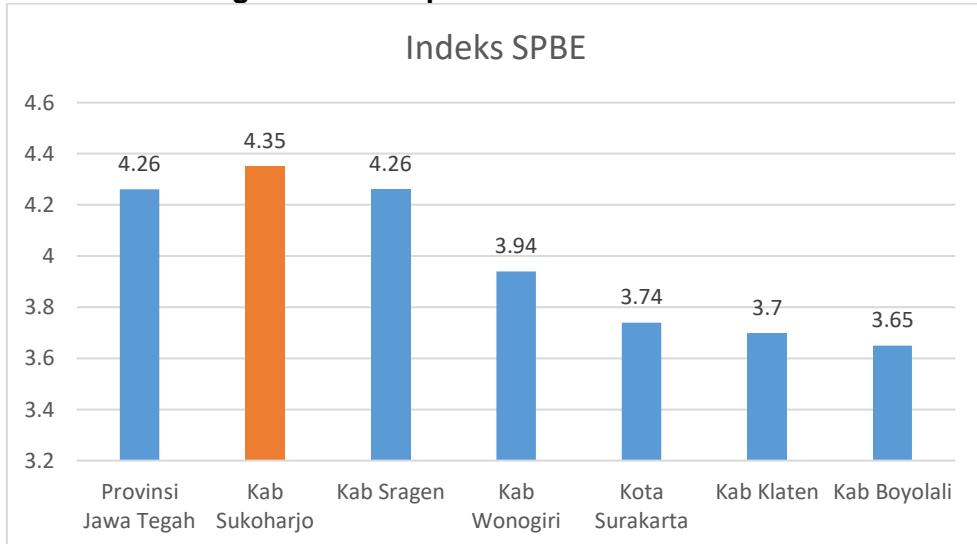
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Dari gambar grafik hasil Indeks Kepuasan Masyarakat diatas pada tahun 2020 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 78,39 dengan mutu pelayanan B (Baik). Pada Tahun 2021 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 80,55 dengan mutu pelayanan B (Baik) kemudian pada Tahun 2022 rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu 83,69 dengan mutu pelayanan B (Baik).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang cukup signifikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan IKM setiap tahunnya juga disertai dengan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya.

- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperoleh realisasi sebesar 4,35 dari target akhir RPJMD sebesar 3,84 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 113,28%. Untuk melihat perbandingan Indeks SPBE pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.3
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023

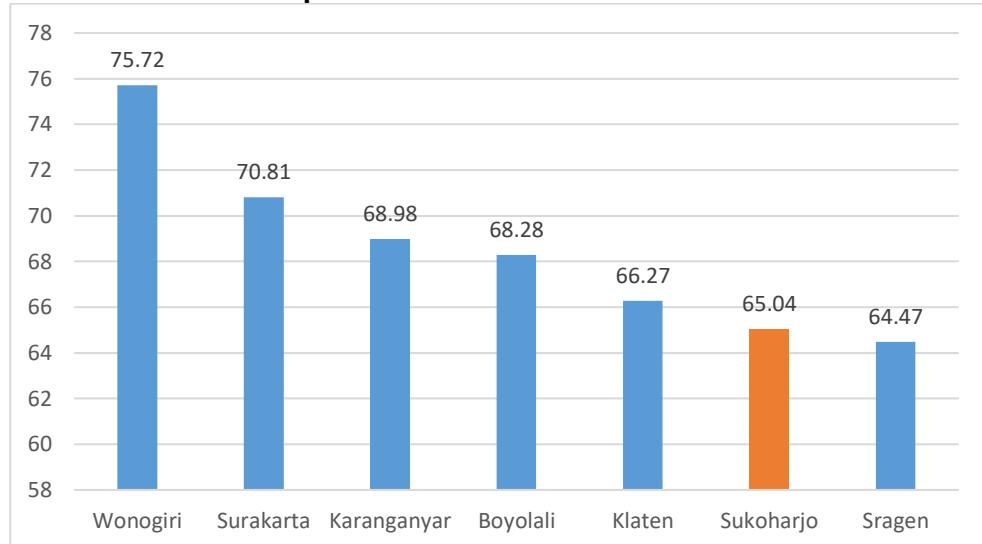


Sumber: Diskominfo Kabupaten Sukoharjo

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa realisasi Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,35 menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,26; Kabupaten Sragen sebesar 4,26; Kabupaten Wonogiri sebesar 3,94; Kota Surakarta sebesar 3,74; Kabupaten Klaten sebesar 3,70; dan Kabupaten Boyolali sebesar 3,65.

- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) memperoleh realisasi sebesar 65,04 dari target akhir RPJMD sebesar 80 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 81,3%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Nilai AKIP Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

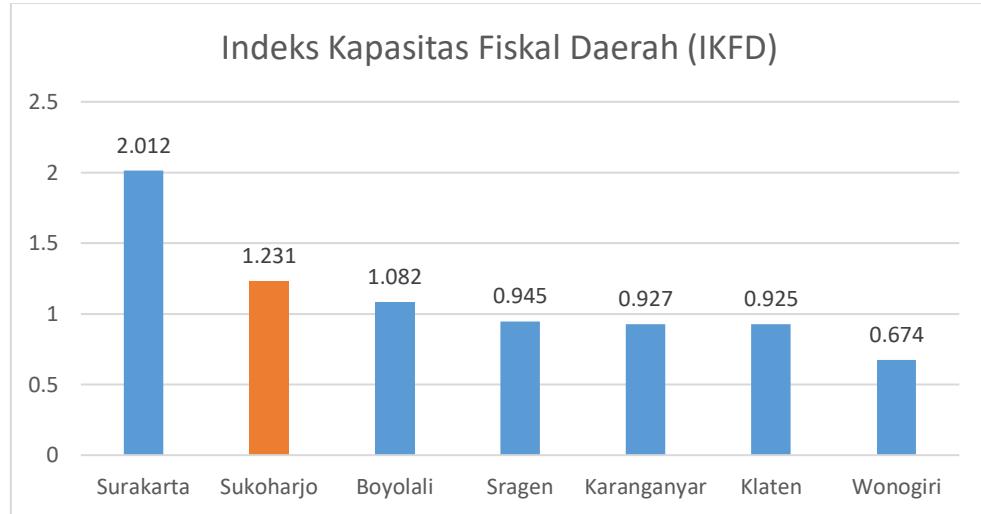
Gambar III.B.1.1.4
Perbandingan Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo dengan
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023



Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo sebesar 65,04 dibawah Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan lebih tinggi dari Kabupaten Sragen. Namun demikian, Nilai AKIP Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 berada di posisi 28 se Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan berada pada posisi 26 se Jawa Tengah.

- 4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) terealisasi sebesar 1,231 dari target akhir RPJMD sebesar 1,885 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 65,30%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi IKFD Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan IKFD Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

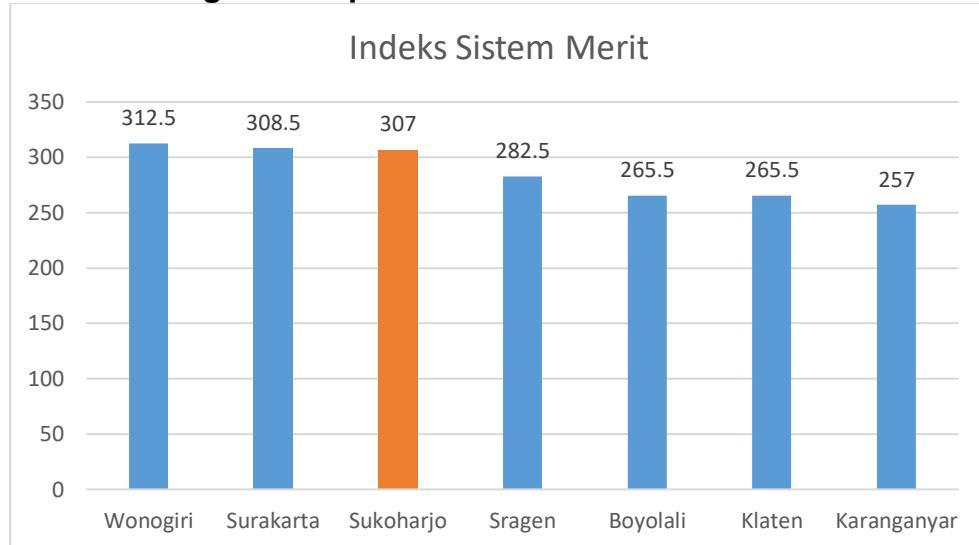
III.B.1.1.5**Perbandingan IKFD Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa realisasi IKFD Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,231 lebih tinggi dari Kabupaten Boyolali dengan realisasi sebesar 1,082; Kabupaten Sragen sebesar 0,945; Kabupaten Karanganyar sebesar 0,927; Kabupaten Klaten sebesar 0,925; dan Kabupaten Wonogiri sebesar 0,674. Sedangkan Kota Surakarta memiliki realisasi yang lebih tinggi yaitu 2,012.

- 5) Indek Sistem Merit pada tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 307 dari target akhir sebesar 250 (Kategori III) sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 122,8%. Untuk melihat perbandingan Indeks Sistem Merit pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.6
Perbandingan Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023



Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukoharjo

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo sebesar 307 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Wonogiri dengan realisasi sebesar 312,5 dan Kota Surakarta dengan realisasi sebesar 308,5. Meskipun demikian, Indeks Sistem Merit Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Sragen sebesar 282,5; Kabupaten Sragen sebesar 282,5; Kabupaten Boyolali sebesar 265,5; Kabupaten Boyolali sebesar 265,5; Kabupaten Klaten sebesar 265,5; dan Kabupaten Karanganyar sebesar 257.

- 6) Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik memperoleh realisasi sebesar 97,41 dari target akhir sebesar 90 dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 108,23%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.1.1.7
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2023

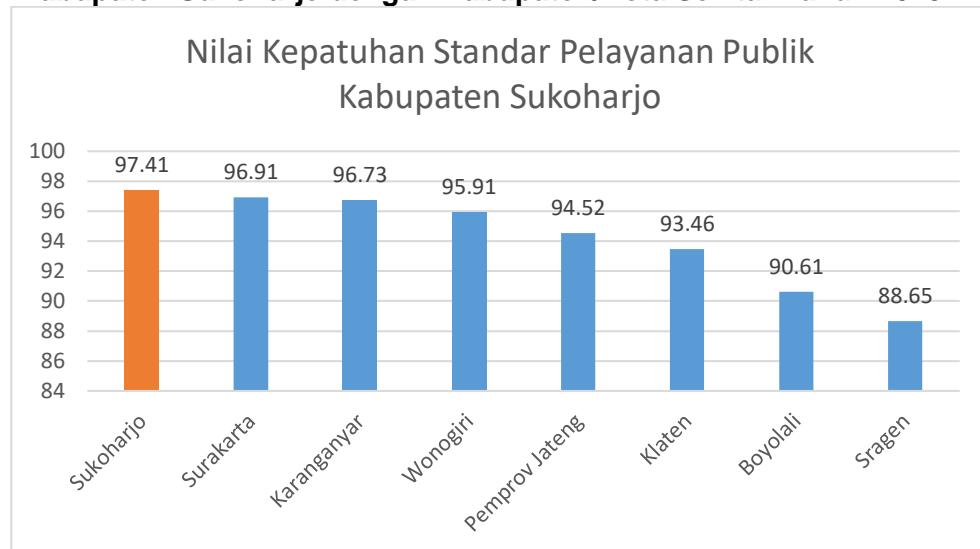


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo

Dari gambar grafik nilai kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di atas, pada awal penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai sebesar 56,41 dan masih termasuk pada zona kuning dengan kategori kepatuhan sedang. Pada tahun 2020 Ombudsman Republik Indonesia tidak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2021 nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 84,93 dan berhasil memperoleh Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Pada tahun 2022 nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan kembali menjadi 90,19 memperoleh Zona Hijau dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi) dan pada Tahun 2023 terdapat kenaikan yang sangat signifikan yaitu dengan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo

sebesar 97,41 dengan Kategori nilai A (Kualitas Tertinggi). Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.B.1.1.8
Perbandingan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023**



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo sebesar 97,41 lebih tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 96,91. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik lebih tinggi dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, dan lebih tinggi dari Kota Surakarta. Pencapaian hasil nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 memperoleh hasil yang baik dan optimal dikarenakan berhasil memperoleh peringkat 2 Nasional hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tingkat Kabupaten secara Nasional, dibawah Kabupaten Tuban yang berhasil memperoleh peringkat 1 Nasional dengan hasil nilai 97,44.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.1.1.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1.1**

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	106,23%	433.517.262.063	426.384.290.628	-0,15

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata capaian indikator pada Sasaran 1.1 sebesar 106,23% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 433.517.262.063,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 426.384.290.628,- sehingga efisiensinya sebesar -0,15%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.1 bersumber dari:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Penataan Organisasi pada Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.358.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.978.774,- atau 97,28%.
- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan pada Program Aplikasi Informatika melalui:
 - a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada subkegiatan Pelaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.175.000,- dan realisasi sebesar Rp 28.463.500,- atau tercapai 97,56%.

- b) Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.723.546.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.712.824.100,- atau tercapai 98,86%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi; Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik; Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah; Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas; Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah; Pengelolaan government chief information officer (GCIO); dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.
- c) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Kegiatan Penataan Organisasi pada Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 175.963.904,- atau 96,43%.
- d) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 382.851.560.763,- dan realisasi sebesar Rp. 380.481.211.923,- atau 99,38% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 9.000.026.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.508.690.388,- atau 94,54%.

e) Indeks merit Sistem dilaksanakan pada program Kepegawaian Daerah dengan alokasi anggaran Rp.4.425.832.500,- dan realisasi sebesar Rp. 3.213.629.662,- atau tercapai 72,61% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.212.202.838,- atau 27,39% ; Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 18.451.484.100,- dan realisasi sebesar Rp. 16.761.396.607,- atau tercapai 90,84% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.690.087.493,- atau 9,16% ; Dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp. 6.114.488.600 dan realisasi Rp. 6.047.751.054 atau tercapai 98,91% sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 66.737.546,- atau 1,09%.

2) Tujuan kedua : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.B.2
Capaian Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter**

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,89	78,65	100,98%	77,94	100,91%

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Angka Kemiskinan	%	7,9	7,58	104,05%	7,61	91,71%
Rata-rata Capaian					102,52%		96,31%

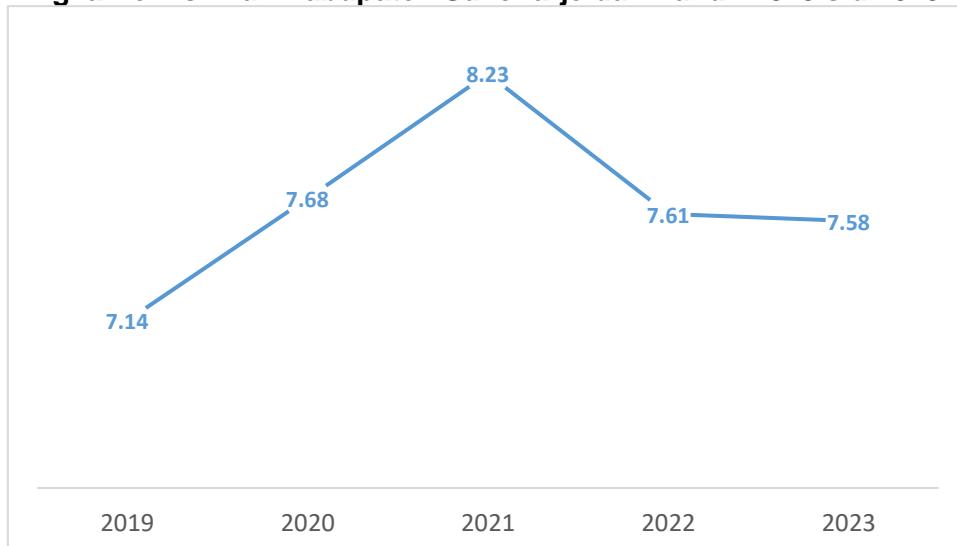
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 2, yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai 102,52%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan dari beberapa komponen dasar hidup, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari target sebesar 77,89 realisasinya 78,65 atau capaiannya sebesar 100,98%. Peningkatan nilai IPM ditunjang dari peningkatan keempat komponen penyusun IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita. Peningkatan nilai IPM didorong oleh peran pemerintah daerah yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan pembangunan indeks manusia dengan mensinkronkan/menselaraskan 3 indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak; pendidikan gratis; dan jaminan kesehatan warga. Target akhir pencapaian IPM dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2026 adalah

sebesar 78,40. Artinya, pada tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo telah mencapai target tersebut.

- 2) Kemiskinan menurut BPS dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 7,58% dari target 7,9% dengan capaian 104,05%. Hal tersebut menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang berhasil ditekan pada angka 7,58%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan hanya terjadi pada tahun 2023 sebagaimana data tersaji pada gambar berikut ini:

**Gambar III.B.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2019 s.d 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan gambar di atas, terjadi kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Angka kemiskinan ditarik dari kategori Persentase Penduduk Miskin yang dikeluarkan BPS. Angka Kemiskinan merupakan data makro dan berdasar hasil Survey Sosial

Ekonomi Nasional yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 di Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari penetapan program penanggulangan ekonomi nasional oleh Pemerintah Pusat yang berkelanjutan dan berdampak pada kehidupan masyarakat di daerah. Implementasi penanggulangan ekonomi nasional diantaranya menyasar pada kesejahteraan penduduk yang turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan, selain hal tersebut program yang dinikmati langsung oleh masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial. Sebagai contoh pada sektor pertanian dimana sektor tersebut menyerap banyak pekerja serta produksi padi yang lebih tinggi pada awal tahun 2023. Hal tersebut menopang perbaikan kondisi pendapatan di perdesaan. Selain itu komitmen Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dengan didukung program perbaikan RTLH, kawasan kumuh, bantuan sosial dan santunan kematian bagi keluarga miskin. Apabila diperbandingkan dengan target akhir pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo sebesar 7,0% maka realisasi angka kemiskinan sebesar 7,58% pada tahun 2023 baru mencapai 91,71% dari target yang ditetapkan. Namun demikian posisi angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 tersebut dibawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,93%, urutan ke-9 dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dan

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 6 sasaran, yaitu:

a. Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.1, yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,75	77,86	100,14%	77,82	99,95%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.1, yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) terealisasi pada tahun 2023: 77,86 tahun dari target 77,75 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **100,14%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,73	100,10%	77,82	100,15%	77,75	77,86	100,14%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi AHH dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan, tahun 2021 sebesar 77,73, tahun 2022 sebesar 77,82 dan tahun 2023 sebesar 77,86. Jika dilihat berdasarkan capaian, maka pada tahun 2021 persentase capaian sebesar 100,10% naik menjadi 100,15% di tahun 2022, namun terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 100,14%.

Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.2.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
	Nasional	71,57	71,85	72,13
	Provinsi Jawa Tengah	74,47	74,57	74,69
1	Sukoharjo	77,73	77,82	77,86
2	Karanganyar	77,55	77,64	77,72
3	Kota Surakarta	77,32	77,43	77,63
4	Klaten	76,86	76,95	77,07
5	Wonogiri	76,28	76,41	76,56
6	Boyolali	76,03	76,12	76,23
7	Sragen	75,79	75,87	75,97

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data di atas dapat dilihat bahwa AHH Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebesar 77,86 menjadi yang tertinggi se Solo Raya. Selain itu realisasi AHH Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari realisasi AHH

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun Kabupaten Sukoharjo menjadi nomor ketiga setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas sesungguhnya tidak terlepas dari dipedominya sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yaitu “Menurunnya angka kesakitan dan kematian” dengan indikator kinerja antara lain:

- 1) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI);
- 2) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB);
- 3) Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA);
- 4) Menurunnya persentase stunting;
- 5) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 6) Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
- 7) Meningkatnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan.

Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam pencapaian target sasaran diantaranya pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, minim aktivitas fisik, dan konsumsi minuman beralkohol yang dapat meningkatkan faktor risiko penyakit tidak menular seperti obesitas dan tekanan darah tinggi sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular seperti stroke, jantung dan diabetes.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.1.4

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD Sasaran 2.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian terhadap target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,86	77,90	99,95%

Realisasi kinerja indikator Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 77,86 tahun pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 77,90 tahun maka capaiannya adalah 99,95%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.2.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.1**

No	Sasaran	Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	100,14%	Rp. 263.251.446.649	Rp. 243.068.806.291	7,81

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.1 sebesar 100,14% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.251.446.649,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.068.806.291,- sehingga efisiensinya sebesar 7,81%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.1, melalui 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.347.380.392,- terealisasi sebesar Rp. 152.526.613.663,- atau

tercapai 92,25% dengan sisa anggaran Rp. 12.820.766.729,- atau 7,75%.

- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.012.382.057,- terealisasi sebesar Rp. 81.874.707.402,- atau tercapai 91,98% dengan sisa anggaran Rp. 7.137.674.655,- atau 8,02%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.819.799.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.676.622.476,- atau tercapai 92,13% dengan sisa anggaran Rp. 143.177.124,- atau 7,87%.
- 4) Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 614.508.400,- terealisasi sebesar Rp. 568.847.600,- atau tercapai 92,57% dengan sisa anggaran 45.660.800,- atau 7,43%.
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.457.376.200,- terealisasi sebesar Rp. 6.422.015.150,- atau tercapai 99,45% dengan sisa anggaran Rp. 35.361.050,- atau 0,55%.

b. Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.B.2.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,36	9,84	105,13%	9,62	104,79%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,85	13,91	100,43%	13,9	100,36%

Rata-rata Capaian				102,78%		102,58%
-------------------	--	--	--	----------------	--	---------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **102,78%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Pada tahun 2023, indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) memiliki target 9,36 tahun yang terealisasi 9,84 tahun. Realisasi indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaiannya sebesar 105,13%, sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,79%.
- 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada tahun 2023, indikator Harapan Lama Sekolah memiliki target 13,85 tahun yang terealisasi 13,91 tahun. Hal ini berarti anak-anak di Kabupaten Sukoharjo yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma II. Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2023 tercapai sebesar 100,43%, sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,36%.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023
Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,35	100,11%	9,62	102,89%	9,36	9,84	105,13%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,84	100,07%	13,90	100,43%	13,85	13,91	100,43%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi untuk kedua indikator dari tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka terdapat peningkatan sebesar 0,22 dengan peningkatan capaian sebesar 2,24%. Sedangkan realisasi Harapan Lama Sekolah (Tahun) tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka terdapat peningkatan sebesar 0,01.

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan data Rata-rata lama sekolah (RLS) di atas, dapat dilihat bahwa terjadi tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menunjukkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo relatif terus membaik.

Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 9,35 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,35 tahun atau telah menikmati bangku sekolah setara kelas 3 SMP (tamat SMP).

Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 9,62 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,62 tahun atau telah tamat SMP dan berada di tingkat pertama pendidikan setingkat SMA.

Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 9,84 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,84 tahun atau telah tamat SMP dan berada di tingkat pertama pendidikan setingkat SMA.

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, disamping itu perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sukoharjo juga semakin meningkat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo mencapai 13.90 tahun. Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukoharjo mencapai 13.91 tahun. Artinya, secara rata-rata anak-anak di Kabupaten Sukoharjo yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga tamat Diploma I dan masuk ke Diploma II). Terdapat peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0.01 tahun dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) disebabkan karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, perbaikan kualitas sarana dan prasarana di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo juga semakin meningkat sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,84	9,39	104,79%
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,91	13,86	100,36%
Rata-rata Capaian					102,58%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai target. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tercapai sebesar 104,79%. Sedangkan Capaian Harapan Lama Sekolah (Tahun) tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tercapai sebesar 100,36%. Adapun untuk melihat perbandingan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.2.2.4
Perbandingan Realisasi rata-rata Lama Sekolah antara Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional**

Eks-Karesidenan Surakarta	2021	2022	2023
Kota Surakarta	10,90	10,92	11,00
Kabupaten Sukoharjo	9,35	9,62	9,84
Kabupaten Klaten	8,81	9,09	9,27
Kabupaten Karanganyar	8,57	8,79	9,02
Kabupaten Boyolali	7,85	8,08	8,09
Nasional	8,54	8,69	8,77
Provinsi Jawa Tengah	7,75	7,93	8,01
Kabupaten Sragen	7,66	7,79	7,87
Kabupaten Wonogiri	7,34	7,42	7,67

Sumber: Badan Pusat Statistik

RLS penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) tahun 2023 di atas RLS Nasional sebesar 1,07 tahun. Jika dibandingkan dengan RLS Regional (Provinsi Jawa Tengah), RLS di Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari RLS Regional sebesar 1,83 tahun. Apabila dibandingkan

dengan daerah se eks-Karesidenan Surakarta, posisi capaian RLS Kabupaten Sukoharjo berada pada nomor 2 setelah Kota Surakarta.

Untuk melihat perbandingan realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.5
Perbandingan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dengan Eks Karesidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional

Eks-Karesidenan Surakarta	2021	2022	2023
Kota Surakarta	14,88	14,89	14,90
Kabupaten Sukoharjo	13,84	13,9	13,91
Kabupaten Karanganyar	13,69	13,7	13,71
Kabupaten Klaten	13,39	13,4	13,41
Nasional	13,08	13,1	13,15
Kabupaten Sragen	12,84	12,91	12,92
Provinsi Jawa Tengah	12,77	12,81	12,85
Kabupaten Boyolali	12,57	12,62	12,66
Kabupaten Wonogiri	12,5	12,51	12,52

Sumber : Badan Pusat Statistik

HLS Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 di atas HLS Nasional sebesar 0,76 tahun. Jika dibandingkan dengan HLS Regional (Provinsi Jawa Tengah) juga di atas HLS Regional sebesar 1,06 tahun. Apabila dibandingkan dengan daerah se eks-Karesidenan Surakarta, HLS Kabupaten Sukoharjo berada pada peringkat kedua setelah Kota Surakarta.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.2.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	102,78%	Rp. 150.583.445.089	Rp. 147.954.001.140	0,07

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.2 sebesar 102,78% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.583.445.089,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 147.954.001.140,- sehingga efisiensinya sebesar 0,07%. Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.2, Meningkatnya Kualitas Pendidikan, melalui:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.353.545.145,- terealisasi sebesar Rp. 69.634.747.954,- atau tercapai 98,98% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 718.797.191,- atau 1,02%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.605.990.240,- terealisasi sebesar Rp. 52.654.226.117,- atau tercapai 98,22% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 951.764.123,- atau 1,78%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.737.861.704,- terealisasi sebesar Rp. 22.974.946.969,- atau tercapai 96,79% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 762.914.735,- atau 3,21%; kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.594.558.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.399.655.800,- atau tercapai 92,49% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 194.902.200,- atau 7,51%.

- 2) Program Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau tercapai 100%; dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.490.000,- terealisasi sebesar Rp. 255.424.300,- atau tercapai 99,58% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.065.700,- atau 0,42%.

c. Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.3, yaitu Meningkatnya pengendalian penduduk tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.B.2.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk**

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			%Capaian thd.Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,69	0,76	89,86%	0,69	111,63%

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat dilihat dengan menghitung jumlah penduduk alami (selisih jumlah kelahiran dan kematian) dan jumlah penduduk non alami (selisih migrasi penduduk masuk dan penduduk keluar). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.3, yaitu Meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,76% dari target 0,69% dengan capaian kinerja sebesar **89,86%** sehingga dapat dikategorikan **Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

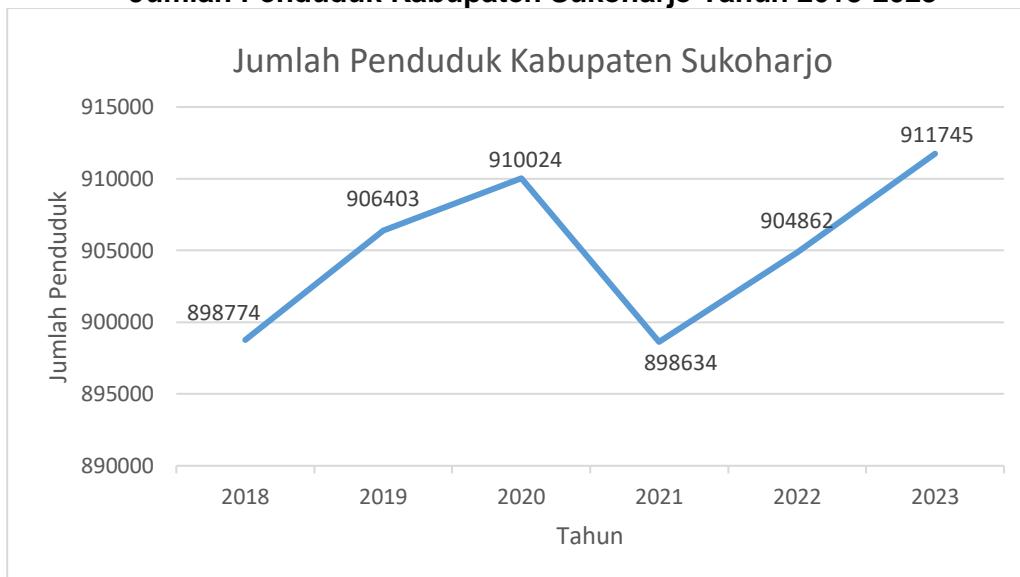
Tabel III.B.2.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaia n	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,69	121,59%	0,69	0,76	89,86%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebesar 0,69%. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,76%. Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,07. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih dalam kategori normal. Dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Program Bangga Kencana berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, salah satunya adalah cara mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar tercipta keluarga yang bahagia sejahtera di Kabupaten Sukoharjo. Program Bangga Kencana harus terus ditingkatkan dan disebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dan mengerti akan pentingnya KB dengan menggunakan alat kontrasepsi yang tepat serta sosialisasi akan pentingnya keluarga kecil dan berkualitas dapat diterima masyarakat.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.2.3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 sebanyak 898.774 jiwa. Kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 910.024 jiwa. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 898.634 jiwa dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 904.862 jiwa. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 911.745 jiwa.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd.Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,76	0,86	111,63%

Realisasi kinerja indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,76% pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,86% maka capaiannya adalah 111,63%. Adapun faktor pendukung dari pencapaian kinerja yaitu keberhasilan dari sosialisasi yang dilaksanakan secara terus menerus kepada masyarakat terkait Program Keluarga Berencana dan jumlah kelahiran penduduk lebih kecil dibandingkan jumlah kematian.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.3.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.3

No	Sasaran	Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengendalian penduduk	89,86%	Rp. 16.395.578.000	Rp. 15.349.193.262	-3,76

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.3 sebesar 89,86% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.395.578.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.349.193.262,- sehingga efisiensinya sebesar -3,76%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.3, melalui:

- 1) Program Pengendalian Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 471.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 446.942.671,-

atau 94,73% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 24.857.329,- atau 5,27%.

- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.749.123.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.787.002.391,- atau 90,13% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 962.120.609,- atau 9,87%.
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan alokasi anggaran sebesar 6.174.655.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.115.248.200,- atau 99,04% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 59.406.800,- atau 0,96%.

d. Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.4, yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.4.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,51	n/a	n/a	96,96	n/a
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	53	54,66	103,13%	52,53	105,80%
Rata-rata Capaian					103,13%		105,80%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.4, yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian

kinerja pada sasaran ini sebesar **103,13%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 belum dirilis sehingga data IPG tidak bisa disajikan pada laporan ini.
- 2) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terealisasi sebesar 54,66% dengan capaian sebesar 103,13% pada tahun 2023.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.B.2.4.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,96	100,47%	96,52	n/a	n/a
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	52,53	125,37%	53	54,66	103,13%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 96,96. Sedangkan IPG tahun 2023 belum dirilis. Namun demikian, Sebagai salah satu upaya perwujudan kemandirian masyarakat utamanya kaum Perempuan, dapat dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo melalui Kegiatan Peningkatan Produktifitas Ekonomi

Perempuan (PPEP) dan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga dengan melakukan pelatihan keterampilan teknis bagi perempuan untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelatihan keterampilan teknis bagi perempuan dilakukan melalui usaha ekonomi produktif baik itu olahan pangan maupun non olahan pangan atau keterampilan lain dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Kelompok Perempuan rentan (di daerah ekstrim)
- 2) Perempuan Kepala Keluarga
- 3) Perempuan Korban Kekerasan

Jumlah sasaran untuk kegiatan pelatihan ini dilakukan setiap tahunnya untuk 3 (tiga) desa, 2 (dua) desa untuk Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan (PPEP) dan 1 (satu) desa untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Perempuan Korban Kekerasan. Adapun hasil yang diharapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kapasitas Perempuan dalam mengolah atau mengelola potensi sumber daya ekonomi desa secara mandiri.
- 2) Meningkatnya pengetahuan , keterampilan dan motivasi Perempuan dalam usaha ekonomi produktif.
- 3) Meningkatnya jumlah Perempuan wirausaha baru.
- 4) Meningkatnya kesejahteraan Perempuan dan keluarganya.

Nilai total Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 adalah 52,53 sedangkan pada tahun 2023 nilai IPP adalah 54,66. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 2,13 poin. Meskipun demikian, kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan kenaikan nilai IPP pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,76 poin. Salah satu faktor pendukung peningkatan capaian IPP pada tahun 2023 adalah adanya

perbaikan dalam metode perhitungan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap data pendukung. Berikut hasil perhitungan data pada masing-masing domain:

- 1) Domain Pendidikan : 61,57
- 2) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan : 6,56
- 3) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja : 54,41
- 4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan : 97,45
- 5) Domain Gender dan Diskriminasi : 53,33

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa domain kesehatan dan kesejahteraan mendapatkan nilai terendah. Hal tersebut dikarenakan data jumlah pemuda yang merokok cukup tinggi sehingga perlu diadakan sosialisasi kepada pemuda di Kabupaten Sukoharjo agar dapat menurunkan tingkat perokok di kalangan pemuda.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel III.B.2.4.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD Sasaran 2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	n/a	96,55	n/a
2.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,66	51,66	105,81%
Rata-rata Capaian					105,81%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.4 ini telah melebihi target. Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 terealisasi 54,66 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 51,66 maka capaianya sebesar 105,81%. Untuk dapat melihat perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel III.B.2.4.4
Perbandingan Realisasi Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional

Keterangan	2021	2022	2023
Nasional	53,33	55,33	Belum rilis
Provinsi Jawa Tengah	50,67	53,33	Belum rilis
Kabupaten Sukoharjo	41,77	52,53	54,66
Kabupaten Klaten	-	-	50,80

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 54,66 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 53,33 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional sebesar 55,33. Untuk saat ini Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang sudah melaksanakan pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi 3,86 poin jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten sebesar 50,80.

Nilai total Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 54,66 sedangkan target akhir nilai IPP pada

akhir RPJMD adalah sebesar 51,66 sehingga capaian yang telah diperoleh saat ini telah melewati target akhir yang telah ditetapkan yaitu 105,81%. Hal ini dikarenakan pada saat penentuan target awal mengacu nilai IPP Nasional pada tahun 2018 yang baru sekitar 51,50. Sehingga pada tahun 2023 ini perlu dilakukan review Renstra untuk menyesuaikan kembali target akhir RPJMD.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.2.4.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.4**

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	103,13%	Rp. 182.760.000	Rp. 180.675.500	4,27

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.4 sebesar 103,13% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.760.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 180.675.500,- sehingga efisiensinya sebesar 4,27%. Pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2.4 hanya menggunakan capaian dan anggaran serta realisasi dari indikator IPP saja mengingat IPG belum rilis.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.4, melalui :

- 1) Indeks Pembangunan Gender dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 541.992.000,- terealisasi sebesar Rp. 540.317.513,- atau 99,69%;
 - b) Program Perlindungan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.624.048,- terealisasi sebesar Rp. 257.039.694,- atau 94,98%;
 - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.020.000,- atau 98,04%;
 - d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.008.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.759.500,- atau 99,11%;
 - e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 145.000.000,- atau 100%;
 - f) Program Perlindungan Khusus Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 225.700.000,- atau 99,69%.
- 2) Indeks Pembangunan Pemuda dilaksanakan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 182.760.000,- dan realisasi sebesar Rp 180.675.500,- atau tercapai 98.86% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.084.500,- atau 1,14%.

e. Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.5, yaitu Meningkatnya kearifan budaya lokal tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.B.2.5.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya local**

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd.Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	30	36	120%	24,08	102,86%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.5, yaitu Meningkatnya kearifan budaya lokal dengan indikator kinerja Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya pada tahun 2023 terealisasi sebesar 36% dari target 30%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **120%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel III.B.2.5.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal**

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	24,08	104,70%	30	36	120%

Berdasarkan tabel di atas, Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya terealisasi 24,08% pada tahun 2022 dan meningkat 11,92% menjadi 36% pada tahun 2023. Jika dilihat dari capaiannya, pada tahun 2022 capaian sebesar 104,70% sedangkan pada tahun 2023 capaian sebesar 120%. Peningkatan Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya/APPSB disebabkan karena meningkatnya kegiatan pertunjukan seni dan budaya di Kabupaten Sukoharjo pasca pemberlakuan PPKM akibat pandemi covid-19 sehingga meningkatkan jumlah pelaku seni dan budaya yang ikut terlibat dalam kegiatan pertunjukan seni dan budaya; hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya angka partisipasi pelaku seni dan budaya di Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Meningkatnya partisipasi dimaksud terbukti dari 39 event seni dan budaya pada tahun 2023 yang telah diikuti 4.931 orang dari 108 sanggar / paguyuban seni.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.5.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	36	35	102,86%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai 102,86%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.2.5.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.5**

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kearifan budaya lokal	120%	Rp. 17.064.233.600	Rp. 15.722.140.358	27,86

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.5 sebesar 120% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.064.233.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.722.140.358,- sehingga efisiensinya sebesar 27,86%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.5, melalui:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.065.057.500,- atau tercapai 96,82% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 34.942.500,- atau 3,18%; kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.726.366.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.676.320.358,- atau 97,10% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 50.045.642,- atau 2,9%; kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.987.867.600,- terealisasi sebesar Rp. 12.731.930.000,- atau tercapai 91,02% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.255.937.600,- atau 8,98%.
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang terdiri dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi

sebesar Rp. 75.000.000,- atau tercapai sebesar Rp. 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- ; kegiatan pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.670.000,- atau tercapai 99,49% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 330.000,- atau 0,51%.

- 3) Program Pembinaan Sejarah melalui kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 109.162.500,- atau tercapai 99,24% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 837.500,- atau 0,76%.

f. Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.6, yaitu Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.2.6.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	4,97	6,68	65,59%	n/a	33%
2.	Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	2,94	0,71	175,85%	n/a	173,21%
Rata-rata Capaian					120,72%		103,11%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.6, yaitu Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin dapat dilihat bahwa capaian kinerja belum mencapai target, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **120,72%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 6,68% dengan capaian sebesar 65,59%. Target yang tidak terpenuhi pada indikator tersebut diatas dilatarbelakangi pada tahun 2023 masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS dan menerima Bantuan PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang berada pada klasifikasi Desa/ Kelurahan Perkotaan sebanyak **60.676 jiwa** dari total **67.130 jiwa penduduk miskin** yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dominannya jumlah masyarakat miskin yang berada pada klasifikasi desa/kelurahan Perkotaan tersebut diatas berdasar ketentuan dalam Peraturan **Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020**, yang merupakan pembaruan dari Perka BPS Nomor 37 Tahun 2010. Dalam peraturan baru tersebut, jumlah Desa/ Kelurahan yang masuk pada kategori Perkotaan bertambah signifikan, sehingga jumlah jiwa yang terdaftar DTKS dan menerima PKH dan BPNT di Desa/ Kelurahan dengan Klasifikasi Perkotaan bertambah banyak dari target yang ditetapkan. Untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin pada desa/kelurahan dengan klasifikasi perkotaan diperlukan langkah terpadu dari segenap pemangku kepentingan untuk memberdayakan masyarakat miskin . Strategi, pendekatan, kebijakan, model dan aksi penanggulangan kemiskinan yang tepat diharapkan dapat melepaskan masyarakat miskin dari ketergantungan untuk menerima bantuan dari pemerintah.
- 2) Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,71% dengan capaian sebesar 175,85%. Target yang terpenuhi pada indikator tersebut diatas dilatarbelakangi pada tahun 2023 masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS dan menerima Bantuan

PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang berada pada klasifikasi Desa/ Kelurahan Perdesaan sebanyak **6.454 jiwa** dari total **67.130 jiwa penduduk miskin** yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berkurangnya jumlah masyarakat miskin yang berada pada klasifikasi desa/kelurahan Perdesaan tersebut diatas berdasar ketentuan dalam Peraturan **Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020**, yang merupakan pembaruan dari Perka BPS Nomor 37 Tahun 2010. Dalam peraturan baru tersebut, jumlah Desa/ Kelurahan yang masuk pada kategori Perdesaan berkurang signifikan, sehingga jumlah jiwa yang terdaftar DTKS dan menerima PKH dan BPNT di Desa/ Kelurahan dengan Klasifikasi Perdesaan berkurang banyak dari target yang ditetapkan.

Perubahan indikator kinerja sasaran strategis “ meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin dari prosentase masyarakat penerima bantuan sosial sembako dan PKH pada tahun 2022 dan berubah kembali pada tahun 2023 menjadi 1. prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)” 2. prosentase penduduk miskin pedesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)” dilatarbelakangi hal berikut :

- 1) Pada akhir tahun 2021 Kementerian Sosial memberikan panduan dengan tidak mempergunakan istilah desil (klasifikasi tingkatan kesejahteraan kemiskinan) dalam pemberian bantuan / penerima manfaat untuk masyarakat;
- 2) Pada tahun 2022 dipergunakan indikator kinerja prosentase masyarakat penerima bantuan sosial sembako dan PKH, sebagai tindak lanjut untuk tidak mempergunakan istilah desil. Sumber data yang dipergunakan dalam melihat penduduk miskin adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) dan mendapat Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT);

3) Untuk memformalkan indikator yang tidak mempergunakan desil, Dinas Sosial berupaya merumuskan dalam dokumen perencanaan Renstra perangkat daerah pada tahun 2023 . Hal tersebut bersamaan dengan agenda Perubahan Renstra perangkat daerah dengan koordinator teknis BAPPERIDA. Perubahan indikator yang tidak mempergunakan istilah desil terkendala dokumen perencanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Sukoharjo. Konsekuensi perubahan indikator utama dalam Renstra harus dirumuskan juga dalam RPJMD sebagai pedoman perencanaan daerah, namun perubahan indikator dalam RPJMD tidak memungkinkan mengingat substansi dan prosedur perubahan RPJMD yang melibatkan Legislatif. Dengan kondisi tersebut maka indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miiskin mempergunakan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD yakni 1. prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)” 2. prosentase penduduk miskin pedesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)”. Untuk jabaran/definisi operasional ke 2 (dua) indikator tersebut diatas tetap mempergunakan data masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapat Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Kualitas hidup penduduk miskin diupayakan diperbaiki melalui bantuan sosial yang diberikan dan bermanfaat memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.B.2.6.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	n/a	n/a	4,97	6,68	65,59%
2.	Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	n/a	n/a	2,94	0,71	175,85%

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Indikator Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 6,68 dari target sebesar 4,97 dengan capaian 65,59%. Realisasi tersebut pada tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.
- 2) Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,71 dari target 2,94 dengan capaian 175,85%. Realisasi tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.2.6.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD
Sasaran 2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	6,68	4,00	33%
2.	Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	0,71	2,65	173,21%
Rata-rata Capaian					103,11%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.2 ini telah mencapai **103,11%**.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.2.6.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2.6

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	120,72%	Rp. 1.240.851.800	Rp. 1.239.179.480	0,42

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 2.6 sebesar 120,72% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.240.851.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.239.179.480,- sehingga efisiensinya sebesar 0,42%.

Adapun rincian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 6,68 dari target akhir RPJMD sebesar 4,00 sehingga capaian terhadap target RPJMD adalah 33%.
- 2) Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,71 dari target akhir RPJMD sebesar 2,65 sehingga capaian terhadap target RPJMD adalah 173,21%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.6, melalui:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial melalui Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 378.077.000,- atau 99,84%.

- 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 862.171.800,- terealisasi sebesar Rp. 861.102.480,- atau 99,87%. Adapun sub kegiatan yang mendukung yaitu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Tujuan ketiga : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.**

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.3
Capaian Kinerja Tujuan 3
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,3	5,06	117,67%	5,61	85,18%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,67	3,40	127,19%	2,47	123,93%
3.	Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	44.954	49.88**	110,96%	46.32*	99,94%
Rata-rata Capaian					118,61%		103,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 3, yaitu Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **118,61%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,06% jika dibandingkan dengan target 2023 maka capaiannya 117,67%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya 85,18%. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju

pertumbuhan ekonomi bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 3,82% meningkat menjadi 5,61 % tahun 2022, dan capaian di tahun 2023 sebesar 5,06%, Kondisi ini lebih baik dibandingkan Provinsi 4,98% dan nasional 5,05%. Pencapaian angka tersebut menunjukkan kondisi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo tumbuh positif meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka terjadi laju pertumbuhannya melambat. Hal ini disebabkan karena dari lapangan usaha industri pengolahan yang perannya sebesar 38% mengalami perlambatan, pada tahun 2022 pertumbuhan industri 4,44% sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhannya 2,23%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 2,47% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 3,40%. Adapun kenaikan tingkat pengangguran didorong oleh dampak pandemi Covid19 yang belum selesai diperparah dengan kondisi geopolitik yang berdampak pada ekonomi global, misalnya perang Ukraina. Hal ini mengakibatkan kinerja ekspor dan impor terhambat, terutama di sektor industri tekstil.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita ini selanjutnya menjadi dasar besaran Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sukoharjo. PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 adalah Rp. 49.880.000,-** dari target sebesar Rp. 46.710.000,- atau capaiannya sebesar 110,96%.

Untuk dapat melihat perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021 hingga tahun 2023 maka dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.B.3
PDRB Per Kapita Tahun 2021 s.d 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 42.650.000,- meningkat sampai tahun 2023 menjadi Rp. 49.880.000,-. Pencapaian pendapatan per kapita yang melebihi target tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tabungan dan investasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas.

Pencapaian kinerja pada sasaran 3.1, yaitu Meningkatnya pertumbuhan produktifitas tercermin pada tabel sebagai berikut :

**Tabel III.B.3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2022	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	13	19,74	151,84%	31	123,37%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	0,20	1,6	800%	16,35	43,24%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,08	5,01	98,62%	4,13	89,46%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	5,43	3,23	59,48%	4,44	50,47%
5.	Pertumbuhan investasi	%	16	-23,25	-145,31%	n/a	-83,03%

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2022	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	2,60	2,68	103,08%	0,89	86,45%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,8	93,9	100,11%	93,8	99,89%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	84	76,63	91,22%	75,75	90,15%
Rata-rata Capaian					157,38%		62,5%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 3.1, yaitu Meningkatnya pertumbuhan produktifitas dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 157,38% sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru pada tahun 2023 dengan target 13%, dapat terealisasi sebesar 19,74% sehingga capaianya sebesar 151,84%. Hal tersebut berarti bahwa capaian kinerja dapat melebihi target yang diharapkan.
- 2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil pada tahun 2023 dari target sebesar 0,20% terealisasi sebesar 1,6%. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 800% atau telah melebihi target yang diharapkan.
- 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan yang memiliki target 5,08% dengan realisasi di tahun 2023 ini sebesar 5,01%. Realisasi tersebut belum mencapai target, namun terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Namun jika dibanding antara tahun 2023 dan 2022 dengan 2021 nilai PDRB Sektor Perdagangan mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan

adanya konflik perang Rusia-Ukraina, konflik Palestina-Israel, meningkatnya harga minyak dunia, sehingga berpengaruh terhadap kondisi iklim perdagangan, adanya inflasi yang masih melanda, selain itu terjadinya penurunan harga komoditas global dan kinerja ekspor.

- 4) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri tahun 2023 terealisasi sebesar 3,23% dari target 5,43% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 59,48% atau kurang dari target. Hal ini dikarenakan kondisi pekonomian kabupaten sukoharjo yang cenderung mengalami penurunan salah satunya dikarenakan penanaman modal baik asing maupun domistik di wilayah kabupaten sukoharjo tergolong menurun, dan juga dikarenakan belum banyaknya para penanam modal atau investor yang berminat terhadap produk yang diciptakan oleh pengrajin dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Pertumbuhan investasi dengan target tahun 2023 sebesar 16% dapat terealisasi sebesar -23,25%, sehingga capaiannya - 145,31%. Terdapat faktor-faktor tidak tercapaiannya target yaitu:
 - a) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - b) Pelaku Usaha yang wajib LKPM adalah Pelaku Usaha Menengah – Besar.
 - c) Banyak calon pelaku usaha menunda kegiatan usaha menunggu selesainya hasil pemilu 2024.
 - d) Banyak perusahaan yang melaporkan kegiatan hanya sampai tahap Produksi sehingga tidak ada tambahan investasi.
- 6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terealisasi sebesar 2,68% dari target 2,60% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 103,08%.

- 7) Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2023 dari target 93,8% terealisasi 93,9% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,11%.
- 8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota pada tahun 2023 dari target 84% terealisasi 76,63% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 91,22% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi perusahaan lokal maupun nasional banyak yang melakukan efisiensi sehingga banyak perusahaan yang tidak dapat membuka lowongan pekerjaan secara besar-besaran.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian antara tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas

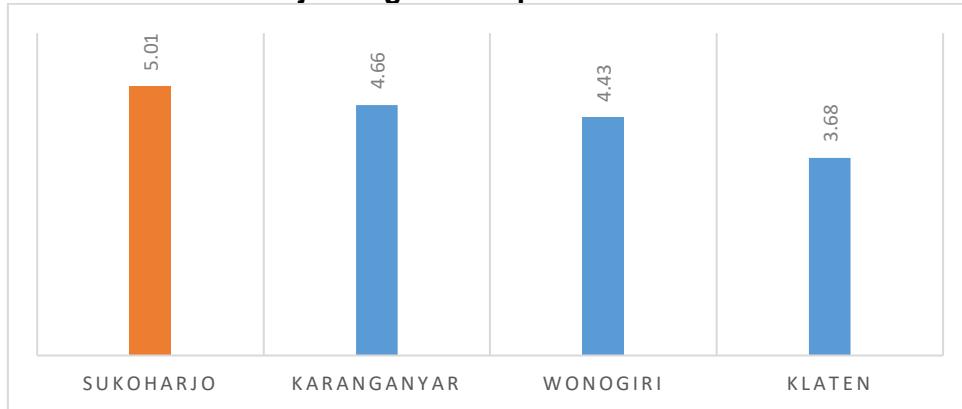
No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	31	258,33%	13	19,74	151,84%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	16,35	583,93%	0,20	1,6	800%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,13	88,06%	5,08	5,01	98,62%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	4,44	82,68%	5,43	3,23	59,48%
5.	Pertumbuhan investasi	%	n/a	n/a	16	-23,25	-145,31%
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	0,89	37,08%	2,60	2,68	103,08%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,8	100,21%	93,8	93,9	100,11%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	75,75	90,18%	84	76,63	91,22%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru yang memiliki target pada tahun 2023 ini adalah 13%, dengan realisasi kinerja tahun 2023 ini adalah 19,74%. Capaian untuk indikator ini menenuhi target yang diharapkan, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya (2022) yaitu 31%, dan di tahun 2021 sebesar 26,34%, dikarenakan adanya bantuan BPUM bagi UMKM di tahun – tahun sebelumnya yang menyebabkan kelonjakan jumlah pendaftar wirausaha baru. Di tahun 2023, realisasi pertumbuhan wirausaha baru masih dapat mencapai target yang diharapkan karena adanya berbagai upaya yang dilakukan seperti kemudahan akses dalam Mengurus NIB, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Mall Pelayanan Publik, GP3D, Gedung Menara Wijaya), dan adanya pendampingan dalam mengurus NIB melalui PLUT.
- 2) Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil, target tahun 2023 sebesar 0,20% dengan realisasi kinerja tahun 2023 ini adalah 1,6%, capaian ini memenuhi target yang di harapkan. Dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya (2022) yaitu 16,35%, memang jauh berbeda namun hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dalam hal ini khususnya berkaitan tentang perubahan Kriteria UMKM berdasarkan besar modal usahanya. Dengan penyesuaian ini pula, dilakukan perubahan/ penyesuaian pada target indikator dalam Renstra Perubahan OPD. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021 yaitu sebesar -0,67% disebabkan karena adanya beberapa pelaku usaha yang mulai bekerja kembali sebagai karyawan pada perusahaan – perusahaan pasca Covid-19.

- 3) Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari -3,50% tahun 2020 sebanyak 9,2 poin menjadi 5,70% tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,57 poin menjadi 4,13%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 5,01%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.B.3.1.1
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar**

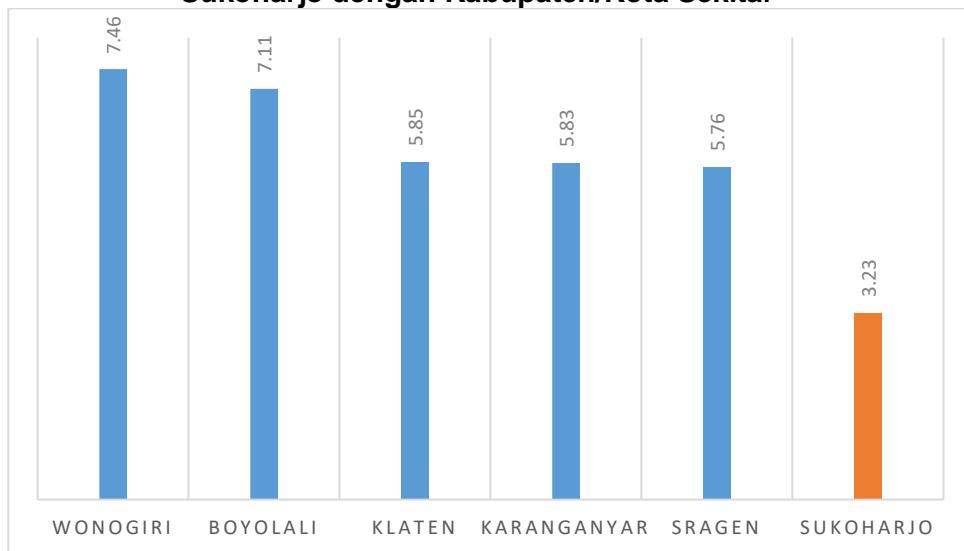


Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di tahun 2023 ini sebesar 5,01%. Angka ini naik jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yang hanya sebesar 4,13%. Jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitarnya, dalam contoh ini dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri yang capaiannya sebesar 4,43%, Kabupaten Klaten sebesar 3,68%, serta Kabupaten Karanganyar sebesar 4,66%, angka capaian PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sudah lebih baik dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai dari 3 (tiga) Kabupaten sekitarnya.

- 4) Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 3,23% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4,44% maka terdapat penurunan realisasi sebesar 1,17%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.B.3.1.2
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,23 dibawah Kabupaten Wonogiri sebesar 7,46; Kabupaten Boyolali sebesar 7,11; Kabupaten Klaten sebesar 5,85; Kabupaten Karanganyar sebesar 5,83; dan Kabupaten Sragen sebesar 5,76.

- 5) Realisasi indikator Pertumbuhan investasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar -23,25% dengan capaian -145,31%. Realisasi tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan tahun 2023 menggunakan data berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Karena Data investasi berdasarkan perizinan OSS masih dalam perencanaan, sedangkan investasi

berdasarkan LKPM, investasi sudah terealisasi/riil yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pertumbuhan investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dikarenakan target yang dijadikan dasar adalah realisasi investasi di tahun sebelumnya, dimana target realisasi investasi Tahun 2022 sebesar 1,1 triliyun, tercapai realisasi investasi sebesar 1,9 triliyun, sedangkan target realisasi investasi tahun 2023 sebesar 2 Triliyun, realisasi investasi sebesar 1,4 triliyun, sehingga pertumbuhan realisasi investasi turun sebesar -23,25%.

Adapun realisasi investasi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagai berikut:

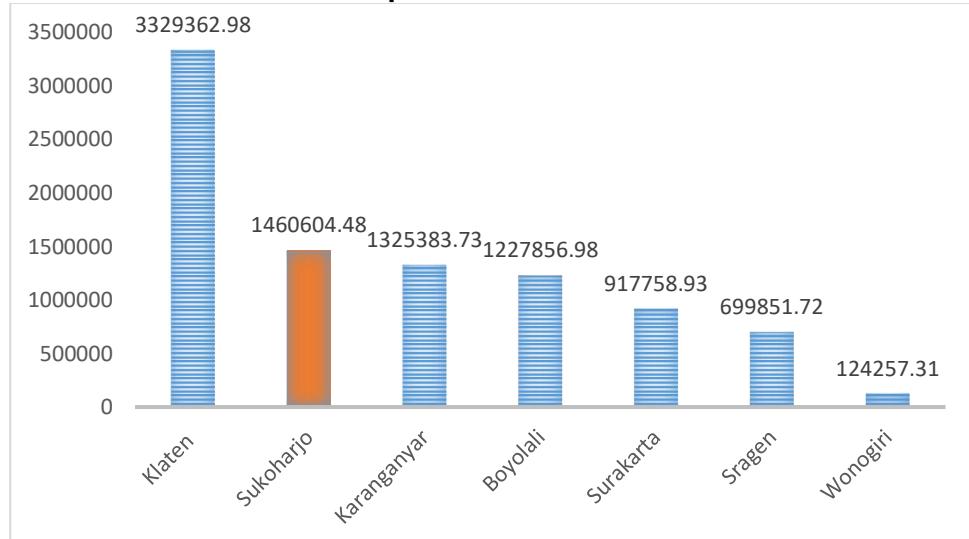
**Gambar III.B.3.1.3
Realisasi Investasi di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan LKPM
Tahun 2021 s.d 2023**



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik diatas, realisasi investasi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar Rp. 895.102.220.000,- kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.903.201.480.000,-. Sementara pada tahun 2023, realisasi investasi di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan menjadi Rp. 1.460.604.480.000,-. Untuk dapat melihat sejauh mana Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.4
Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi investasi Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebesar Rp. 1.460.604.480.000,- jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat dua setelah Kabupaten Klaten dengan realisasi Rp. 3.329.362.980.000,-. Meskipun demikian, realisasi investasi Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.325.383.730.000,- ; Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 1.227.856.980.000,- ; Kota Surakarta sebesar Rp. 917.758.930.000,- ; Kabupaten Sragen sebesar Rp. 699.851.720.000,- ; dan Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 124.257.310.000,-.

- 6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan mengalami peningkatan sebanyak 2,64 poin dari angka 0,94% pada tahun 2020 menjadi 3,58% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 2,69 poin menjadi 0,89%. Sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 2,68%. Pada tahun 2023, pencapaian pertumbuhan PDRB sektor

pertanian mampu melebihi target hal ini ditopang dengan pencapaian rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yang mampu mencapai 53,97% dibandingkan dengan capaian rata-rata tahun 2022 hanya 12,52%.

Prosentase Pertumbuhan produksi di Sektor Pertanian paling besar disumbangkan oleh peningkatan produksi Bawang Merah yaitu mencapai 717,2 Ton (Dinas Pertanian dan Perikanan diolah, 2023) dari yang di targetkan 495,19 Ton. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 222,60 Ton atau 376% dari target. Kemudian disusul oleh Komoditas Cabe yang mengalami peningkatan menjadi 557,1 Ton (Dinas Pertanian dan Perikanan diolah, 2023) dari target awal sebesar 235,94 Ton di Tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 293%. program menanam 200 ribu tanaman cabe di Kabupaten Sukoharjo yang dicanangkan pada akhir tahun 2022, berhasil memberikan manfaat terhadap kenaikan produksi cabe di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 yang pada akhirnya memberikan dampak terkendalinya inflasi di kabupaten Sukoharjo.

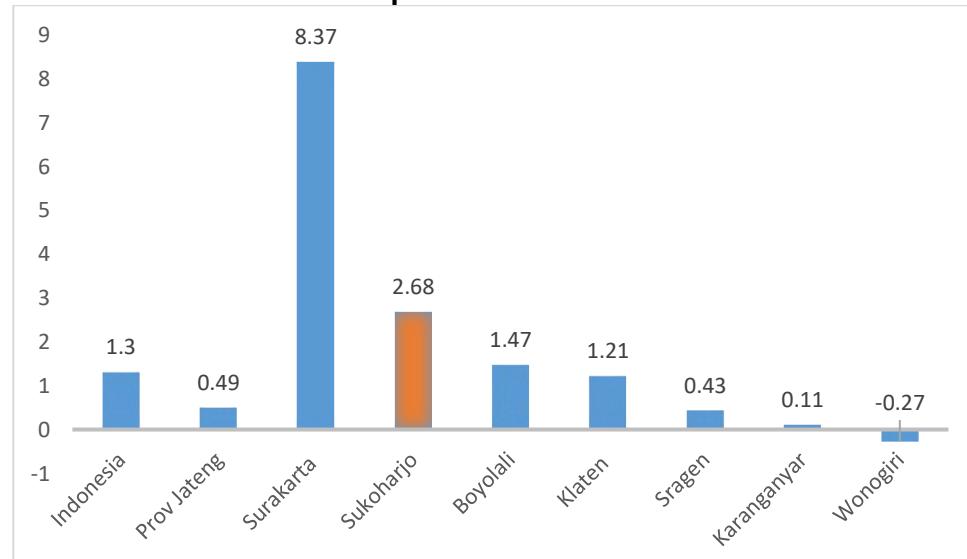
Selain komoditas cabe dan bawang merah, pada tahun 2023 penyumbang ketiga kenaikan terbesar adalah komoditas jagung yang mengalami kenaikan produksi mencapai 17.114 Ton (Dinas Pertanian dan Perikanan diolah, 2023) dari target awal 16.342 Ton atau naik 63.00 %. Adanya bantuan dari pemerintah berupa benih jagung berkualitas tinggi jenis P39 dan P35 yang memberikan produktivitas tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya dan insentif bantuan pupuk, hormon dan zpt.

Komoditas Padi mampu bangkit kembali dari tahun lalu yang tidak mencapai target. Tahun ini kinerja produksi padi mampu meningkat dengan baik sebesar 11,18% lebih tinggi dari target 2023. Realisasi produksi mencapai 360.896 Ton (Dinas Pertanian dan Perikanan

dolah, 2023) dari target 327. 891. Dengan produktivitas mencapai 69,51 Ku/Ha GKG (Dinas Pertanian dan Perikanan diolah, 2023). Komoditas Daging, pada tahun 2023 Produksi daging di Kabupaten Sukoharjo mencapai 15.216,76 Ton melebihi target yaitu 14.091,91 atau 107,98%. Realisasi kualitas daging ASUH mencapai 92,56% dari target kualitas daging ASUH sebesar 92,50%. Tercapainya ini didukung kegiatan pelayanan Kesehatan hewan, vaksinasi, pelayanan NKV dan program SIKOMANDAN serta fasilitasi pemotongan hewan pada waktu hari raya qurban. Pencapaian ini terasa menggembirakan dan banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkup peternakan mulai dari masih adanya pengaruh wabah PMK dari tahun 2022 disusul kasus LSD di Tahun 2023 sehingga membuat kerja keras dalam menghadapi 2 wabah besar untuk mencapai target daging.

Untuk dapat melihat sejauh mana Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.5
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekitar

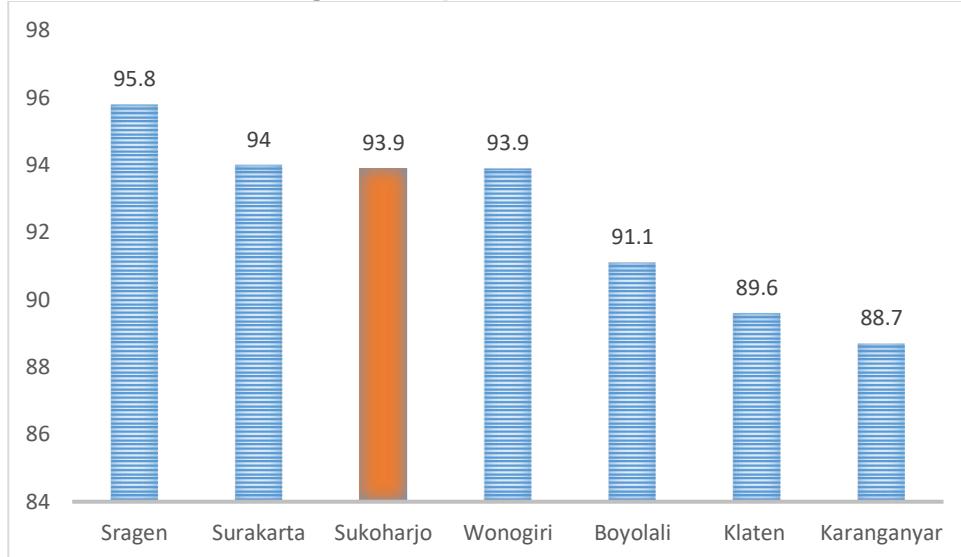


Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar 2,68 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat kedua setelah Kota Surakarta dengan realisasi sebesar 8,37. Meskipun demikian, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri. Selain itu, realisasi Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari realisasi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

- 7) Skor Pola Pangan Harapan memiliki realisasi 93,8% pada tahun 2022 yang kemudian mengalami peningkatan realisasi menjadi 93,9% pada tahun 2023. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Dengan adanya sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat, serta informasi yang semakin mudah diakses melalui media sosial, mendorong semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Sehingga mendorong terwujudnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin meningkat. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.6
Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar



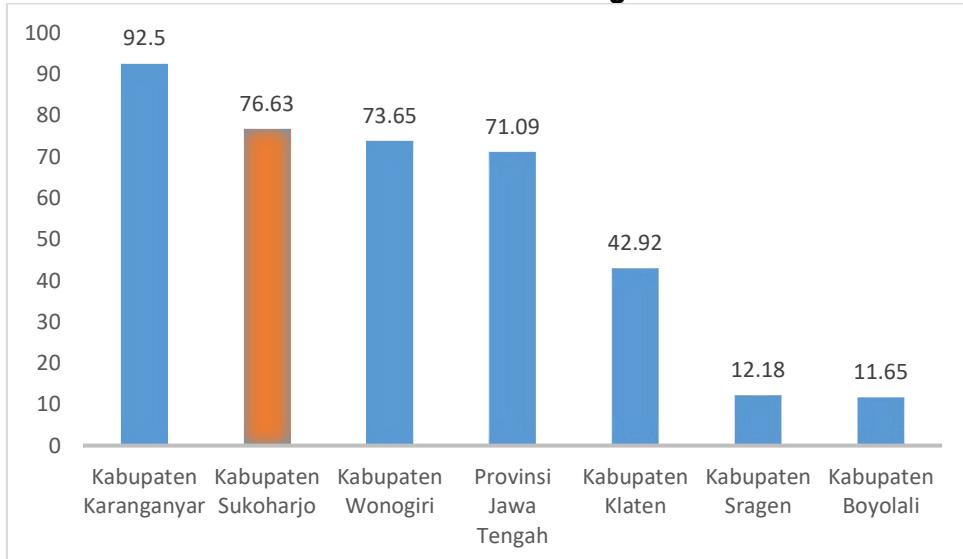
Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo sebesar 93,9% jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Sragen dengan realisasi sebesar 95,8% dan Kota Surakarta dengan realisasi sebesar 94%. Meskipun demikian, Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Boyolali sebesar 91,1%; Kabupaten Klaten sebesar 89,6%; dan Kabupaten Karanganyar sebesar 88,7%.

- 8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota pada tahun 2022 terealisasi 75,75% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 76,63%. Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.B.3.1.7

Perbandingan Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Iain dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 76,63% jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dan provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Sukoharjo berada pada peringkat kedua setelah Kabupaten Karanganyar dengan realisasi sebesar 92,5%. Meskipun demikian, persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kabupaten Wonogiri dengan realisasi sebesar 73,65%; Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,09%; Kabupaten Klaten sebesar 42,92%; Kabupaten Sragen sebesar 12,18%; dan Kabupaten Boyolali sebesar 11,65%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.B.3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD
Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	19,74	16	123,37%
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	1,6	3,70	43,24%
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,01	5,60	89,46%
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	3,23	6,40	50,47%
5.	Pertumbuhan investasi	%	-23,25	28	-83,03%
6.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	2,68	3,10	86,45%
7.	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,9	93,9	100%
8.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	76,63	85,00	84,38%
Rata-rata capaian kinerja					62,5%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 3.1 adalah 62,5%. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru memperoleh realisasi sebesar 19,74% dari target akhir RPJMD sebesar 16% sehingga capaianya telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 123,37%.
- 2) Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil memperoleh realisasi sebesar 1,60% dari target akhir RPJMD sebesar 3,70% sehingga capaianya telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 43,24%.
- 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memperoleh realisasi sebesar 5,01% dari target akhir RPJMD sebesar 5,60% sehingga capaian terhadap target akhir sebesar 89,46% dan telah melampaui target akhir RPJMD.

- 4) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri memperoleh realisasi 3,23% dari target akhir RPJMD sebesar 6,4% sehingga capaian yang diperoleh baru 50,47%.
- 5) Pertumbuhan investasi memperoleh realisasi sebesar -23,55% dari target akhir RPJMD sebesar 28% sehingga capaiannya terhadap target akhir RPJMD sebesar -83,03%.
- 6) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan memperoleh realisasi sebesar 2,68% dari target akhir RPJMD sebesar 3,10% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 86,45%.
- 7) Skor Pola Pangan Harapan memperoleh realisasi sebesar 93,9% dari target akhir RPJMD sebesar 93,9% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%.
- 8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota memperoleh realisasi sebesar 71,72% dari target akhir RPJMD sebesar 85% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 84,38%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.3.1.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.1**

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	157,38%	Rp. 42.442.578.382	Rp. 40.618.806.164	0,07

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 3.1 sebesar 157,38% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.442.578.382,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.618.806.164,- sehingga efisiensinya sebesar 0,07%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3.1, melalui:

- 1) Pertumbuhan Wirausaha Baru dilaksanakan pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 993.500.000,- dengan realisasinya Rp 984.047.626,- atau 99,05%.
- 2) Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dan Program Pengembangan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 407.000.000,- dan Realisasinya Rp 393.797.262,- atau 96,76%.
- 3) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dilaksanakan pada Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.756.798.429,- dan realisasinya Rp 11.867.988.405,- atau 93,03%.
- 4) Pertumbuhan PDRB sektor industri dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 515.533.200,- terealisasi Rp. 499.182.360,- atau (96,83%);
 - b) Program pengendalian izin usaha industri dengan anggaran Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 46.534.000,- atau (93,07%);
 - c) Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan anggaran Rp. 108.520.000,- terealisasi Rp. 100.390.524,- atau (92,51%).

- 5) Pertumbuhan Investasi dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.438.720,- atau 97,67%;
 - b) Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.894.010,- atau 99,87%;
 - c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 357.347.000,- atau 93,20%; .
 - d) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 363.007.000,- atau 99,45%
 - e) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.349.500,- atau 98,70%.
- 6) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.713.085.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.694.054.053,- atau 98,89%.
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.620.697.000,- dan realisasi sebesar Rp 9.304.096.405,- atau 96,71%.
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan alokasi anggaran sebesar Rp 823.618.677,- dan terealisasi sebesar Rp 799.351.919,- atau 97,05 %.

- d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 929.999.850,- dan terealisasi sebesar Rp 917.848.799,- atau 98,69%.
 - e) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.999.000,- dan terealisasi sebesar Rp 41.988.500,- atau 99,97%.
 - f) Program Penyuluhan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.816.412.950,- dan terealisasi sebesar Rp 3.696.687.161,- atau 96,86%.
 - g) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp 179.235.000,- dan terealisasi sebesar Rp 177.901.950,- atau 99,26 %.
 - h) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.742.301.776,- dan terealisasi sebesar Rp 2.693.725.179,- atau 98,23%.
 - i) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 15.999.700,- atau 99,99%.
 - j) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 260.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 259.470.840,- atau 99,68%.
- 7) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dilaksanakan pada program berikut:
- a) Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 490.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 484.966.650,- atau tercapai 98,88%;
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 1.761.011.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.751.909.716,- atau tercapai 99,48%;

- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 187.105.000,- atau tercapai 99,14%;
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 71.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.663.500,- atau tercapai 99,67%;
 - e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.641.536.500,- terealisasi sebesar Rp. 3.354.107.473,- atau tercapai 92,11%.
- 8) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota dilaksanakan pada Program penempatan tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp 320.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp 313.952.912,- atau tercapai 97,94% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.607.088 atau 2,06%.

b. Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa.

Pencapaian kinerja pada sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2022	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7456	0,7698	103,25%	0,7410	100,55%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 3.2**, yaitu: Meningkatnya kemandirian desa, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) terealisasi pada tahun 2023 sebesar 0,7698 dari

target 0,7456. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **103,25%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel III.B.3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7410	100,73%	0,7356	0,7698	103,25%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022 adalah 0,7410 dengan capaian 100,73%. Terdapat kenaikan pada tahun 2023 dimana realisasinya menjadi 0,7698 dengan capaian 103,25%. Dari nilai IDM tersebut, maka secara rata- rata strata perkembangan desa di Kabupaten Sukoharjo adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Meskipun sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah kedepan untuk menjadikan desa-desa di Kabupaten Sukoharjo menjadi desa yang maju, adil dan makmur, maka di tahun selanjutnya perlu adanya inovasi program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar agar bisa mempercepat perkembangan status desa menjadi desa yang maju atau bahkan mandiri.

Unsur yang berperan dalam pencapaian target IDM yaitu:

- 1) Ketersediaan data yang lengkap dalam rangka pengisian indikator dalam aplikasi IDM.
- 2) Pembinaan dan pendampingan kepada Admin Sistem Informasi Desa (SID) dalam penyusunan profil desa.
- 3) Pendampingan dalam penyusunan APBDes dan pengelolaan Keuangan Desa.

- 4) Memfasilitasi desa dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat, pendampingan kelompok usaha efektifitas BUMDesa dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM/Perangkat Desa.
- 2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari Pemerintah Desa, dengan asumsi bahwa dengan adanya kenaikan status desa kurang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Pelatihan bagi Admin IDM.
- 2) Sosialisasi kepada Kepala Desa tentang pemahaman arti pentingnya kenaikan status desa.
- 3) Membuat inovasi dari aplikasi IDM dengan aplikasi baru yang sudah dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Sukoharjo yang diberi nama PIDEKSO. Yang mana sudah terbukti beberapa tahun yang lalu sudah digunakan oleh desa-desa untuk memasukan data-data yang sudah ada supaya mempermudah dalam menghitung capaian kinerja yang bisa mempermudah penghitungan IDM.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut ini:

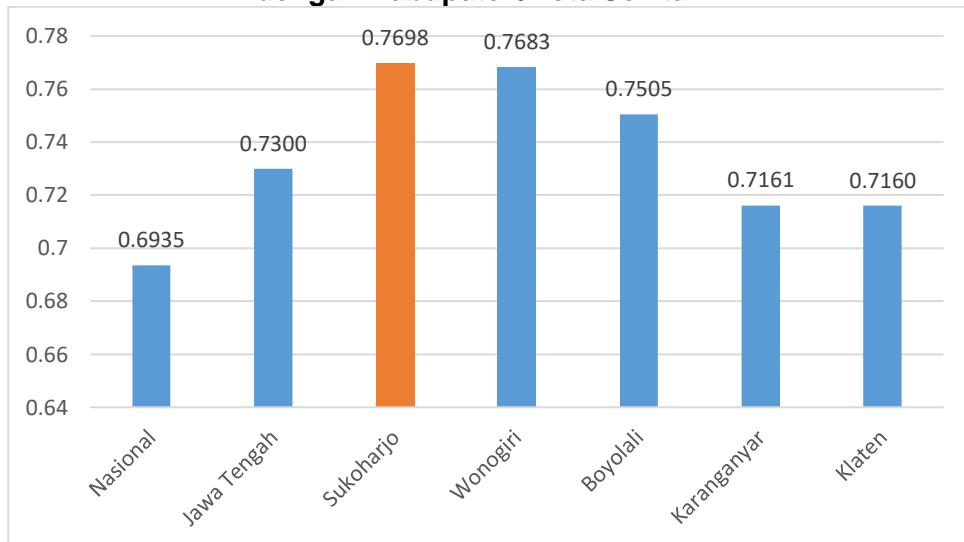
**Tabel III.B.3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target RPJMD
Sasaran 3.2 Meningkatnya kemandirian desa**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7698	0,7656	100,55%

Realisasi kinerja indikator Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7698 pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,7656 maka capaiannya adalah 100,55%. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Sukoharjo di Tahun 2023 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 16 Desa; Desa Maju : 100 Desa dan Desa Mandiri : 34 Desa.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.B.3.2.1
Perbandingan Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar**



Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Desa Membangun Kabupaten Sukoharjo senilai 0,7698 melebihi rata-rata nasional senilai 0,6935 , rata-rata Jawa Tengah dengan nilai 0,7300 dan melebihi Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Wonogiri dengan nilai 0,7683, Kabupaten Boyolali dengan nilai 0,7505, Kabupaten Karanganyar dengan nilai 0,7161 dan Kabupaten Klaten dengan nilai 0,7160.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.B.3.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.2**

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kemandirian desa	103,25%	Rp. 16.596.116.880	Rp. 15.912.897.227	7,37

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 3.2 sebesar 103,25% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.596.116.880,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.912.897.227,- sehingga efisiensinya sebesar 7,37%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3.2, melalui:

- 1) Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.743.749.880,- terealisasi sebesar Rp. 4.292.038.784,- atau 90,48%.
- 2) Program Penataan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.598.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.587.529.200,- atau 99,58%.
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 428.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 408.728.693,- atau 95,49%.
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.403.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.214.496.900,- atau 94,46%.
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.422.857.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.410.103.650,- atau 99,76%.

4) Tujuan keempat : Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.4
Capaian Kinerja Tujuan 4
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

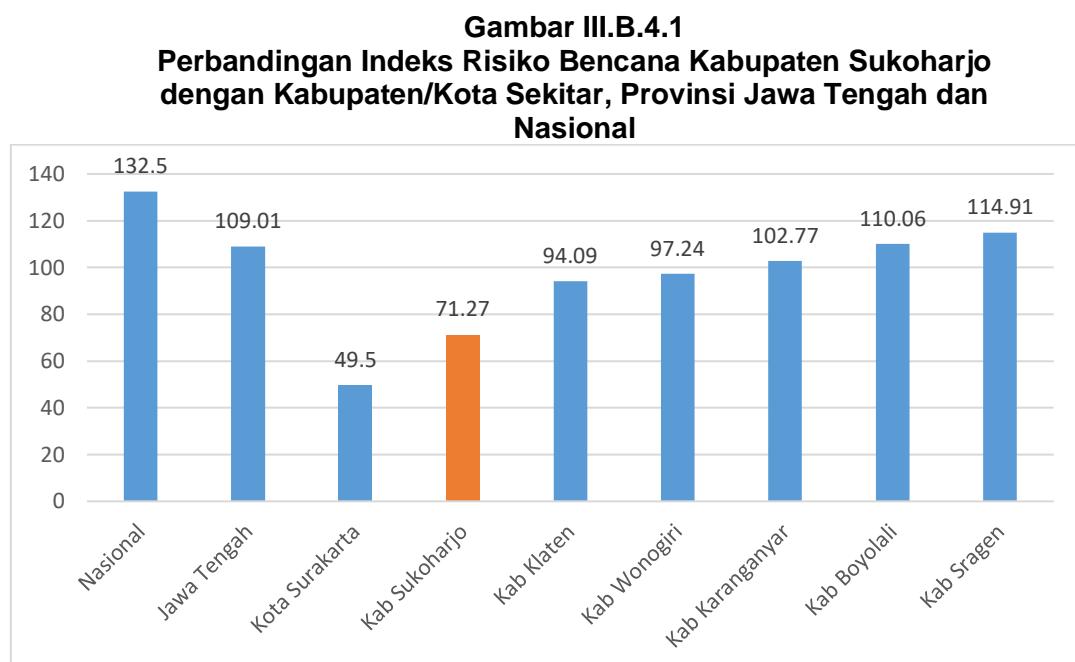
No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	65,12	67,69	103,95%	65,49	91,23%
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,22	62,03	101,32%	61,44	100,85%
3.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	92,70	71,27	123,12%	81,29	122,53%
Rata-rata Capaian					109,46%		104,87%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 4, yaitu Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dari 3 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja tujuan mencapai **109,46%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Peningkatan indeks pembangunan infrastruktur adalah ukuran yang mengindikasikan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur suatu negara atau wilayah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai faktor seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nilai indeks pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 67,69 dari target 65,12% dengan capaian 103,94%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan nilai pembangunan infrastruktur yang berhasil dicapai pada angka 3,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan indeks pembangunan infrastruktur yang signifikan dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena infrastruktur yang baik memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti transportasi, air bersih, dan energi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan luasan tutupan lahan. IKLH dihitung dengan prosentase kontribusi masing-masing indikator. Realisasi IKLH Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 62,03 dengan capaian 101,32%. Apabila dibandingkan dengan penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2026, maka realisasi IKLH selalu di atas target. Sementara apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaianya adalah 100,85%.

Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, nilai IRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah 71,27 atau masuk ke kelas risiko sedang. Jika dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2022 (81,29), maka nilai IRB Kabupaten Sukoharjo turun sebesar 10,02 poin di tahun 2023. Upaya mengurangi risiko bencana mampu dilaksanakan melalui implementasi pada fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan telah dilaksanakan secara lintas sektor. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan yang lebih mendukung pada program penanggulangan bencana.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukoharjo sebesar 71,27 lebih tinggi dari Kota Surakarta sebesar 49,5. Meskipun demikian, Indeks Risiko Bencana Kabupaten lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 132,5; Provinsi Jawa Tengah sebesar 109,01; Kabupaten Klaten sebesar 94,09; Kabupaten Wonogiri sebesar 97,24; Kabupaten Karanganyar sebesar 102,77; Kabupaten Boyolali sebesar 110,06; dan Kabupaten Sragen 114,91.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran, yaitu:

a. Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.

Pencapaian kinerja sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2022	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	81,65	88,57	108,48%	85,30	97,53%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	68,10	67,55	99,19%	63,38	94,63%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,260	0,047	181,92%	0,059	181,2%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	68	100	147,06%	59	100%
Rata-rata Capaian					134,16%		118,34%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.1, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur, diperoleh rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **134,16%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.1 dapat dilihat bahwa:

- 1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak merupakan indikator kumulatif dimana realisasi sampai dengan tahun 2023 berjumlah 88,57% dari target 81,65%. Capaian untuk indikator ini adalah 108,48% dari target yang diharapkan.
- 2) Indeks Layanan Infrastruktur pada tahun 2023 memiliki target 68,10 dengan realisasi 67,55. Capaian untuk indikator ini telah mencapai 99,19% dari target yang diharapkan.
- 3) Indek Fatalitas pada tahun 2023 memiliki target 0,260 dengan realisasi 0,047. Capaian untuk indikator ini adalah 181,92% telah melebihi target yang diharapkan.
- 4) Cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2023 memiliki target 68% dengan realisasi 100%. Capaian untuk indikator ini adalah 134,15% telah melebihi target yang diharapkan.

Sedangkan untuk perbandingan pencapaian Sasaran 4.1 tahun 2022 dan tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.4.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	85,30	108,54%	81,65	88,57	108,48%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	63,38	92,72%	68,10	67,55	99,19%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,059	177,74%	0,260	0,047	181,92%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	59	101,72%	68	100	134,15%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak memiliki realisasi 85,30% pada tahun 2022 dan terjadi kenaikan menjadi 88,57% pada tahun 2023.
- 2) Indeks Layanan Infrastruktur memiliki realisasi 63,38 pada tahun 2022 dan terjadi peningkatan realisasi menjadi 67,55 pada tahun 2023. Indeks Layanan Infrastruktur didukung oleh 6 (enam) indikator yaitu akses air minum yang layak, akses layanan sanitasi, rasio jaringan irigasi, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, rasio bangunan sesuai ketentuan, dan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.4.1.3
Capaian Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Bobot	2022		2023			
				Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	% Capaian
1.	Akses air minum yang layak	%	20%	83,63	16,726	93,79	93,83	18,766	100,04
2.	Akses layanan sanitasi	%	20%	86,62	17,324	95,99	93,61	18,722	97,52
3.	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	15%	46,08	6,912	50	50	7,5	100
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	10%	6,53	0,653	7,03	6,64	0,664	94,45
5.	Rasio bangunan sesuai ketentuan	%	15%	25,92	3,888	26,3	26,48	3,972	100,68

No	Indikator	Satuan	Bobot	2022		2023			
				Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	% Capaian
6.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	20%	89,36	17,872	88,25	89,64	17,928	101,58
	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	100%		63,38			67,55	

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat dua indikator indeks layanan infrastruktur yang memiliki capaian kurang dari 100% sebagai berikut:

- a) Akses layanan sanitasi.

Akses layanan sanitasi pada tahun 2023 terealisasi 93,61% dari target 95,99%. Adapun penyebab tidak tercapainya target yaitu:

- i. Tidak semua lokasi di Kabupaten Sukoharjo memenuhi standar/ kriteria pembangunan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah). Hal tersebut terkait dengan beberapa hal, diantaranya:
 - Ketersediaan lahan untuk dibangun IPAL (aset/ kepemilikan lahan);
 - Kondisi geografis dan topografi yang memungkinkan untuk dibangun SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) atau IPAL Skala Pemukiman (diantaranya tidak dekat dengan badan air yang airnya selalu mengalir dan kemiringan lahan yang diharapkan posisi IPAL pada daerah yang lebih rendah dari daerah layanan);
 - Kesiapan dan minat masyarakat terhadap pembangunan SPALD-T atau IPAL Skala Permukiman (kesiapan dan minat masyarakat juga menentukan keberhasilan pembangunan);

- ii. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah domestik dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- iii. Kondisi septictank yang terbangun tidak dapat dipastikan sudah aman/kedap.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala di atas diantaranya:

- i. Melakukan survei lokasi yang direncanakan dibangun SPALD-T yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - ii. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SPALD-T dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat terealisasi 6,64 % dari target 7,03%. Adapun penyebab tidak tercapainya target adalah adanya penyesuaian jenis kontruksi saluran drainase dengan kondisi di lapangan. Pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tertuang keterangan kegiatan berupa Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan lebar 0,5 meter kedalaman 0,5 meter, sementara dalam pelaksanaan menggunakan u-ditch tertutup dan box culvert yang memiliki harga satuan (indeks harga) lebih tinggi sehingga panjang saluran drainase yang terbangun menjadi berkurang. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasai kendala tersebut yaitu melakukan penyesuaian jenis barang dan harga satuan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

- 3) Indeks Fatalitas memiliki realisasi 0,059 pada tahun 2022 yang kemudian mengalami penurunan realisasi menjadi 0,047 pada tahun 2023. Secara kualitas Indeks Fatalitas di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,411 dari 0,059

menjadi 0,047. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi capaian tersebut diantaranya tersedianya prasarana perlengkapan jalan, tersedianya sarana perlengkapan jalan, dan terlaksananya sosialisasi keselamatan kepada masyarakat.

- 4) Pada indikator Kinerja Cakupan Layanan Telekomunikasi, nilai cakupan yang telah dicapai pada tahun 2022 adalah 59%. Pada tahun 2023 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 68%. Peningkatan capaian tersebut dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik. Cakupan layanan Telekomunikasi ini adalah jumlah titik layanan telekomunikasi internet dan intranet berbasis fiber optik pada titik yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diantaranya layanan CCTV, titik fiber optik Perangkat Daerah, Fasilitas umum dan Puskesmas.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel III.B.4.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	88,57	90,81	97,53%
2.	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	67,55	71,38	94,63%
3.	Indeks Fatalitas	Angka	0,047	0,250	181,2%
4.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100%
Rata-rata Capaian					118,34%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 4.1 adalah **110,32%**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Prosentase Lingkungan Hunian Layak memperoleh realisasi sebesar 88,57% dari target akhir RPJMD sebesar 90,81% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 97,53%. Untuk diketahui tahun 2023 Rumah Layak Huni yang ditangani sebanyak 1.653 unit dimana rincian sumber dananya termuat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.1.5
Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023

Sumber Dana	Unit	Rupiah	Total
APBD	200	15.000.000	3.000.000.000
Bantuan Keuangan	386	20.000.000	7.720.000.000
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	967	20.000.000	19.340.000.000
<i>Corporate Social Responsibility</i>	100	15.000.000	1.500.000.000
Jumlah	1.653		31.560.000.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sukoharjo

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 200 unit bersumber dari APBD, 386 unit bersumber dari Bantuan Keuangan, 967 unit bersumber dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan 100 unit bersumber dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- 2) Indeks Layanan Infrastruktur memperoleh realisasi sebesar 67,55 dari target akhir RPJMD sebesar 71,38 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 94,63%.
- 3) Indeks Fatalitas memperoleh realisasi sebesar 0,047 dari target akhir RPJMD sebesar 0,250 sehingga capaiannya 181,2% dan telah melebihi target akhir RPJMD.

- 4) Cakupan layanan telekomunikasi memperoleh realisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD sebesar 100% sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.1.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	134,16%	Rp. 166.751.908.259	Rp. 152.122.207.544	0,30

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 4.1 sebesar 134,16% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.751.908.259,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.122.207.544,- sehingga efisiensinya sebesar 0,30%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.1, melalui:

1. Prosentase Lingkungan Hunian Layak dilaksanakan pada program berikut:
 - a) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 999.955.790,- atau tercapai 99,51%;
 - b) Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 708.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 675.220.737,- atau tercapai 95,37%;
 - c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.753.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.751.529.534,- atau tercapai 99,94%;
 - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.491.607.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.471.467.500,- atau tercapai 98,65%;

- e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.423.225.500,- terealisasi sebesar Rp. 5.035.156.593,- atau tercapai 92,84%.
2. Indeks Layanan Infrastruktur dilaksanakan pada program berikut:
- a) Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.145.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.409.059.200,- atau tercapai 82,25%;
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 987.289.400,- dan terealisasi sebesar Rp 842.531.810,- atau tercapai 85,34%;
 - c) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.200.306.600,- dan terealisasi sebesar Rp 6.280.324.111,- atau tercapai 87,22%;
 - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.036.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.002.390.250,- atau tercapai 96,70%;
 - e) Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.486.537.646,- dan terealisasi sebesar Rp 7.218.044.400,- atau tercapai 76,09%;
 - f) Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85.695.533.215,- dan realisasi sebesar Rp 76.346.842.544,- atau tercapai 89,09%.
3. Indeks Fatalitas dilaksanakan pada program berikut:
- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.149.017.288,- dan terealisasi sebesar Rp 39.478.547.163,- atau tercapai 98,33%;

- b) Program Pengelolaan Perekeretaapian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 842.579.400,- dan terealisasi sebesar Rp 798.155.290,- atau tercapai 94,73%.
4. Cakupan layanan telekomunikasi dilaksanakan pada Program Aplikasi Informatika melalui Kegiatan:
- a) Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.895.655.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.883.424.130,- atau tercapai 99,69%.
 - b) Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 931.732.210,- dan terealisasi sebesar Rp. 929.558.492,- atau tercapai 99,76%. Adapun Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan pusat data pemerintah daerah dan sub kegiatan Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.

b. Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan.

Pencapaian kinerja sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan, tercermin pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.B.4.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2022	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	50,75	52,79	104,02%	50,87	102,50%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,24	87,32	99,90%	87,26	99,93%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,09	31,14	100,16%	31,84	100,13%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,35	0,63	180%	0,56	126%
Rata-rata Capaian					121,02%		107,14%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 4.2**, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **121,02%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun hasil pengukuran kinerja Sasaran 4.2 dapat dilihat bahwa:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA) terealisasi 52,79 pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 104,02%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 102,50%.
- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi 87,32 pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 99,90%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 99,93% dan telah melebihi target.
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terealisasi 31,14 pada tahun 2023 dengan capaian 100,16%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 100,13%.
- 4) Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 terealisasi 0,63 dengan capaian 180%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya sebesar 126% dan telah melebihi target.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.4.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	50,87	100,73%	50,75	52,79	104,02%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,26	99,96%	87,24	87,32	99,90%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,84	102,41%	31,09	31,14	100,16%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,56	172,31%	0,35	0,63	180%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

1) Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 adalah 50,87 dengan capaian 100,73%, kemudian pada tahun 2023 terealisasi 52,79 dengan capaian 104,02%. Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar 1,92. Kenaikan Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan antara lain:

- a) Menurunkan beban pencemaran melalui pemantauan kualitas badan air sungai
- b) Memperketat ijin pembuangan air limbah bagi kegiatan usaha yang berada di sekitar sungai
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Selain itu pada tahun ini hasil kualitas air sungai yang dipantau tidak ada yang termasuk ke dalam kategori tercemar sedang dan berat.

2) Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 adalah 87,26 dengan capaian 99,96%, kemudian pada tahun 2023 terealisasi sebesar 87,32 dengan capaian 99,90%. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,06. Namun peningkatan tersebut tidak terjadi secara signifikan. Kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh kegiatan dari sektor transportasi, industry, permukiman dan perkantoran/perniagaan. Hal ini karena kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan bahan bakar yang dapat mempengaruhi kualitas udara antara lain senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat.

Pada tahun 2023, data kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo didapatkan dari pemantauan di 4 (empat) titik lokasi yang mewakili area padat lalu lintas kendaraan bermotor/transportasi, industry, permukiman dan perkantoran/perniagaan. Setiap titik lokasi dilakukan dua kali periode pemantauan dengan menggunakan metode *passive sampler* selama 14x24 jam (14 hari) untuk setiap periode pemantauan, sehingga diperoleh data

sebanyak 8 data. Periode I dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2023 dan periode II dilakukan pada bulan September – Oktober 2023. Selain itu, pada tahun 2023 ini DLH Kabupaten Sukoharjo juga melakukan pemantauan udara ambien menggunakan metode *passive sampler* pada bulan Juli 2023 pada titik perumahan (Perum Jombor Permai, Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari) dan titik transportasi (Fave Hotel Solo Baru, Kecamatan Grogol), serta pada bulan Oktober 2024 pada titik transportasi (Jalan Adi Sumarmo, Kecamatan kartasura), titik transportasi (Fave Hotel Solo Baru, Kecamatan Grogol), titik perumahan (Perum Jombor Permai, Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari) dan titik perkantoran (Kantor Bupati Sukoharjo, Kecamatan Bendosari) sehingga total data yang diperoleh sejumlah 14 data hasil uji.

Pada tahun 2022 nilai IKU mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,18. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan kualitas. Adapun penyebab dari penurunan kualitas udara tersebut yaitu karena mobilitas masyarakat mulai kembali normal setelah sebelumnya dibatasi pada masa pandemi COVID19.

- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2023 mendapatkan nilai 31,14. Nilai ini turun dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022 yang mendapatkan nilai 31,84. Hal ini disebabkan karena luas hutan rakyat mengalami penambahan pada tahun 2023, karena pada tahun 2022 terdapat kawasan hutan yang belum teridentifikasi termasuk ke dalam hutan Negara atau hutan rakyat. Pada tahun 2023 ini, batasan hutan tersebut sudah dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan secara jelas pembagiannya antara batas hutan Negara dan batas hutan rakyat. Pada tahun 2023 ini terdapat perubahan metode perhitungan untuk hutan rakyat dari yang sebelumnya menggunakan pengali 1 (satu) menjadi 0,6 sehingga nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan.

- 4) Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2022 terealisasi 0,56 dengan capaian 172,31%, kemudian pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,63 dengan capaian 180%. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,07 dengan kenaikan capaian sebesar 7,69%. Hal ini disebabkan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penanggulangan bencana sudah mulai terbuka dan sinergi, serta masyarakat sudah menyadari pentingnya edukasi dan wawasan kebencanaan sehingga peningkatan kapasitas SDM perlu ditingkatkan.

Sedangkan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

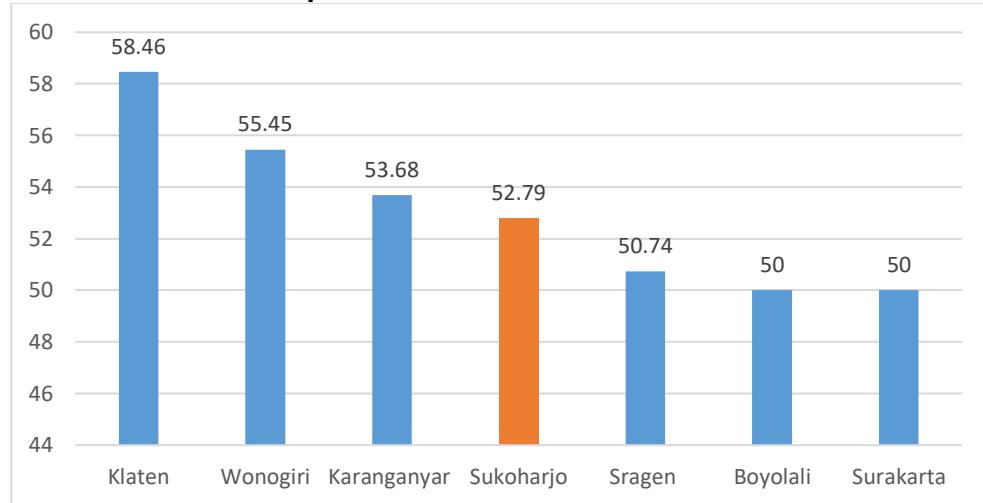
Tabel III.B.4.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran 4.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd.Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	52,79	51,50	102,50%
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,32	87,25	99,93%
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,14	31,10	100,13%
4.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,63	0,5	126%
Rata-rata Capaian					107,14%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata capaian sasaran 4.2 adalah 107,14%. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA) memperoleh realisasi sebesar 52,79 dari target akhir RPJMD sebesar 51,50 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 102,50%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.1
Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023

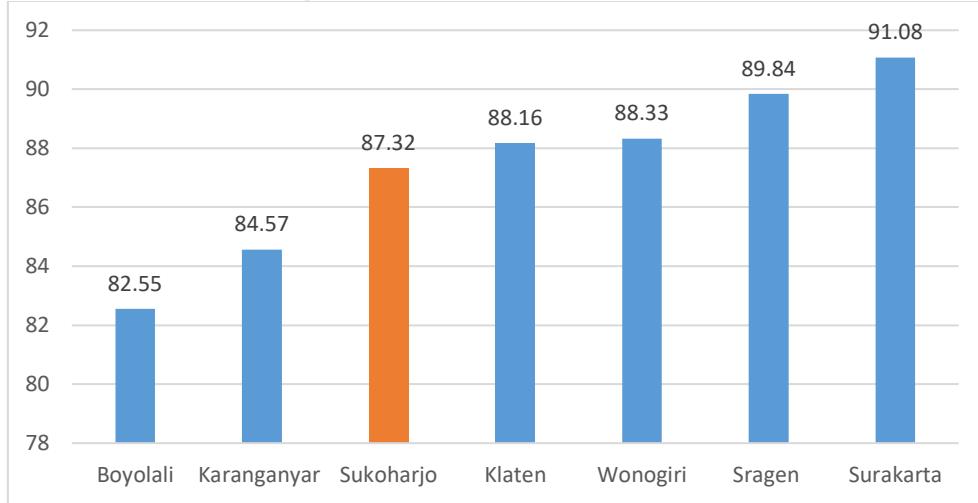


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sukoharjo sebesar 52,79 lebih kecil dari realisasi Kabupaten Klaten sebesar 58,46; Kabupaten Wonogiri sebesar 55,45; dan Kabupaten Karanganyar sebesar 53,68. Meskipun demikian, IKA Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari IKA Kabupaten Sragen sebesar 50,74; Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta sebesar 50.

- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) memperoleh realisasi sebesar 87,32 dari target akhir RPJMD sebesar 87,25 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,93%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

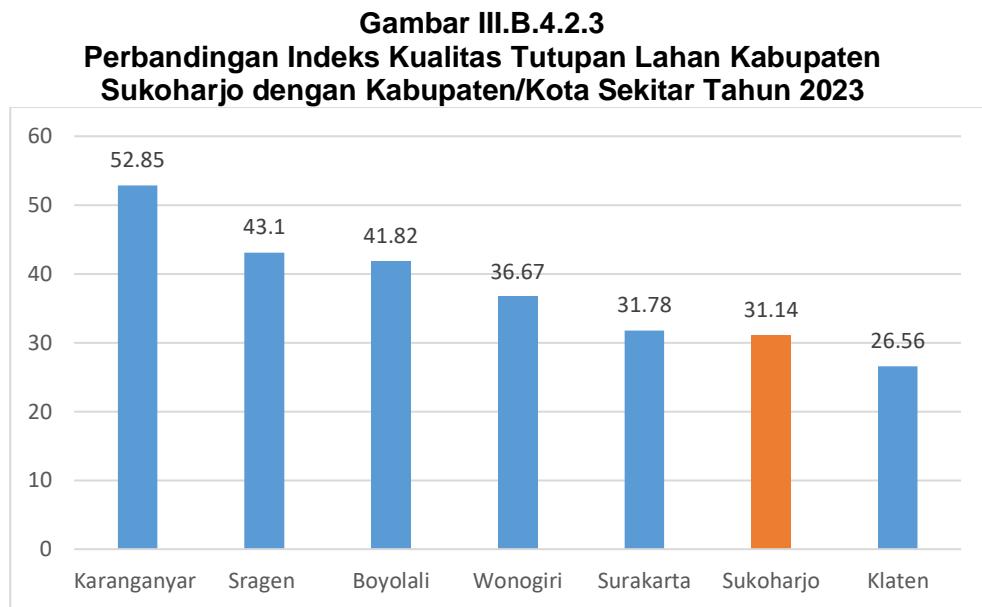
Gambar III.B.4.2.2
Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sukoharjo sebesar 87,32 lebih kecil dari realisasi IKU Kabupaten Boyolali sebesar 82,55; dan Kabupaten Karanganyar sebesar 84,57. Meskipun demikian, IKU Kabupaten Sukoharjo masih lebih tinggi dari Kabupaten Klaten dengan realisasi sebesar 88,16; Kabupaten Wonogiri sebesar 88,33; Kabupaten Sragen sebesar 89,84; dan Kota Surakarta sebesar 91,08.

- 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memperoleh realisasi sebesar 31,14 dari target akhir RPJMD sebesar 31,10 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 100,13%. Apabila realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

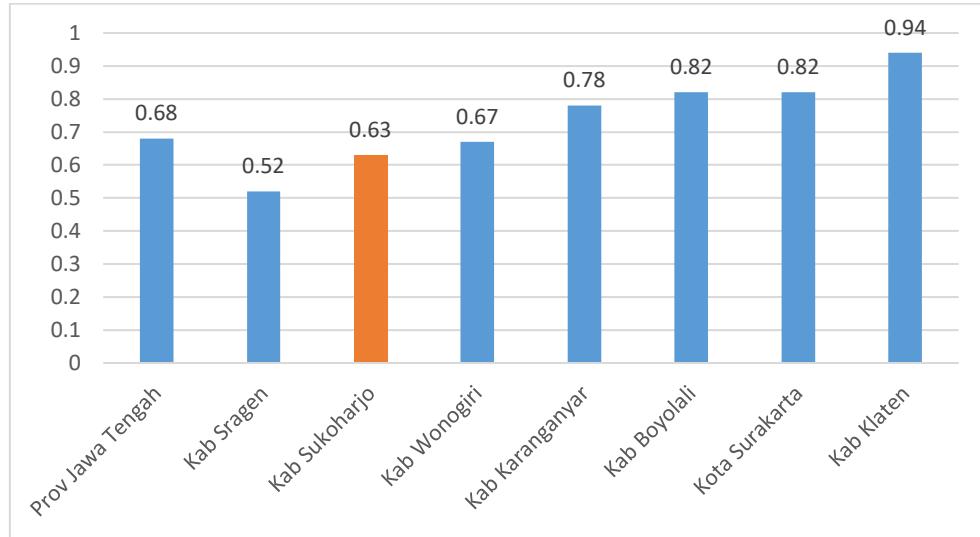


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sukoharjo sebesar 31,14 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka Kabupaten Sukoharjo hanya lebih besar dari Kabupaten Klaten dengan realisasi sebesar 26,56.

- 4) Indeks Ketahanan Daerah memperoleh realisasi sebesar 0,63 dari target akhir RPJMD sebesar 0,5 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 126%. Apabila realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III.B.4.2.4
Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,63 melebihi realisasi Kabupaten Sragen sebesar 0,52. Meskipun demikian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo lebih kecil dari Kabupaten Wonogiri sebesar 0,67; Kabupaten Karanganyar 0,78; Kabupaten Boyolali sebesar 0,82; Kota Surakarta sebesar 0,82; dan Kabupaten Klaten sebesar 0,94.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.4.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	121,02%	Rp. 8.666.810.050	Rp. 8.296.788.928	0,31

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 4.2 sebesar 121,02% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.666.810.050,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.296.788.928,- sehingga efisiensinya sebesar 0,31%.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.2 bersumber dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.030.500,- atau 96,86%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 743.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 729.659.757,- atau 98,15%.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melalui Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.060.359.650,- terealisasi sebesar Rp. 4.906.219.485,- atau 96,95%;
4. Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 902.213.400,- terealisasi sebesar Rp. 880.746.978,- atau 97,62%; Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.944.237.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.764.132.208,- atau 90,74%.

5) Tujuan kelima : Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2023, maka pencapaian kinerja untuk tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.5
Capaian Kinerja Tujuan 5
Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2023			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
				Realisasi	Capaian	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	87,23	88,70	101,69%	87,37	100,23%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan 5, yaitu Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, capaian kinerja tujuan mencapai **101,69%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum dari target sebesar 88,70 realisasinya 87,50 atau capaiannya sebesar 101,69%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya telah mencapai 100,23%.

Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum merupakan indikator Tujuan yang merupakan penjumlahan dari indikator penegakan Perda/Perkada, Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas dan Angka Kriminalitas yang tertangani. Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan data pada tabel di bawah ini:

Tabel III.B.5.1
Realisasi Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase Penegakan PERDA	97,40	97,82
2.	Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	98,30	98,33
3.	Angka Kriminalitas yang tertangani	66,00	69,95
	Rata-rata	87,23	88,70

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Persentase Penegakan PERDA terealisasi sebesar 97,82 dari target 97,40; Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas terealisasi sebesar 98,33 dari target 98,30; dan Angka Kriminalitas yang tertangani terealisasi sebesar 69,95 dari target 66,00 Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum diperoleh dari rata-rata ketiga indikator tersebut, sehingga realisasinya sebesar 88,70 pada tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu:

a. Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pencapaian kinerja pada sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2021	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,11	91,24	100,14%	90,83	99,28%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 5.1, yaitu Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terealisasi pada tahun 2023 sebesar 91,24% dari target 91,11%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **100,14%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk indikator ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.A.5.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90,83	100,12%	91,11	91,24	100,14%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki realisasi 90,83 pada tahun 2022 dan terjadi peningkatan realisasi menjadi 91,11 pada tahun 2023. Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan indikator Sasaran yang merupakan penjumlahan dan pembobotan dari indikator penegakan Perda/Perkada, penanganan gangguan Trantibum/ penyelesaian pelanggaran K3, dan persentase satlinmas terlatih serta cakupan pelayanan bencana kebakaran, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.1.3
Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	97,40	96,82
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3)	98,30	98,33
3.	Prosentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) terlatih	56	56
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	95,40	95,40
Rata-rata		91,11	91,24

Sumber : Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

Pencapaian kinerja tersebut dapat sesuai dengan target karena didukung oleh SDM dan Sarana Prasarana yang memadai, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral yang harmonis dan peran serta partisipasi masyarakat yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	91,24	91,90	99,28%

Berdasarkan tabel di atas, Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memperoleh realisasi 91,24 dari target akhir RPJMD sebesar 91,90 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,28%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.5.1.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.1

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100,14%	Rp. 20.188.853.056	Rp. 19.353.370.087	4,28

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 5.1 sebesar 100,14% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.188.853.056,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.353.370.087,- sehingga efisiensinya sebesar 4,28%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.1 yaitu:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.686.137.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.452.932.380,- atau 97,32% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 233.204.620,- atau 2,68%.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.922.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.909.541.610,- atau 97,88% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 41.380.390,- atau 2,12%.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (P1) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.551.794.056,- terealisasi sebesar Rp. 8.990.896.097,- atau 94,13% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 560.897.959,- atau 5,87%.

b. Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.5.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.2
Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Realisasi 2022	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	80	80	100%	78	91,95%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 5.2**, yaitu : Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara, dengan indikator kinerja Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara terealisasi pada tahun 2023 sebesar 80% dari target 80%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sebesar **100%** sehingga dapat dikategorikan **Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk indikator ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023
Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	78	100%	80	80	100%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi target untuk indikator Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara pada tahun 2022 terealisasi 78% dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2023, realisasi prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara mengalami kenaikan menjadi 80% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Adapun penyebab keberhasilan kinerja yaitu:

- 1) Adanya dukungan sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim FKDM, FKUB, FPK dan PKS turut berperan dalam penyelenggara forum terkait kondisi Kabupaten Sukoharjo, menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
- 2) Timbulnya rasa peduli, tanggung jawab masyarakat terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan menjalankan fungsi dalam mencegah dan mendeteksi secara dini konflik di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat secara umum dan daerah Kabupaten Sukoharjo pada khususnya.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.B.5.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 5.2 Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	80	87	91,95%

Berdasarkan tabel di atas, Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara memperoleh realisasi 80 dari target akhir RPJMD sebesar 87 sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 91,95%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.5.2.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5.2

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Indikator	Anggaran		Efisiensi
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	100%	Rp. 28.990.490.000	Rp. 28.674.266.854	1,09

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada Sasaran 5.1 sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.990.490.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.674.266.854,- sehingga efisiensinya sebesar 1,09%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.2 diatas yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.585.579.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.445.489.291,- atau tercapai 96,09% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 140.089.709,- atau 3,91%.
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.783.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.726.862.620,- atau tercapai 96,83% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 56.507.380,- atau 3,17%.
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 17.900.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp 17.881.727.000,- atau tercapai 98,94% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 18.923.000,- atau 1,06%.

- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.471.273.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.466.605.000,- atau tercapai 99,68% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.668.000,- atau 0,32%.
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 935.078.000,- dan terealisasi sebesar Rp. Rp. 879.909.943,- atau tercapai 94,10% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 55.168.057,- atau 5,9%.
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.314.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.273.853.000,- atau tercapai 98,77% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 40.687.000,- atau 1,23%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52).

- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor SP DIPA-044.01.1.401742/2023 tanggal 30 November 2022, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.067.983.000,00.
2. Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.

3. Nama Program dan Kegiatan

Program : Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Koperasi
Kegiatan : Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM
Pekerjaan : Pembangunan Factory Sharing pada Sentra UKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo
Sumber Dana : APBN Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI TA 2023.

4. Kinerja Anggaran dan Realisasi Keuangan

Pekerjaan Pembangunan Factory Sharing pada Sentra UKM Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo telah selesai dilaksanakan 100%, ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 27 Desember 2023.

Kegiatan ini dibiayai dari Dana APBN Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Rp. 11.067.983.000,00, dengan realisasi kinerja dan keuangan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capain %
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Peralatan/Mesin	2.350.408.000,00	1.925.550.000,00	81,92
2.	Pembangunan FS Komoditi Rotan Kab. Sukoharjo	8.159.012.000,00	7.597.253.000,00	93,11
3.	Pengawasan Pembangunan FS	374.382.000,00	98.323.000,00	26,26
4.	Operasional Kegiatan	184.181.000,00	161.882.500,00	87,89
	Jumlah	11.067.983.000,00	9.783.008.500,00	88,39

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan ditemui beberapa permasalahan di lapangan, diantaranya adalah :

a. Perencanaan DED yang lemah

Ditemukan beberapa hasil perencanaan yang kurang cermat, tidak memenuhi kebutuhan pengguna.

Solusi : Perencanaan dibuat secara cermat dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna

b. Konsultan Perencana kurang kooperatif

Ditemukan beberapa hasil perencanaan yang kurang cermat, Pemilihan Konsultan Perencana dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Karena berkontrak dengan PPKom Kementerian Koperasi dan UKM maka tanggung jawab dan responsibilitas yang diminta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo kurang berjalan dengan baik. Terbukti dengan beberapa kali tidak merespon ketika diminta datang di lapangan saat terjadi perubahan DED karena penyesuaian dengan kondisi yang ada.

Solusinya ke depan agar dalam kontrak Konsultan Perencana juga dimasukkan klausul untuk selalu responsif dan bertanggung jawab mendampingi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh PPKom pembangunan.

BAB III

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Penerapan SPM untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar pendidikan terdiri dari :

- a. Pendidikan anak usia dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
- b. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
- c. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM

Target Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam	14.546	Setiap Tahun	1 . Angka partisipasi sekolah	92.57	Setiap Tahun	2.073.200.000		
					2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang	87.45				

		pendidikan dasar			mendapatkan minimal akreditasi B			
					3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	80.5		
					4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3		
					5 . Kecukupan formasi guru ASN	0.01		
					6 . Indeks distribusi guru	0.38		
					7 . Proporsi PTK bersertifikat	42.4		
					8 . Proporsi PTK penggerak	0.14		
					9 . Pengalaman pelatihan guru	16.5		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114.455	Setiap Tahun	SD		Setiap Tahun	16.223.485.000
					1 . Angka partisipasi kasar	96.32		
					2 . Angka partisipasi sekolah	99.83		
					3 . Angka partisipasi murni	90.84		
					4 . Kemampuan literasi	75.58		
					5 . Kemampuan numerasi	60.17		
					6 . Perbedaan Skor Literasi	2.43		
					7 . Perbedaan Skor numerasi	0.97		
					8 . Indeks iklim keamanan	71.45		
					9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	70.87		
					10 . Kecukupan formasi guru ASN	31		
					11 . Indeks distribusi guru	0.39		
					12 . Proporsi PTK bersertifikat	91.35		
					13 . Proporsi PTK penggerak	0.07		
					14 . Pengalaman pelatihan guru	87.3		
					SMP			
					1 . Angka partisipasi kasar	109.49		

					2 . Angka partisipasi sekolah	98.84		
					3 . Angka partisipasi murni	87.72		
					4 . Kemampuan literasi	82.43		
					5 . Kemampuan numerasi	64.24		
					6 . Perbedaan skor literasi	4.37		
					7 . Perbedaan skor numerasi	2.09		
					8 . Indeks iklim keamanan	68.73		
					9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	68.61		
					10 . Kecukupan formasi guru ASN	16.5		
					11 . Indeks distribusi guru	0.35		
					12 . Proporsi PTK bersertifikat	89.7		
					13 . Proporsi PTK penggerak	0.16		
					14 . Pengalaman pelatihan guru	109.49		
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1.467	Setiap Tahun	1 . Angka partisipasi kasar	0.01	Setiap Tahun	144.000.000
					2 . Angka partisipasi sekolah	6.8		
					3 . Angka partisipasi murni	0.01		
					4 . Kemampuan literasi	64.71		
					5 . Kemampuan numerasi	48		
					6 . Perbedaan skor literasi	3.85		
					7 . Perbedaan skor numerasi	2.51		
					8 . Indeks iklim keamanan	63.83		
					9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61		
					10 . Kecukupan formasi guru ASN	0.01		

			11 . Indeks distribusi guru	0.01	
			12 . Proporsi PTK bersertifikat	0.01	
			13 . Proporsi PTK penggerak	0.01	
			14 . Pengalaman pelatihan guru	0.01	

3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM urusan Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pendidikan Dasar	-	16.223.485.000	-
2	Pendidikan Kesetaraan	-	144.000.000	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	-	2.073.200.000	-
			18.440.685.000	

4. Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka mendukung pemenuhan SPM urusan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	3
4	Staf	63
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	40
Jumlah		113

5. Realisasi Capaian

Realisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Realisasi Capaian SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar	114.455	114.455	100	16.223.485.000	15.508.612.367	95.59
2	Pendidikan Kesetaraan	1.467	1.467	100	144.000.000	127.710.000	88.69
3	Pendidikan Anak Usia Dini	14.546	14.546	100	2.073.200.000	1.997.339.500	96.34

Tabel 4.5
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	14.546	14.546	100	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Angka partisipasi sekolah	92.57	92.57	100,00%	20,00%
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B	87.45	87.45	100,00%	20,00%
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	80.5	80.5	100,00%	20,00%
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3	3	100,00%	20,00%

5	Kecukupan formasi guru ASN	0.01	0.01	100,00%	20,00%
6	Indeks distribusi guru	0.38	0.38	100,00%	20,00%
7	Proporsi PTK bersertifikat	42.4	42.4	100,00%	20,00%
8	Proporsi PTK penggerak	0.14	0.14	100,00%	20,00%
9	Pengalaman pelatihan guru	16.5	16.5	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Pendidikan Dasar	114.455	114.445	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	(4:3 x 100%)	
1	2	3	4	5	6
	SD				
1	Angka partisipasi kasar	96.32	96.32	100,00%	20,00%
2	Angka partisipasi sekolah	99.83	99.83	100,00%	20,00%
3	Angka partisipasi murni	90.84	90.84	100,00%	20,00%
4	Kemampuan literasi	75.58	75.58	100,00%	20,00%
5	Kemampuan numerasi	60.17	60.17	100,00%	20,00%
6	Perbedaan Skor Literasi	2.43	2.43	100,00%	20,00%
7	Perbedaan Skor numerasi	0.97	0.97	100,00%	20,00%
8	Indeks iklim keamanan	71.45	71.45	100,00%	20,00%
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	70.87	70.87	100,00%	20,00%
10	Kecukupan formasi guru ASN	31	31	100,00%	20,00%

11	Indeks distribusi guru	0.39	0.39	100,00%	20,00%
12	Proporsi PTK bersertifikat	91.35	91.35	100,00%	20,00%
13	Proporsi PTK penggerak	0.07	0.07	100,00%	20,00%
14	Pengalaman pelatihan guru	87.3	87.3	100,00%	20,00%
SMP					
1	Angka partisipasi kasar	109.49	109.49	100,00%	20,00%
2	Angka partisipasi sekolah	98.84	98.84	100,00%	20,00%
3	Angka partisipasi murni	87.72	87.72	100,00%	20,00%
4	Kemampuan literasi	82.43	82.43	100,00%	20,00%
5	Kemampuan numerasi	64.24	64.24	100,00%	20,00%
6	Perbedaan skor literasi	4.37	4.37	100,00%	20,00%
7	Perbedaan skor numerasi	2.09	2.09	100,00%	20,00%
8	Indeks iklim keamanan	68.73	68.73	100,00%	20,00%
9	Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	68.61	68.61	100,00%	20,00%
10	Kecukupan formasi guru ASN	16.5	16.5	100,00%	20,00%
11	Indeks distribusi guru	0.35	0.35	100,00%	20,00%
12	Proporsi PTK bersertifikat	89.7	89.7	100,00%	20,00%
13	Proporsi PTK penggerak	0.16	0.16	100,00%	20,00%
14	Pengalaman pelatihan guru	67.2	67.2	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
13	Pendidikan Kesetaraan	1,467	1,467	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi kasar	0.01	0.01	100%	20%
2	Angka partisipasi sekolah	6.8	6.8	100%	20%
3	Angka partisipasi murni	0.01	0.01	100%	20%
4	Kemampuan literasi	64.71	64.71	100%	20%
5	Kemampuan numerasi	48	48	100%	20%
6	Perbedaan skor literasi	3.85	3.85	100%	20%
7	Perbedaan skor numerasi	2.51	2.51	100%	20%
8	Indeks iklim keamanan	63.83	63.83	100%	20%
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61	61	100%	20%
10	Kecukupan formasi guru ASN	0.01	0.01	100%	20%
11	Indeks distribusi guru	0.01	0.01	100%	20%
12	Proporsi PTK bersertifikat	0.01	0.01	100%	20%
13	Proporsi PTK penggerak	0.01	0.01	100%	20%
14	Pengalaman pelatihan guru	0.01	0.01	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20%

Tabel 4.6
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Dasar	100	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna
3	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
	PENDIDIKAN	100	Tuntas Paripurna

6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.7
Permasalahan dan Solusi Bidang Pendidikan

NO	Sumber	Permasalahan	Solusi
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

7. Program dan Kegiatan

Tabel 4.8
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
	2	3			4
1	Pendidikan Anak Usia Dini		PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		2.073.000.000
		1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD		644.000.000
			1	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	644.000.000
		2	Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan		1.189.200.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		126.200.000
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		150.000.000
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran		253.000.000
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		35.000.000
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak		625.000.000
		3	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		90.000.000
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		75.000.000
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		15.000.000
		4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		150.000.000
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan		150.000.000
2	Pendidikan Dasar	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR			16.223.485.000
		1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		469.000.000
		1	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah		10,000,000
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus		214,000,000
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung		245,000,000
		2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		15.531.712.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		93.862.000
		2	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		15.304.850.000
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinaaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran		133.000.000
		3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		90.000.000
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		75.000.000
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		15.000,000
		4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		132.773.000
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan		132.773.000
3	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN			144.000.000
		1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)		10.000.000
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah		10.000.000
		2	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023561		90.000.000
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		75.000.000
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		15.000.000
		3	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023560		44.000.000
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang		44.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
			dipersyaratkan		

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Penerapan SPM untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM);
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian		Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	

		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	11.314	Setiap Tahun	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1,465		675.006.000
					2. Tablet tambah darah	1,018,260		
					3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	11,314		
					4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	11,314		
					5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	11,314		
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11,314	Setiap Tahun	
					7. Kartu ibu/rekam medis ibu	11,314		
					8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11,314		
					9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	487		
					10. Tenaga kesehatan : Bidan	762		
					11. Tenaga kesehatan : Perawat	2,352		
					12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	11,267		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.218	Setiap Tahun	1 . Formulir Partografi	10,218	Setiap Tahun	10.198.000
					2 . Kartu ibu (rekam medis)	10,218		
					3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,218		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan 5 . Tenaga kesehatan : Bidan 6 . Tenaga kesehatan : Perawat	487 762 2,352			
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.246	Setiap Tahun	1 Vaksin Hepatitis B0 2 . Vitamin K1 injeksi 3 . Salep/tetes mata antibiotic 4 . Formulir bayi baru lahir 5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak 8 . Tenaga kesehatan : Bidan 9 . Tenaga kesehatan : Perawat	10,246 10,246 10,246 10,246 10,246 10,246 486 762 2,352	Setiap Tahun	166.569.000	
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	53.280	Setiap Tahun	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku 2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) 3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) 4. Vitamin A Biru	53,280 53,280 53,280 7,345	Setiap Tahun	13.879.890.00	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					5. Vitamin A Merah	82,300			
					6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	10,246			
					7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	1,278			
					8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	10,210			
					9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	3,378			
					10. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	1,447			
					11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	1,456			
					12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	1,456			
					13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB – Hib	1,565			
					14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	1,552			
					15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	1,552			
					16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	65,350			
					17. Peralatan Anafilaktik	24			
					18. Tenaga kesehatan : Dokter	460			
					19. Tenaga kesehatan : Bidan	762			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					20. Tenaga Kesehatan : Perawat	2.352			
					21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97			
					22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7.809			
					23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	1.053			
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	24.788	Setiap Tahun	1 . Buku raport kesehatanku	24,788		17.665.000	
					2 . Buku pemantauan Kesehatan	24,788			
					3 . Kuesioner skrining Kesehatan	24,788			
					4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	12	Setiap Tahun		
					5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	12			
					6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	486			
					7 . Tenaga kesehatan : Bidan	762			
					8 . Tenaga kesehatan : Perawat	2,352			
					9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97			
					10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	76			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7,809			
					12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	6,059			
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 562.274		Setiap Tahun	1. 1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	13	Setiap Tahun	910.158.000	
					2. Alat ukur berat badan	178			
					3. Alat : Alat ukur tinggi badan	178			
					4. Alat : Alat ukur lingkar perut	178			
					5. Alat : Tensimeter	178			
					6. Alat : Glukometer	178			
					7. Alat : Tes strip gula darah	562.274			
					8. Alat : Lancet	562.274			
					9. Alat : Kapas alcohol	562.274			
					10. Alat : KIT IVA Tes	12			
					11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	562.274			
					12. Tenaga kesehatan : Dokter	460			
					13. Tenaga kesehatan : Bidan	762			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					14. Tenaga kesehatan : Perawat	2,352			
					15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97			
					16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	76			
					17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	61			
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	135.601	Setiap Tahun	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	135,601	Setiap Tahun	15.000.000	
					2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	135,601			
					3 . Buku kesehatan lansia	135,601			
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter	486			
					5 . Tenaga kesehatan : Bidan	818			
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	2,489			
					7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	105			
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	51			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
					9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	6,553				
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	212.188	Setiap Tahun	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24		Setiap Tahun	6.680.000	
					2 . Tensimeter	178				
					3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	212,188				
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter	460				
					5 . Tenaga kesehatan : Bidan	762				
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	2,352				
					7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	76				
					8 . Obat Hipertensi	212,188				
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	17.184	Setiap Tahun	1 . Alat : Glukometer	178		Setiap Tahun	5.640.000	
					2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	17.184				
					3 . Alat : Kapas Alkohol	17.184				
					4 . Alat : Lancet	17.184				
					5 . Formulir pencatatan dan pelaporan	17.184				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)					
					6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24				
					7 . Tenaga kesehatan : Dokter	460				
					8 . Tenaga kesehatan : Bidan	762				
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	2,352				
					10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97				
					11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	76				
					12 . Obat Diabetes Melitus	17.184				
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	2.034	Setiap Tahun	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	13	Setiap Tahun	9.060.000		
					2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	13				
					3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2,034				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1.000			
					5 . Tenaga kesehatan : Dokter	3			
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	3			
					7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	1			
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12.070	Setiap Tahun	1 Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.000	Setiap Tahun	4.625.753.000	
					2 . Reagen Zn TB	34			
					3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	1.000			
					4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	22			
					5 . Catridge tes cepat molekuler	11,550			
					6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	22			
					7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	22			
					8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	512			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	2,352			
					10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	232			
					11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	84			
					12 . Tenaga kesehatan masyarakat	76			
					13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	68			
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh mansia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh mansia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	13.360	Setiap Tahun	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	3,024	Setiap Tahun	409.445.000	
					2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	13,630			
					3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	13,630			
					4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13,630			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	510			
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	20			
					7 . Tenaga kesehatan : Bidan	20			
					8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	20			
					9 . Tenaga kesehatan masyarakat	12			
					10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	3			

3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM urusan Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Anggaran (Rp. 000)			Jumlah
		APBN	APBD	Sumber Lain yang sah	
1	2	3	4	5	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	205.461.000	15.000.000	454.545.000	675.006.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0	10.198.000	0	10.198.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99.091.000	18.000.000	49.478.000	166.569.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	13.085.480.000	43.260.000	751.150.000	13.879.890.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Anggaran (Rp. 000)			Jumlah
		APBN	APBD	Sumber Lain yang sah	
1	2	3	4	5	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0	17.665.000	0	17.665.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	904.218.000	5.940.000	0	910.158.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	0	15.000.000	0	15.000.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.680.000	0	0	6.680.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0	5.640.000	0	5.640.000
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	0	9.060.000	0	9.060.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	1.192.460.000	10.000.000	3.423.293.000	4.625.753.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	242.520.000	166.925.000	0	409.445.000
	JUMLAH	15.735.910.000	316.688.000	4.678.466.000	20.731.064.000

4. Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka mendukung pemenuhan SPM urusan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 4.11

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	30
2	Strata 1	328
3	Diploma	711
4	SMA/SMK	41

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
5	SMP/MTs	6
6	SD/MI	3
	Jumlah	1.119

5. Realisasi Capaian

Realisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Realisasi Capaian SPM Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (RP)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	11.314	11.314	100	675.006.000	645.526.400	95,63
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	10.218	10.218	100	10.198.000	10.184.400	99,87
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	10.246	10.246	100	166.569.000	166.446.800	99,93
4	Pelayanan Kesehatan balita	53.280	53.280	100	13.879.890.000	11.181.081.850	80,56
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.788	24.788	100	17.665.000	17.605.200	99,66
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	562.274	562..274	100	910.158.000	636.372.797	69,92
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	135.601	135.601	100	15.000.000	14.964.600	99,76
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	212.188	212.188	100	6.680.000	6.680.000	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	17.184	17.184	100	5.640.000	5.636.000	99,93

10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	2.034	2.034	100	9.060.000	9.060.000	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis (TB)	12.070	12.070	100	4.625.753.000	4.599.124.775	99,42
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	13.630	13.630	100	409.445.000	355.138.000	86,74

Tabel 4.13
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11,314	11,314	100	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1,465	1,465	100	20,00%
2	Tablet tambah darah	1,018,260	1,018,260	100	20,00%
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	11,314	11,314	100	20,00%
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	11,314	11,314	100	20,00%
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	11,314	11,314	100	20,00%
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11,314	11,314	100	20,00%
7	Kartu ibu/rekam medis ibu	11,314	11,314	100	20,00%
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11,314	11,314	100	20,00%

9	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	487	487	100	20,00%
10	Tenaga kesehatan : Bidan	762	762	100	20,00%
11	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,352	100	20,00%
12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	11,267	11,267	100	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.218	10.218	100	80%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10,246	10,246	100	20%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Vaksin Hepatitis B0	10,246	10,246	100	20%
2	Vitamin K1 injeksi	10,246	10,246	100	20%
3	Salep/tetes mata antibiotic	10,246	10,246	100	20%
4	Formulir bayi baru lahir	10,246	10,246	100	20%
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10,246	10,246	100	20%
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,246	10,246	100	20%
7	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	486	486	100	20%
8	Tenaga kesehatan : Bidan	762	762	100	20%
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,352	100	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
4	Pelayanan Kesehatan Balita	53.280	53.280	100	80%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	53,280	53,280	100	20,00%
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	53,280	53,280	100	20,00%
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	53,280	53,280	100	20,00%
4	Vitamin A Biru	7,345	7,345	100	20,00%
5	Vitamin A Merah	82,300	82,300	100	20,00%
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO	10,246	10,246	100	20,00%
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	1,278	1,278	100	20,00%
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio	10,210	10,210	100	20,00%
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	3,378	3,378	100	20,00%
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB –Hib	1,447	1,447	100	20,00%
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak	1,456	1,456	100	20,00%
12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	1,456	1,456	100	20,00%
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB –Hib	1,565	1,565	100	20,00%
14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	1,552	1,552	100	20,00%
15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	1,552	1,552	100	20,00%
16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	65,350	65,350	100	20,00%
17	Peralatan Anafilaktik	24	24	100	20,00%

18	Tenaga kesehatan : Dokter	460	460	100	20,00%
19	Tenaga kesehatan : Bidan	762	762	100	20,00%
20	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,352	100	20,00%
21	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97	97	100	20,00%
22	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7,809	7,809	100	20,00%
23	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	1,053	1,053	100	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	24,788	24,788	100	80%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Buku raport kesehatanku	24,788	24,788	100,00%	20,00%
2	Buku pemantauan kesehatan	24,788	24,788	100,00%	20,00%
3	Kuesioner skrining kesehatan	24,788	24,788	100,00%	20,00%
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	12	12	100,00%	20,00%
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	12	12	100,00%	20,00%
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	486	486	100,00%	20,00%

7	Tenaga kesehatan : Bidan	762	762	100,00%	20,00%
8	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,352	100,00%	20,00%
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97	97	100,00%	20,00%
10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	76	76	100,00%	20,00%
11	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7,809	7,809	100,00%	20,00%
12	Tenaga Non kesehatan : Guru	6,059	6,059	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	562	562	100,00	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	13	13	100	20,00%
2	Alat ukur berat badan	178	178	100	20,00%
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	178	178	100	20,00%
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	178	178	100	20,00%
5	Alat : Tensimeter	178	178	100	20,00%
6	Alat : Glukometer	178	178	100	20,00%
7	Alat : Tes strip gula darah	562	562	100	20,00%
8	Alat : Lancet	562	562	100	20,00%
9	Alat : Kapas alcohol	562	562	100	20,00%
10	Alat : KIT IVA Tes	12	12	100	20,00%

11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	562	562	100	20,00%
12	Tenaga kesehatan : Dokter	460	460	100	20,00%
13	Tenaga kesehatan : Bidan	762	762	100	20,00%
14	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,352	100	20,00%
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97	97	100	20,00%
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100	20,00%
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	61	61	100	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	135.601	135.601	100	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	2	3	4	5	6
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	135,601	135,601	100	20,00%
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	135,601	135,601	100	20,00%
3	Buku kesehatan lansia	135,601	135,601	100	20,00%
4	Tenaga kesehatan : Dokter	486	486	100	20,00%

5	Tenaga kesehatan : Bidan	818	818	100	20,00%
6	Tenaga kesehatan : Perawat	2,489	2,489	100	20,00%
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	105	105	100	20,00%
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	51	51	100	20,00%
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	6,553	6,553	100	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	212.188	212.188	100,00	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	24	100,00%	20,00%
2	Tensimeter	178	178	100,00%	20,00%
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	212,188	212,188	100,00%	20,00%
4	Tenaga kesehatan : Dokter	460	460	100,00%	20,00%
5	Tenaga kesehatan : Bidan	762	762	100,00%	20,00%
6	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,352	100,00%	20,00%
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100,00%	20,00%
8	Obat Hipertensi	212,188	212,188		
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17	17	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/J asa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Alat : Glukometer	178	178	100,00%	20,00%
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	17	17	100,00%	20,00%
3	Alat : Kapas Alkohol	17	17	100,00%	20,00%
4	Alat : Lancet	17	17	100,00%	20,00%
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	17	17	100,00%	20,00%
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	24	100,00%	20,00%
7	Tenaga kesehatan : Dokter	460	460	100,00%	20,00%
8	Tenaga kesehatan : Bidan	762	762	100,00%	20,00%
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,353	100,00%	20,00%
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	97	97	100,00%	20,00%
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100,00%	20,00%
12	Obat Diabetes Melitus	17	17	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2,034	2,034	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	13	13	100,00%	20,00%
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	13	13	100,00%	20,00%
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2,034	2,034	100,00%	20,00%
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1	1	100,00%	20,00%
5	Tenaga kesehatan : Dokter	3	3	100,00%	20,00%
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	3	3	100,00%	20,00%
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	1	1	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.070	12.070	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.000	2.000	100,00%	20,00%
2	Reagen Zn TB	34	34	100,00%	20,00%
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	1.000	1.000	100,00%	20,00%
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	22	22	100,00%	20,00%
5	Catridge tes cepat molekuler	11,550	11,550	100,00%	20,00%
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	22	22	100,00%	20,00%
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	22	22	100,00%	20,00%
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	512	512	100,00%	20,00%
9	Tenaga kesehatan : Perawat	2,352	2,352	100,00%	20,00%
10	Tenaga kesehatan : Analisis Laboratorium Teknik Medik (ATLM)	232	232	100,00%	20,00%
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	84	84	100,00%	20,00%
12	Tenaga kesehatan masyarakat	76	76	100,00%	20,00%
13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	68	68	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	13,630	13,630	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	3,024	3,024	100,00%	20,00%
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	13,630	13,630	100,00%	20,00%
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	13,630	13,630	100,00%	20,00%
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13,630	13,630	100,00%	20,00%
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	510	510	100,00%	20,00%
6	Tenaga kesehatan : Perawat	20	20	100,00%	20,00%
7	Tenaga kesehatan : Bidan	20	20	100,00%	20,00%
8	Tenaga kesehatan : Ali Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	20	20	100,00%	20,00%
9	Tenaga kesehatan masyarakat	12	12	100,00%	20,00%
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	3	3	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

Tabel 4.14
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100,00	TUNTAS PARIPURNA
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100,00	TUNTAS PARIPURNA
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100,00	TUNTAS PARIPURNA
4	Pelayanan Kesehatan balita	100,00	TUNTAS PARIPURNA
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	TUNTAS PARIPURNA
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100,00	TUNTAS PARIPURNA
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100,00	TUNTAS PARIPURNA
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00	TUNTAS PARIPURNA
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100,00	TUNTAS PARIPURNA
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00	TUNTAS PARIPURNA
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100,00	TUNTAS PARIPURNA
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh mansia (Human Immunodeficiency virus)	100,00	TUNTAS PARIPURNA
	KESEHATAN	100,00	TUNTAS PARIPURNA

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan, hambatan dalam mencapai target SPM bidang kesehatan ini meliputi:

Tabel 4.15
Permasalahan dan Solusi Bidang Kesehatan

No.	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> 1. Proses pengumpulan data pada indikator SPM pelayanan pada usia pendidikan dasar terkendala pada sasaran yang berada di luar sekolah formal , namun dengan adanya posyandu remaja sasaran diluar sekolah non formal dapat dijaring. 2. Kendala pengumpulan data juga ditemui pada fasilitas kesehatan non pemerintah/swasta yang tidak melakukan pelaporan secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> 1. adanya posyandu remaja sasaran diluar sekolah non formal dapat dijaring. 2. Memerintahkan kepada fasilitas kesehatan non pemerintah/swasta untuk membuat laporan secara rutin ke Dinkes atau puskesmas
2	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penentuan sasaran awal menggunakan rumus estimasi sehingga kebutuhan barang jasa untuk pemenuhan SPM menggunakan data estimasi tersebut. 	Menggunakan rumus estimasi
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran dari APBD Kabupaten 2. Tidak semua barang jasa pendukung pemenuhan SPM alokasi anggarannya di sub K SPM (tersebar di beberapa subK). 	Mengusulkan anggaran APBD untuk pemenuhan SPM
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sasaran pada akhir tahun berbeda dengan sasaran estimasi yang dihitung di awal tahun. Sasaran yang dipergunakan dalam perhitungan capaian SPM menggunakan data sasaran riil. 	Untuk penghitungan sasaran pada akhir tahun menggunakan data sasaran riil.

Tabel 4.16
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4
1			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.731.064.000
			1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.731.064.000
	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	675.006.000
	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	10.198.000
	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	166.569.000
	Pelayanan Kesehatan balita	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	13.879.890.000
	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.665.000
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	910.158.000
	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	15.000.000
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	6.680.000
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	5.640.000
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	9.060.000
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.625.753.000
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh mansia (Human Immunodeficiency virus)	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	409.445.000

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Penerapan SPM untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum terdiri dari :

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.644	Setiap Tahun	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	661 SR	Setiap Tahun	4.145.000.000	
					2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan	661 SR			

					Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			
					3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari)	211.41 0 Rumah Tangga		
					4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	211.41 0 Rumah Tangga		
2	Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	200	Setiap Tahun	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SP ALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1529 Rumah Tangga	Setiap Tahun	987.289.400

				2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SP ALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	1529 Rumah Tangga		
				3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SP ALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	50 Rumah Tangga		

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk menunjang pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18

Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		4.145.000.000	-
2	Pelayanan pengolahan air limbah domestic		987.289.400	-
	Jumlah		5.132.289.400	

4. Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka mendukung pemenuhan SPM urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 4.19

Tabel Dukungan Personil Pemenuhan SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	2
3	Strata 1	3
4	SMA/ Sederajat	9
	Jumlah	14

5. Realisasi Capaian

Relisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2644	2644	100	4.145.000.000	3.409.059.200	82,25
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	200	200	100	987.289.400	842.531.810	85,34

Tabel 4.21
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.644	2.644	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	661	661	100,00%	20,00%
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	661	661	100,00%	20,00%
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	211,410	211,410	100,00%	200,00%
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	211,410	211,410	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	200	200	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1,529	1,529	100,00%	20,00%
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	1,529	1,529	100,00%	20,00%
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	50	50	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

Tabel 4.22
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM	Kategori Indeks SPM
		(Ip Layanan + Ip Mutu)	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100,00	TUNTAS PARIPURNA
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100,00	TUNTAS PARIPURNA
	PEKERJAAN UMUM	100,00	TUNTAS PARIPURNA

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan, hambatan dalam mencapai target SPM bidang pekerjaan umum ini meliputi:

Tabel 4.23
Permasalahan dan Solusi Bidang Pekerjaan Umum

NO	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai data yang lengkap dan update • Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang berkaitan • Data update belum bisa diperoleh/ dikumpulkan di akhir tahun anggaran 	Berkordinasi dengan OPD atau pihak lain untuk mendapatkan Data
2	Penghitungan Kebutuhan	Penghitungan kebutuhan masih terkendala data yang belum update	Berkordinasi dengan OPD atau pihak lain untuk mendapatkan Data
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan itu bersifat kotinyu untuk update dalam periode tertentu <p>Perencanaan dan penganggaran terbatas oleh kriteria lokus stunting</p>	Skala prioritas penganggaran (Penggunaan Jasa Konsultan atau Penghonoran Petugas Pendataan)
4	Pelaksanaan	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang melebihi waktu yang dijadwalkan	Penjadwalan ulang kegiatan dan koordinasi dengan yang terlibat kegiatan.

7. Program dan Kegiatan

Tabel 4.24
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		4.145.000.000
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.145.000.000
		A	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	4.145.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		987.289.400
		2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	987.289.400
		1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	372.289.400
		2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	615.000.000
KEGIATAN LAIN				
1	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			
		1	Pamsimas 2022	2.225.000
		a.	Anggaran BPM/BLM Pamsiman 2022	2.000.000
		b.	Anggaran Swadaya Masyarakat	225.000

D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penerapan SPM untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	28	Setiap Tahun	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	5	Setiap Tahun	90.000.000	
					2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemda	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda	13	Setiap Tahun	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	4	Setiap Tahun	10.000.000	

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	-	Rp 90.000.000 (APBD KAB)	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	-	Rp 10.000.000 (APBD KAB)	-

4. Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka mendukung pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 4.27
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	2
2	Strata 1	4
	Jumlah	6

5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.28
Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28	28	100%	90.000.000	90.000.000	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13	13	100%	10.000.000	9.998.000	99,98%

Tabel 4.29
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	28	28	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	5	5	100,00%	20,00%
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2	2	-	-
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	13	13	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	4	4	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

Tabel 4.30
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	TUNTAS PARIPURNA
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	TUNTAS PARIPURNA
	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	100	TUNTAS PARIPURNA

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan, hambatan dalam mencapai target SPM bidang Perumahan Rakyat ini meliputi:

Tabel 4.31
Permasalahan dan Solusi Bidang Perumahan Rakyat

NO	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	- Keterbatasan Anggaran untuk pengumpulan data - Data belum lengkap dan update	Melakukan penanggaran dan Pendataan pada Tahun 2024
2	Perhitungan Kebutuhan	- Perhitungan belum maksimal karena data belum lengkap	Melakukan penanggaran dan Pendataan pada Tahun 2024
3	Perencanaan dan Penganggaran	- Perencanaan dan penganggaran belum maksimal karen data baseline nya belum sepenuhnya lengkap	Melakukan penanggaran dan Pendataan pada Tahun 2024
4	Pelaksanaan	- Tidak ada Masalah	Tidak ada masalah

7. Program dan Kegiatan

Tabel 4.32
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perumahan dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran
		1	2	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		100.000.000
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			90.000.000
		1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	25.000.000
		2.	Pembangunan rumah bagi korban bencana	65.000.000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000
			1. Pendataan dan verifikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota	

E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.33

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten	41	Setiap Tahun	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	30	Setiap Tahun	8.645.987.00	
					2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	11			
					3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	12			
					4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	114			

					5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat	191		
					6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1		
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	5.000	Setiap Tahun	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Setiap Tahun	90.000.000
					2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1		
					3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	5.000		
					4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	1.540	Setiap Tahun	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	140	Setiap Tahun	571.962.690

	terhadap bencana	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	1.400		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25.175	Setiap Tahun	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	Setiap Tahun	199.742.000
					2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1		
					3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	25.175		
					4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1		
					5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	399	Setiap Tahun	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	229	Setiap Tahun	1.950.922.00
					2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2		
					3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	148		
					4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	5		

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM urusan Trantibumlinmas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	-	8.645.987.000	-
2	Pelayanan informasi rawan bencana	-	115.100.000	-
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	571.459.000	-
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	196.690.000	-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	1.950.922.000	-

4. Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka mendukung pemenuhan SPM urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 4.35
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas
Tahun 2023 (BPBD)

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	1
2	Strata 1	9
3	Diploma 3	1
4	SMA Sederajat	5
5	SMP	1
	Jumlah	17

Tabel 4.36

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas
Tahun 2023 (SATPOL PP)

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	5
3	Strata 1	22
5	Diploma 3	4
8	SMA Sederajat	30
9	SMP Sederajat	2

5. Realisasi Capaian

Realisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 37
Realisasi Capaian SPM Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	41	41	100,00%	8.645.987.000	8.415.790.480	97,34%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	5.000	5.000	100,00%	115.100.000	114.540.000	99,51%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.540	1.540	100,00%	571.459.000	501.581.575	96,93%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25.175	25.175	100,00%	196.690.000	192.351.000	97,79%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	399	399	100,00%	1.950.922.000	1.891.541.610	96,96%

Tabel 4.38
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	41	41	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	30	30	100,00%	20,00%
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	11	11	100,00%	20,00%
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	12	12	100,00%	20,00%
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	114	114	100,00%	20,00%
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	191	191	100,00%	20,00%
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	5.000	5.000	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100,00%	20,00%
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	100,00%	20,00%
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	5.000	5.000	100,00%	20,00%
4	Pengadaan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1	1	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	1.540	1.540	100,00%	80,00%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	140	140	100,00%	20,00%
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	1.400	1.400	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	25.175	25.175	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4		
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100,00%	20,00%
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1	1	100,00%	20,00%
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	25.175	25.175	100,00%	20,00%
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100,00%	20,00%
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1	1	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	399	399	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/J asa yang dibutuhk an	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	229	229	100,00%	20,00%
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	100,00%	20,00%
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	148	148	100,00%	20,00%
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	5	5	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

Tabel 4.39
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100	TUNTAS PARIPURNA
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	TUNTAS PARIPURNA
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	TUNTAS PARIPURNA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	TUNTAS PARIPURNA
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	TUNTAS PARIPURNA
	TRANTIBUMLINMAS	100,00	TUNTAS PARIPURNA

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan, hambatan dalam mencapai target SPM bidang Trantibumlinmas ini meliputi:

Tabel 4.40
Permasalahan dan Solusi

NO	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	Pendataan terhadap warga yang beresiko akibat penagakan Perda dan perkada belum akurat	Meningkatkan kualitas pendataan terhadap warga yang beresiko akibat penegakan Perda dan Perkada
2	Penghitungan anggaran	Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM masih terbatas	meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM
3	Perencanaan dan penganggaran	Keterbatasan anggaran dalam mitigasi bencana	Menganggarkan di tahun berikutnya
4	Pelaksanaan	Kurangnya SDM dan peralatan dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas SDM dan peralatan dalam penanggulangan bencana

7. Program dan Kegiatan

Tabel 4.41
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	8.686.137.000
		1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.985.137.000
		1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi	5.795.412.000

			dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	
	2		Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	484,000,000
	3		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	85,000,000
	4		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	934,775,000
	5		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	592,400,000
	6		kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	75,000,000
	7		Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	10,000,000
	8		Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8,550,000
	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	660.850.000
			Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	266.000.000
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	116.980.000
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	277.870.000
	3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	40.150.000
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	40.150.000
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	829.249.000
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	115.100.000
		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	115.000.000
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	517.459.000
		1	Sub Kegiatan pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kabupaten/Kota	50.000.000

			2	Sub Kegiatan pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/Kota	179.959.000
			3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	105.125.000
			4	Sub Kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	69.500.000
			5	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/kota	45.875.000
			7	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	50.000.000
			8	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	18.000.000
4	Pelayanan penyelamatan evakuasi bencana	dan korban	4	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	196.690.000
			1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	17.500.000
			2	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	127.740.000
			3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.450.000
			5	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	72.964.400
			1	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	25.184.400
			2	Sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	47.780.000
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.950.922.000
		6	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1,558,822,000
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota		43,530,000
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota		1,339,397,000
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		29,800,000
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		126,145,000
		5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran		10,000,000

		6	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	9,950,000
	2	1	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	20,000,000
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	10,000,000
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	10,000,000
	3	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	343,000,000
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	325,000,000
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	18,000,000
	4	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	29,100,000
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/ atau mengancam keselamatan manusia	20,000,000
		2	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	9,100,000

F. BIDANG SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah :

- a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
- d. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
- e. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.42
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp.000)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	136 (100%)	Setiap Tahun	1 . Layanan data dan pengaduan	136	Setiap Tahun	384.850.000	
					2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1			
					3 . Penyediaan permakaran	10			
					4 . Penyediaan sandang	5			
					5 . Penyediaan alat bantu	3			
					6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10			
					7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25			
					8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	25			

					9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1		
					10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1		
					11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1		
					12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2		
					13 . Layanan rujukan	1		
								60.000.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	70 (100%)	Setiap Tahun	1 . Layanan data dan pengaduan	70	Setiap Tahun	
					2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1		
					3 . Penyediaan permakanan	20		
					4 . Penyediaan sandang	5		

	rehabilitasi sosial di lar panti			
		2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	
		3 . Penyediaan permakanan	5	
		4 . Penyediaan sandang	1	
		5 . Penyediaan alat bantu	5	
		6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	
		7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	
		8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	25	
		9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1	
		10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	5	
		11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	22.975.000

					12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	
					13 . Layanan rujukan	2	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	49(100 %)	Setiap Tahun	1 . Layanan data dan pengaduan	37	Setiap Tahun
					2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	
					3 . Penyediaan permakanan	1	
					4 . Penyediaan sandang	1	
					5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaaan P3K)	1	
					6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	
					7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	25	
					8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	

					9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1		
					10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1		
					11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1		
					12 . Layanan rujukan	2		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab.	98 (100%)	Setiap Tahun	1 . Penyediaan permakaman	35	Setiap Tahun	49.100.000
					2 . Penyediaan sandang	12		
					3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	27		
					4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	12		
					5 . Pelayanan dukungan Psikososial	12		

3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM urusan Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.43
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	-	384.850.000	-
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	-	60.000.000	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-	22.975.000	-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	22.975.000	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana	-	49.100.000	-
	Jumlah	-	539.000,000	-

4. Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka mendukung pemenuhan SPM urusan Sosial di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

5.

Tabel 4.44

6. Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	Tidak Ada
2	Strata 2	13
3	Strata 1	40
4	Diploma 3	2
5	SMA/Sederajat	74
Total Keseluruhan		130

5. Realisasi Capaian

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Tabel 4.45
Realisasi Capaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	136	136	100,00%	384.850.000	384.850.000	99,9%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	70	70	100,00%	60.000.000	60.000.000	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	78	78	100,00%	22.975.000	22.975.000	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	49	49	100,00%	22.975.000	22.975.000	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana	98	98	99,2%	49.100.000	49.100.000	

Tabel 4.46
Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	136	136	100,00%	80,00%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	136	136	100,00%	20,00%
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	100,00%	20,00%
3	Penyediaan permakanan	10	10	100,00%	20,00%
4	Penyediaan sandang	5	5	100,00%	20,00%
5	Penyediaan alat bantu	3	3	100,00	20,00
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	10	100,00%	20,00%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	100,00%	20,00%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	25	25	100,00%	20,00%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100,00%	20,00%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100,00%	20,00%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100,00%	20,00%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100,00%	20,00%
13	Layanan rujukan	1	1	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	70	70	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	70	70	100,00%	20,00%
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	1	100,00%	20,00%
3	Penyediaan permakanan	20	20	100,00%	20,00%
4	Penyediaan sandang	5	5	100,00%	20,00%
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	100,00%	20,00%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	100,00%	20,00%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	25	25	100,00%	20,00%
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100,00%	20,00%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100,00%	20,00%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	100,00%	20,00%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100,00%	20,00%
12	Layanan rujukan	5	5	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	500	500	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	78	78	100,00%	20,00%
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	100,00%	20,00%
3	Penyediaan permakanan	5	5	100,00%	20,00%
4	Penyediaan sandang	1	1	100,00%	20,00%
5	Penyediaan alat bantu	5	5	100,00%	20,00%
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100,00%	20,00%
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	100,00%	20,00%
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	25	25	100,00%	20,00%
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100,00%	20,00%
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	5	5	100,00%	20,00%
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100,00%	20,00%
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100,00%	20,00%
13	Layanan rujukan	2	2	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geladangan dan Pengemis di Luar Panti	49	49	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	(4:3 x 100%)	
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	37	37	100,00%	20,00%
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	100,00%	20,00%
3	Penyediaan permakanan	1	1	100,00%	20,00%
4	Penyediaan sandang	1	1	100,00%	20,00%
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	1	1	100,00%	20,00%
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	100,00%	20,00%
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga geladangan dan pengemis	25	25	100,00%	20,00%
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	100,00%	20,00%
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100,00%	20,00%
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100,00%	20,00%
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100,00%	20,00%
12	Layanan rujukan	2	2	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	2	3	4	5	6
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	98	98	100,00%	80,00%
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Percentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan permakanan	35	35	100,00%	20,00%
2	Penyediaan sandang	12	12	100,00%	20,00%
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	27	27	100,00%	20,00%
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	12	12	100,00%	20,00%
5	Pelayanan dukungan Psikososial	12	12	100,00%	20,00%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20,00%

Tabel 4.47
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM		Kategori Indeks SPM
		(Ip Layanan + Ip Mutu)		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	100		TUNTAS PARIPURNA
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100		TUNTAS PARIPURNA
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100		TUNTAS PARIPURNA
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis di luar panti	100		TUNTAS PARIPURNA
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap bencana dan paska bencana	100		TUNTAS PARIPURNA
	SOSIAL	100		TUNTAS PARIPURNA

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan, hambatan dalam mencapai target SPM bidang Sosial ini meliputi:

Tabel 4.48
Permasalahan dan Solusi Bidang Sosial

NO	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	1) Tidak adanya anggaran khusus untuk pendataan. 2) Minimnya SDM di daerah yang mampu bersinergi dan ahli dalam kesesuaian permintaan data, 3) Tidak adanya aplikasi khusus karena tiap tahun berubah-ubah datanya, dan data NIK banyak yang sudah tidak terintegrasi karena server data Kependudukan ditarik ke pusat yang menghambat pencocokan data untuk menentukan valid dan tidaknya data berdasarkan NIK.	1) Adanya penganggaran khusus untuk kegiatan pendataan. 2) Adanya pertemuan tatap muka dan komunikasi dengan petugas data yang berada di Desa/kecamatan terkait dengan pendataan PPKS di wilayah Kabupaten Sukoharjo,
2	Penghitungan Kebutuhan	Kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak sesuai dengan realisasi di akhir tahun. Banyak data PPKS yang tidak terduga yang harus dilayani yang tidak masuk dalam perhitungan kebutuhan.	Adanya perhitungan PPKS yang selalu terupdate.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan penganggaran SPM tidak sesuai dengan jumlah PPKS yang dilayani pada tahun berjalan.	Adanya perencanaan dan penganggaran SPM yang sesuai dengan jumlah PPKS yang dilayani pada tahun berjalan.
4	Pelaksanaan	1) Perhitungan kebutuhan dalam rencana dengan realita dilapangan berbeda jumlahnya. 2) Rencana didalam anggaran DPA dengan kondisi dilapangan yang berbeda,	Melakukan perhitungan kebutuhan yang matang yang disesuaikan dengan kebutuhan PPKS di lapangan.

7. Program dan Kegiatan

Tabel 4.49
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sosial

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	1	B Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	15,000,000
		C Penyediaan Permakanan	10,950,000
		D Penyediaan Sandang	20,000,000
		E Penyediaan Alat Bantu	59,850,400
		F Penyediaan Perbekalan Kesehatan	25,000,000
		G Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	72,025,000
		H Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	72,025,000
		J Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	25,000,000
		K Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25,000,000
		L Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25,000,000
		M Layanan Rujukan	24,999,999
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
		B Penyediaan Permakanan	2,000,000
		F Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	17,658,333
		G Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	17,658,333
		M Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	17,683,334

		N	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		E.	Penyediaan Alat Bantu	2,000,000
		F.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
		O.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	3,317,000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			E. Penyediaan Alat Bantu	2,000,000
			F. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-
			G. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	17,658,000
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		O. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	3,317,000
			A. Penyediaan Permakanan	19,640,000
			B. Penyediaan Sandang	9,820,000
			C. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9,820,000
			D. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	4,910,000
			E. Pelayanan Dukungan Psikososial	4,910,000

BAB V PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonom telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, sekaligus dalam rangka upaya pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai media pertanggungjawaban Bupati merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparasi dari penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk dievaluasi dan dikritik oleh rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, diharapkan upaya terciptanya *good governance* sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan. Sukoharjo yang Makmur dan Mandiri, masyarakat yang bertakwa, sejahtera, berdaya dan berdaulat, partisipatif dan berkeadilan dengan pemerintahan yang bersih (bebas KKN) dan berwibawa, dan secara khusus strategi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat berhasil sebagai komitmen yang telah ditetapkan bersama.